



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2005 - 2025**

2010

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Maksud dan Tujuan	I-3
1.3	Landasan Hukum	I-3
1.4	Hubungan antara RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya	I-6
1.5	Sistematika RPJPD Kabupaten Boyolali	I-7
Bab II	Kondisi Umum Daerah Kabupaten Boyolali	II-1
2.1	Gambaran Kondisi Geografis	II-1
2.2	Gambaran Kondisi Perekonomian.....	II-2
2.3	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sosial Budaya.....	II-4
2.4	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Ekonomi.....	II-36
2.5	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Tata Ruang.....	II-56
2.6	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana	II-67
2.7	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Politik dan Pemerintahan.....	II-84
2.8	Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup.....	II-101
Bab III	Isu Strategis Pembangunan	III-1
Bab IV	Visi dan Misi Daerah	IV-1
4.1	Visi Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025.....	IV-1
4.2	Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025	IV-3
Bab V	Arah Kebijakan.....	V-1
5.1	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	V-1
5.2	Arah Kebijakan Jangka Panjang.....	V-1
5.3	Pentahapan Pembangunan Daerah	V-7
BAB VI	Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 4 dan 5) mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008, juga mengamanatkan kepada daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
RPJP Daerah disusun untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah Kebijakan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
RPJM Daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJM Daerah juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.

Penyusunan RPJP-D dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan data/informasi sebelum tahun perencanaan dan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi harus dijadikan dasar penyusunan RPJP-D meliputi: (a) kondisi perekonomian daerah; (b) kependudukan; (c) keuangan daerah; (d) potensi sumber daya

daerah; (f) produk hukum daerah; (g) informasi dasar kewilayahan; dan (h) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan dimaksud adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down, dan pendekatan partisipatif. Pendekatan politik yang dimaksud adalah bahwa penyusunan RPJPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah dan DPRD. Pendekatan teknokratik dimaksudkan bahwa dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memadukan antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan nasional sebagaimana digariskan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Sementara itu perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para stakeholder pembanguan daerah secara aktif termasuk di dalamnya adalah masyarakat sebagai penerima manfaat hasil-hasil pembangunan daerah.

Memenuhi amanat Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas, maka Kabupaten Boyolali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Selain memenuhi amanat undang-undang, RPJPD Kabupaten Boyolali juga sangat diperlukan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 20 tahun (2005-2025). Pemilihan Bupati secara langsung setiap lima tahun sekali menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kedudukan RPJPD Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari bupati terpilih.

B. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Boyolali yang telah disepakati. Adapun tujuan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 adalah memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

C. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Serie D, Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

D. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025.
2. RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali yang merupakan dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJMD selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

E. Sistematika RPJPD Kabupaten Boyolali

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, tersusun secara sistematis dalam tujuh (7) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika RPJP Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025.

Bab II Kondisi Umum Daerah Kabupaten Boyolali;

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografis, gambaran kondisi perekonomian, gambaran penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang tata ruang, bidang sarana dan prasarana, bidang politik dan pemerintahan, dan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Bab III Isu Pembangunan Jangka Panjang

Bab ini terdiri dari isu-isu strategis pembangunan jangka panjang yang dihadapi Kabupaten Boyolali dalam pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini menguraikan tentang rumusan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Boyolali yang merupakan cita-cita masa depan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2025.

Bab V Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi; dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025, dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah yang terbagi menjadi empat tahapan lima tahunan, yaitu tahap I (tahun 2005-2010), tahap II (tahun 2011-2015), tahap III (tahun 2016-2020), dan tahap IV (tahun 2021-2025).

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Bab ini berisi tentang kedudukan RPJP-D dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, peran RPJP-D dan syarat keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

2.1 Gambaran Kondisi Geografis

Kabupaten Boyolali termasuk dalam Kawasan Strategis Subosukawonosraten (Solo Raya), yang merupakan sub wilayah pengembangan meliputi kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen. Secara geografis terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 – 1.500 meter diatas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali secara administratif adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Propinsi DIY
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Secara topografis wilayah di Kabupaten Boyolali terbagi dalam beberapa kategori ketinggian wilayah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ketinggian 75 – 400 dpl, meliputi wilayah Kecamatan Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Simo, Nogosari, Karanggede, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan sebagian Boyolali.
2. Ketinggian 400 – 700 dpl, meliputi wilayah Kecamatan Boyolali, Musuk, Ampel dan Cepogo.
3. Ketinggian 700 – 1000 dpl, meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel dan Cepogo.
4. Ketinggian 1000 – 1300 dpl, meliputi wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.
5. Ketinggian 1300 – 1500 dpl, meliputi wilayah Kecamatan Selo.

Luas wilayah Kabupaten Boyolali sebesar 101.510,20 Ha secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan dan 267 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kemusu, Wonosegoro, dan Ampel. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sawit. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling banyak adalah Kecamatan Ampel sebanyak 20 desa dan paling sedikit Kecamatan Boyolali memiliki 9 desa/Kelurahan.

2.2 Gambaran Kondisi Perekonomian

1. Kondisi Saat Ini

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebesar 2,04%. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,13%), dan pertumbuhan ekonomi nasional (5,13%), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali masih lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali juga lebih rendah jika dibandingkan kabupaten/kota di sekitarnya, seperti Kota Surakarta (5,80%), Kabupaten Sukoharjo (4,31%), Kota Salatiga (3,13%), Kabupaten Sragen (4,60%), Kabupaten Wonogiri (3,13%), dan Kabupaten Karanganyar (6,79%).

Tiga sektor PDRB yang memiliki laju pertumbuhan sangat tinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih (dengan laju pertumbuhan rata-rata 29,75% per tahun menurut harga yang berlaku dan 25,76% per tahun menurut harga konstan 2000), sektor bangunan dan konstruksi (dengan laju pertumbuhan rata-rata 23.11% per tahun menurut harga berlaku dan 9.83% per tahun menurut harga konstan) serta sektor jasa (dengan laju pertumbuhan rata-rata 17.21% per tahun menurut harga berlaku dan 10.88% per tahun menurut harga konstan). Dilihat dari nilainya, PDRB atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp 2,524 trilyun, pada tahun 2004 sebesar Rp 4,247 trilyun. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 antara lain sebesar Rp 2,524 trilyun di tahun 2000 dan sebesar Rp 3,456 trilyun di tahun 2004.

Sampai dengan tahun 2004, sektor pertanian masih memiliki sumbangan terbesar terhadap PDRB (35,24% atas dasar harga berlaku dan sebesar 35,79% atas dasar harga konstan tahun 2000). Sektor dengan nilai sumbangan terbesar kedua adalah sektor perdagangan dengan sumbangan sebesar 26,56% dari PDRB atas dasar harga berlaku dan sebesar 26,36% atas dasar harga konstan 2000. Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan besar sumbangan 17,68% atas dasar harga berlaku dan 17,13% atas dasar harga konstan 2000. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Boyolali.

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat selama satu tahun. Selama kurun waktu 2002–2004 PDRB perkapita Kabupaten Boyolali menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,65% (atas dasar harga berlaku) dan 0,89% (atas dasar harga konstan 2000). PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 mencapai Rp 4.525.777,00, dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 3.536.133,00. Peningkatan PDRB perkapita ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat meningkat.

Kondisi inflasi di kabupaten Boyolali cenderung berfluktuasi. Pada tahun 1999 inflasi tercatat sebesar 3,88%, sedangkan pada tahun 2001 sebesar 12,90% dan pada tahun 2004 sebesar 5,49%. Secara umum, kondisi inflasi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 lebih rendah dibandingkan laju inflasi di Jawa Tengah (5,76%), maupun nasional (6,40%). Laju inflasi menurut kelompok komoditas, kelompok komoditas bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan perumahan cenderung mengalami laju inflasi tertinggi setiap tahunnya.

2. Prediksi

Prospek perekonomian Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 tercermin pada proyeksi kondisi Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Boyolali atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan meningkat cukup baik. Empat sektor utama adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta sektor industri masih akan mendominasi pembentukan PDRB, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan di masa mendatang.

Seiring berjalannya waktu nilai produksi menurut sektor PDRB juga akan mengalami peningkatan. Dengan asumsi pemerintah daerah minimal mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata sama sebesar 14,48% pertahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi minimal dapat dipertahankan sebesar 4,02. Tingkat kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2025 diprediksikan mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari PDRB perkapita, baik atas dasar harga konstan tahun 2000 maupun atas dasar harga berlaku yang akan mengalami peningkatan.

Sejalan dengan perkembangan selama kurun waktu 1999-2004, kondisi inflasi di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 diperkirakan cenderung lebih rendah dibandingkan laju inflasi di Jawa tengah maupun nasional. Apabila kondisi ekonomi relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan harga BBM, angka inflasi hingga tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4% sampai dengan 9%.

Pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Boyolali juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan baik faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (global) yang diperkirakan belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Walaupun demikian, diperlukan optimisme yang tinggi disertai dengan kebijakan-kebijakan yang pro investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan berkualitas, dengan laju inflasi yang tetap terkendali dan stabil.

2.3 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sosial dan Budaya

1. Urusan Pendidikan

a. Kondisi Saat Ini

Gambaran kondisi pendidikan Kabupten Boyolali dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerataan akses memperoleh pendidikan; mutu, daya saing dan relevansi pendidikan; serta tata kelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan.

1) Pemerataan Akses Memperoleh Pendidikan

Aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan diukur melalui pencapaian indikator pembangunan pendidikan sebagai berikut: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rasio siswa/sekolah, rasio siswa/ kelas, rasio siswa/guru. Kondisi capaian angka-angka tersebut pada saat ini menunjukkan kondisi yang relatif baik, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Seiring dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah, pemberian beasiswa dari berbagai pihak, dan aturan pendidikan yang semakin baik dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan untuk semua, maka tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka semakin meningkat, sehingga menyekolahkan minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

APK menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah. APK pada jenjang Taman

Kanak-kanak (TK) dengan penyebut jumlah penduduk usia 5-6 tahun pada tahun ajaran 2004/2005 sebesar 48,5%. APK pada jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2004/2005 sebesar 101,6% untuk jenjang SD, dan sebesar 83,32% untuk jenjang SMP. Pada jenjang SMA sederajat nilai APK tahun ajaran 2004/2005 sebesar 43,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah dari SD sampai SMA tidak menunjukkan peningkatan yang besar. Sementara itu, partisipasi penduduk dalam menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan TK meningkat cukup tajam.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Artinya APM adalah persentase penduduk usia sekolah SD yang bersekolah di SD, penduduk usia SMP sekolah di SMP dan penduduk usia sekolah SMA bersekolah di SMA. APM SD pada tahun ajaran 2004/2005 sebesar 85,77%, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP sebesar 60,15%. Angka APM SMP tersebut termasuk kategori cukup tinggi, artinya partisipasi penduduk usia SMP untuk bersekolah di SMP cukup tinggi. Pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat APM relatif rendah, yaitu sebesar 30,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kualitas partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah pada jenjang pendidikan masing-masing relatif masih rendah dibandingkan dengan rata-rata APM Jawa Tengah.

Jumlah murid TK di lingkungan Dinas Pendidikan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2004 jumlah murid TK sebanyak 15.953 murid, lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 (15.148 murid). Jumlah murid SD cenderung menurun pada kurun waktu 2002 – 2004. Jumlah murid SD pada tahun 2004 sebesar 85.539 murid dan pada tahun 2002 sebanyak 88.562 murid. Jumlah murid SMP fluktuatif namun cenderung menurun. Jumlah murid SMP pada tahun 2004 sebanyak 35.780 murid, turun cukup drastis dibandingkan tahun 2002 (36.790 murid). Jumlah murid SMA juga mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2002–2004. Pada tahun 2004 jumlah murid SMA sebanyak 23.114 murid, sedangkan pada tahun 2002 sebanyak 23.788 murid.

Sekolah setara SD, SMP dan SMA yang dikelola Departemen Agama jumlah muridnya juga cukup banyak. Jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) cenderung menurun pada kurun waktu 2002- 2004. Jumlah murid MI pada tahun 2004 sebanyak 21.828 murid, lebih rendah dibandingkan tahun 2002 (22.723 murid). Jumlah murid Madrasah Tsanawiah (MTs) selama kurun waktu 2002–2004 cenderung menurun. Jumlah murid MTs tahun 2004 sebanyak 10.369 murid, lebih rendah dibandingkan tahun 2002 (10.202 murid). Jumlah murid Madrasah Aliyah (MA) selama kurun waktu 2002–2004 fluktuatif juga cenderung menurun. Jumlah murid MA tahun 2004 hanya sebanyak 1.938 murid, lebih rendah dibandingkan tahun 2002 (2.226 murid).

Kondisi ruang kelas SD sebagian besar rusak ringan atau rusak berat. Pada tahun 2004 hanya sebanyak 38,59% ruang kelas SD yang dalam kondisi baik, sedangkan lainnya dalam kondisi rusak ringan (41,53%), dan rusak berat (24,16%). Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan pendidikan khususnya prasarana pendidikan masih belum

baik. Ruang kelas MI pada tahun 2004 yang berkondisi baik sebesar 35,58%, rusak ringan sebesar 31,77%, dan rusak berat sebesar 32,65%.

Pada jenjang pendidikan SMP kondisi ruang kelas menunjukkan kondisi jauh lebih baik dibandingkan jenjang SD. Pada tahun ajaran 2004/2005 ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 90,68% dan hanya 8,12% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 1,20% rusak berat. Kondisi ruang kelas MTs lebih buruk dibandingkan kondisi SMP, yaitu hanya sebesar 44,06% yang berkondisi baik dan lainnya berkondisi rusak ringan (28,99%) dan rusak berat (26,95%).

Pada jenjang pendidikan SMA dan MA, kondisi ruang kelas jauh lebih baik dibandingkan dengan SMP/MTs. Pada tahun ajaran 2004/2005 ruang kelas SMA yang berkondisi baik sebesar 93,58%, hanya 2,22% rusak ringan dan 4,20% rusak berat. Kondisi ruang kelas MA pada tahun ajaran 2004/2005 yang baik sebesar 87,69%, lainnya rusak ringan sebesar 7,69% dan rusak berat sebanyak 4,62%. Kondisi hampir sama juga terjadi pada ruang kelas SMK yang sebagian besar kondisinya baik (91,15%), dan lainnya hanya rusak ringan (8,85%).

Jumlah guru di Kabupaten Boyolali untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2002 – 2004. Jumlah guru TK pada tahun 2004 sebanyak 810 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 (702 orang). Guru SD pada tahun 2004 sejumlah 4.807, orang lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 (5.333 orang). Guru SLTP pada tahun 2004 sebanyak 2.345 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 (2.470 orang). Guru SLTA pada tahun 2004 sebanyak 1.805 orang, lebih besar dibandingkan tahun 2002 (1.237 orang).

Jumlah guru di luar Dinas Pendidikan di Kabupaten Boyolali untuk semua jenjang pendidikan juga menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2002–2004. Guru MI pada tahun 2004 sebanyak 1.605 orang lebih tinggi dibandingkan tahun 2002, yaitu sebanyak 393 orang. Guru MTs pada tahun 2004 sebanyak 815 orang lebih tinggi dibandingkan tahun 2002, yaitu sebesar 238 orang. Guru MA pada tahun 2004 sebanyak 229 orang lebih besar dibandingkan tahun 2002 yaitu sebanyak 51 orang.

Rasio guru terhadap murid untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Boyolali menunjukkan kecenderungan meningkat dan mendekati pada kondisi ideal. Pada tahun 2004 rasio jumlah guru terhadap murid TK sebesar 1:20, untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP 1:18 dan SLTA 1:15 kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah guru di Kabupaten Boyolali memadai, bahkan ada kecenderungan kelebihan jumlah guru. Namun demikian, dilihat dari pemerataannya masih sangat kurang karena di sebagian wilayah terutama di pedesaan terdapat sekolah yang kekurangan guru, apalagi jika dikaitkan dengan kesesuaian tingkat pendidikan dan mata pelajaran yang diampu.

Rasio guru terhadap murid untuk semua satuan pendidikan pada sekolah di luar Dinas Pendidikan di Kabupaten Boyolali menunjukkan kecenderungan meningkat dan mendekati pada kondisi ideal. Pada tahun 2004 rasio jumlah guru terhadap murid MI

sebesar 1:14, dan MTs sebesar 1:12 dan MA sebesar 1:8 kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah guru pada sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Boyolali juga memadai, bahkan ada kecenderungan kelebihan jumlah guru. Walaupun demikian distribusi guru dirasakan masih kurang merata, sehingga pada sebagian sekolah masih terdapat kekurangan guru, apalagi jika dikaitkan dengan kesesuaian tingkat pendidikan dan mata pelajaran yang diampu.

Rasio sekolah terhadap murid pada semua satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan menunjukkan kecenderungan meningkat dan mendekati pada kondisi ideal. Pada tahun 2004 rasio sekolah terhadap murid TK sebesar 1:32, untuk satuan pendidikan SD 1:142, SLTP 1:417 dan SLTA 1:373. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah sekolah di Kabupaten Boyolali telah memadai.

Rasio Sekolah terhadap murid pada semua satuan pendidikan di luar Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali fluktuatif. Pada tahun 2004 rasio sekolah terhadap murid MI sebesar 1:204, MTs sebesar 1:37 dan MA sebesar 1:58. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah sekolah di luar Dinas Pendidikan di Kabupaten Boyolali memadai.

Pada satuan pendidikan non formal dan pendidikan kesetaraan, kondisi pada tahun 2004 di Kabupaten Boyolali terdapat 70 kelompok bermain, 2 buah tempat penitipan anak, dan 20 buah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penyelenggaraan keaksaraan fungsional di Kabupaten Boyolali selama tahun 2004 dilaksanakan dengan baik, terdiri dari keaksaraan fungsional tingkat dasar sebanyak 735 kelompok belajar, keaksaraan tingkat lanjut sebanyak 399 kelompok belajar, keaksaraan tingkat mandiri sebanyak 18 kelompok, dan keaksaraan fungsional tingkat lanjut sebanyak 18 orang.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Boyolali secara umum, baik paket A (setara SD), paket B (setara SMP), maupun paket C (setara SMA) belum optimal. Pada tahun 2004 jumlah Paket A sebanyak 2 kelompok belajar dengan jumlah warga belajar sebanyak 76 orang. Paket B sebanyak 49 kelompok belajar dengan warga belajar sebanyak 1.019 orang. Paket C sebanyak 12 kelompok belajar dengan jumlah warga belajar sebanyak 358 orang. Jumlah kelompok belajar usaha di Kabupaten Boyolali sebanyak 72 kelompok belajar dengan warga belajar sebanyak 360 orang. Selain itu di Kabupaten Boyolali terdapat 14 Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pemerataan akses memperoleh pendidikan bagi semua kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan cukup baik dan merata. Sarana dan prasarana pendidikan SD tersedia di semua desa, SMP dan SMA di hampir semua kecamatan. Keterjangkauan sarana dan prasarana tersebut relatif mudah oleh semua lapisan masyarakat.

2) Mutu, Daya Saing dan Relevansi Pendidikan

Angka kelulusan semua jenjang pendidikan di Kabupaten Boyolali pada tahun ajaran 2004/2005 termasuk dalam kategori tinggi untuk semua jenjang pendidikan, baik

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Angka kelulusan SD sebesar 99,27%, dan MI sebesar 97,44%. Untuk jenjang pendidikan SMP angka kelulusan sebesar 92,53% dan untuk MTs sebesar 89,47%. Angka kelulusan pada jenjang SMA sebesar 91,53%, untuk MA sebesar 94,74%, dan SMK sebesar 97,68%.

Persentase guru layak mengajar pada tahun ajaran 2004/2005 untuk jenjang pendidikan SD sebesar 81,57%, dan MI sebesar 78,69%. Pada jenjang pendidikan SMP persentase guru layak mengajar sebesar 78,69%, sedangkan MTs sebesar 74,93%. Guru layak mengajar untuk satuan pendidikan SMA sebesar 81,33%, MA sebesar 60,34% dan SMK sebesar 63,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelayakan guru dalam mengajar tergolong tinggi.

3) Tata Kelola dan Pencitraan Publik Penyelenggaraan Pendidikan

Pada tahun 2004 kondisi tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan belum optimal, walaupun sudah seluruh satuan pendidikan menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2004 hampir semua sekolah (satuan pendidikan) sudah terakreditasi.

b. Prediksi

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Boyolali diprediksikan meningkat sebesar 0,30% per tahun. Berdasarkan kondisi tersebut penduduk usia sekolah diprediksikan mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut kondisi pendidikan sampai dengan tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan. Pemerataan akses memperoleh pendidikan semakin baik dan mutu pendidikan akan semakin baik, serta pengelolaan dan citra pendidikan semakin baik. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan PAUD, SMP dan SMA cenderung meningkat. Khusus Untuk tingkat SD, APK cenderung turun. Hal ini karena diasumsikan masyarakat semakin sadar untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan SD pada usia 5,5 tahun atau 6 tahun dan anak usia 12 tahun pada jenjang pendidikan SMP, beasiswa dan BOS terus diberikan, serta aturan pendidikan semakin baik.

Pada tahun ajaran 2010/2011 APK PAUD diprediksikan akan mengalami peningkatan sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi sebesar 46,87%. Untuk jenjang pendidikan TK APK diprediksikan juga meningkat sehingga pada tahun ajaran 2025/2025 menjadi 98,36%. Untuk jenjang pendidikan SD termasuk paket A diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 sebesar 101,42%. Untuk jenjang pendidikan SMP termasuk paket B APK diprediksikan akan meningkat, sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 sebesar 100,00%. Pada jenjang pendidikan SMA diprediksikan APK termasuk Paket C akan mengalami peningkatan sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi sebesar 80%.

Prediksi APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA terlihat bahwa ada peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, APM termasuk paket A mengalami peningkatan sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 sebesar 85,24%.

Untuk jenjang pendidikan SMP secara bertahap juga mengalami peningkatan sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi sebesar 82,16%. Jenjang pendidikan SMA, APM juga akan mengalami peningkatan secara bertahap sehingga pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi sebesar 60,37%.

Jumlah murid diperkirakan akan mengalami peningkatan, baik pada jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. Jumlah guru sampai dengan tahun 2025 juga diprediksikan cenderung meningkat mengikuti jumlah siswa. Rasio guru terhadap murid dipertahankan maksimal 1:32 untuk semua jenjang pendidikan.

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan diperkirakan mengalami peningkatan. Pada tahun ajaran 2010/2011 angka kelulusan SD/MI diprediksikan berkisar antara 97% - 100%, sedangkan angka kelulusan SMP/MTS diprediksikan berkisar antara 94%-100% dan SMA/MA/SMK diprediksikan sebesar 90%–100%. Kondisi ini dipertahankan pada tahun ajaran 2015/2016, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2025/2026.

2. Urusan Kesehatan

a. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan RPJP Nasional pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas manajemen kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dapat dilihat dari angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan.

Kondisi pembangunan kesehatan digambarkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu dari tahun 1999 – 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya adalah 59,92%, angka yang sangat besar. Angka kematian ibu pada tahun 1999 sebesar 27,93 per 100.000 kelahiran meningkat menjadi 131,01 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004.

2) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa)

Angka kematian bayi menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 1999-2004. Angka kematian bayi pada tahun 1999 sebesar 8,87 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2004 menjadi 2,48 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi yang tertinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu sebanyak 18,81 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita juga rata-rata mengalami penurunan dari 0,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 0,47 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004.

3) Angka Kesakitan

Perkembangan penyakit menular di Kabupaten Boyolali rata-rata mengalami peningkatan. Kasus Tb Paru tahun 1999–2004 meningkat dengan rata-rata peningkatan per tahun adalah 31,85%. Kasus Tb Paru tahun 1999 sebanyak 102 kasus meningkat menjadi 337 kasus pada tahun 2004. Peningkatan ini erat kaitannya dengan meningkatnya penemuan kasus baru atau CDR (Case Detection Rate). CDR Tb Paru rata-rata mengalami peningkatan sebesar 13,51%. Sementara itu tingkat kesembuhan Tb Paru hanya meningkat rata-rata sebesar 0,53% per tahun.

Kasus DBD di kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 34,56% pertahun dengan jumlah kasus pada tahun 2004 sebanyak 182 kasus. Incident rate DBD mengalami peningkatan sebesar 33,96%. Jumlah kematian karena DBD mengalami peningkatan. CFR (Case fatality Rate) BDB tahun 1999 hanya 3, dan pada tahun 2004 mencapai 5. Kasus penyakit kusta dari tahun 2002–2004 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 7,34% dengan jumlah kasus pada tahun 2004 sebanyak 10 kasus. Sementara itu kasus diare mengalami penurunan sebesar 18,53%. Penderita HIV/AIDS belum dijumpai di Kabupaten Boyolali, namun perlu diwaspadai karena kemungkinan terdapat kasus yang tidak terdeteksi. Penyakit karena perilaku seks yang tidak sehat menunjukkan peningkatan dari sebanyak 3 kasus pada tahun 2003 menjadi 7 kasus di tahun 2004.

Kasus penyakit tidak menular cenderung meningkat. Kasus neoplasma pada tahun 2004 hanya sebanyak 479 kasus, padahal pada tahun 2002 hanya 65 kasus. Pada tahun 2004 kasus Neoplasma paling banyak Ca Mamae (193 kasus). Sementara itu kasus Diabetis Melitus pada tahun 2002 sebanyak 940 kasus, selanjutnya meningkat menjadi 4.316 kasus pada tahun 2004. Kasus penyakit tidak menular yang jumlahnya terbesar

adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu mencapai 13.968 kasus pada tahun 2003, dan 1.423 kasus pada tahun 2004.

4) Kondisi Gizi Masyarakat

Kondisi gizi pada masyarakat dapat digambarkan dengan kondisi gizi pada balita. Balita dengan gizi buruk selama kurun waktu tahun 1999-2004, rata-rata mengalami penurunan sebesar 28,23% pertahun. Kasus Balita gizi buruk pada tahun 1999 mencapai 5.021 balita (8,62%), selanjutnya menurun menjadi sebesar 658 kasus (0,76%) pada tahun 2004. Sementara jumlah balita dengan BGM mengalami penurunan dari sebanyak 609 balita (0,96%) pada tahun 1999 menjadi 472 balita (0,66%).

5) Pelayanan Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Program pemeliharaan untuk kesehatan masyarakat dibiayai oleh pemerintah pusat melalui program Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin). Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boyolali hanya sebanyak 64.601, semuanya telah mendapatkan kartu Askeskin untuk memperoleh layanan kesehatan.

Sarana dan Prasana Kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui Puskesmas dan jaringannya. Jumlah Puskesmas pada tahun 2004 sebanyak 26 buah, puskesmas pembantu 47 buah, puskesmas rawat inap sejumlah 13 buah dan puskesmas keliling sebanyak 26 buah. Pelayanan rujukan dilaksanakan oleh rumah sakit, yaitu sebanyak 3 buah rumah sakit umum dan 6 buah rumah sakit swasta. Pelayanan persalinan juga dilaksanakan oleh rumah bersalin. Jumlah rumah bersalin pada tahun 2004 sebanyak 11 buah.

Berdasarkan perhitungan rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk, terlihat bahwa di Kabupaten Boyolali masih mengalami kekurangan jumlah tenaga kesehatan, kecuali dokter spesialis dan tenaga farmasi. Walaupun dilihat dari proporsinya sudah mencukupi, namun di Kabupaten Boyolali masih kekurangan beberapa dokter spesialis, antara lain dokter spesialis bedah ortopedi, bedah syaraf, spesialis paru, jantung, anestesi sub critical care dan pathologi anatomi.

Tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi oleh Negara Indonesia antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

Tantangan global yang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) dan perdagangan bebas. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta pelayanan publik melalui kesepakatan General Agreement on Trade in Service (GATS) dan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(TRIPS), dimulainya pasar bebas ASEAN pada tahun 2003 dan pasar bebas Asia Pasific pada tahun 2020 akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dan tenaga kesehatan asing perlu diwaspadai. Sedangkan dalam lingkup nasional antara lain adalah upaya penerapan kebijakan pemerataan pembangunan kesehatan secara lebih luas, yang didukung dengan sumber daya yang cukup.

b. Prediksi

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diprediksikan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tergantung pada 4 faktor yaitu perilaku hidup masyarakat, faktor lingkungan, geografis dan faktor pelayanan kesehatan. Faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor lingkungan dan faktor perilaku. Perwujudan derajat kesehatan yang baik dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk. Angka Kematian Ibu (AKI) diprediksikan menurun sampai dengan tahun 2025. Dalam kurun waktu yang sama, Angka Kematian Bayi (AKB) juga diprediksikan menurun. Angka Kematian Balita (AKBa) juga diprediksikan akan menurun dalam kurun waktu hingga tahun 2025.

Seiring dengan perbaikan gizi masyarakat, sampai dengan tahun 2025 diperkirakan persentase gizi buruk akan mengalami penurunan. Kasus penyakit menular terutama TB paru, demam berdarah dan diare diprediksikan sampai dengan tahun 2025 masih tinggi. Kasus penyakit tidak menular seperti neoplasma, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dan pembuluh darah diperkirakan masih tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberantasan penyakit secara intensif, penyuluhan tentang pentingnya kesehatan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.

Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali ke depan diharapkan pelayanan rumah sakit sebagai rujukan dan Puskesmas semakin baik. Pada tahun 2025 kedudukan RSUD Pandanarang diharapkan menjadi rumah sakit rujukan tersier, sedangkan Rumah Sakit Banyudono sebagai rumah sakit rujukan sekunder, dan Rumah Sakit Simo menjadi rumah sakit rujukan primer. Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit juga diperkirakan semakin lengkap. Sarana prasarana kesehatan lainnya seperti rumah bersalin, balai pengobatan, dan Puskesmas juga diperkirakan sampai dengan tahun 2025 akan semakin lengkap, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.

Dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan agar semakin baik dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan belum sebanding dengan jumlah penduduk, sampai dengan tahun 2025 diperkirakan jumlah tenaga kesehatan akan terus ditambah jumlahnya, baik dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga sanitasi, maupun tenaga kesehatan masyarakat. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dapat diwujudkan, artinya pelayanan kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif

dari masyarakat, dan memberikan kemudahan untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Kondisi Saat Ini

Kelembagaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Boyolali belum dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kapasitas generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya minat dan motivasi generasi muda untuk bergabung dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelembagaan organisasi kepemudaan. Rendahnya peran serta generasi muda dalam kelembagaan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan.

Kelembagaan pemuda di Kabupaten Boyolali pada umumnya merupakan binaan dari lembaga-lembaga agama seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan pemuda gereja. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Boyolali, pada tahun 2004 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 19 organisasi.

Organisasi kepemudaan di tingkat desa/ kelurahan perkembangannya mengalami pasang surut. Sampai tahun 2004 jumlah karang taruna di Kabupaten Boyolali sebanyak 267 organisasi, terdiri dari 84 organisasi kategori tumbuh/pasif, 125 organisasi berkembang/aktif, dan sebanyak 58 organisasi maju/rekreatif. Sementara itu, karang taruna yang memiliki kualifikasi percontohan/aktif rekreatif mandiri sampai saat ini belum ada. Untuk memperkuat kelembagaan perlu fasilitasi dan pembinaan organisasi, sehingga kreativitas pemuda, kewirausahaan pemuda semakin meningkat.

Upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pemuda, yaitu melalui fasilitasi pengembangan kewirausahaan, manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda; pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). Kebijakan kepemudaan juga perlu diarahkan melalui fasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pertukaran pemuda antar kabupaten. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan melalui koordinasi antar dinas instansi terkait maupun dengan lembaga non pemerintah.

Pembangunan olah raga di Kabupaten Boyolali dirasakan masih belum optimal. Prestasi yang pernah dicapai Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 dalam olah raga baru meraih 8 predikat juara di tingkat eks Karesidenan Surakarta, 11 juara di tingkat Propinsi Jawa Tengah dan 5 juara di tingkat Nasional. Prestasi olah raga ini perlu ditingkatkan lagi agar sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain dalam berbagai event olah raga dari tingkat karisidenan, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hingga saat ini kondisi sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Boyolali masih terbatas. Pada tahun 2004 jumlah sarana olah raga yang berstandar nasional hanya sebanyak 2 buah. Untuk menunjang prestasi yang lebih baik, maka kedepan perlu upaya peningkatan sarana dan prasarana olah raga berskala nasional maupun

skala lokal daerah dengan melibatkan masyarakat.

b. Prediksi

Pembangunan dibidang kepemudaan di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 dihadapkan pada tantangan semakin menurunnya minat dan motivasi generasi muda untuk bergabung dengan organisasi kepemudaan. Selain disebabkan masih lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan, penurunan minat tersebut juga disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai sosial dan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya keberadaan organisasi kepemudaan. Kondisi ini menjadikan peran pemuda dalam pembangunan daerah tidak begitu nampak. Oleh karena itu, kedepan diperlukan pembinaan kelembagaan organisasi kepemudaan sehingga dapat berkembang dan lebih berperan dalam pembangunan daerah.

Pembangunan keolahragaan di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 menghadapi tantangan besar, yaitu semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas olah raga bagi masyarakat umum. Kondisi ini menghambat kemajuan pemsarakatan olah raga yang selama ini dilakukan, karena menjadikan kesempatan bagi masyarakat untuk berlatih semakin berkurang, sehingga menghambat bermunculannya atlet-atlet potensial yang layak berlaga pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka prestasi olahraga di Kabupaten Boyolali diperkirakan mengalami penurunan, dan kalah bersaing dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, kedepan perlu diambil kebijakan untuk meningkatkan fasilitas dan sarana olah raga yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Selain itu perlu pula dilakukan penyelenggaraan event-event olah raga, baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten agar dapat memacu prestasi di bidang olahraga.

4. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kondisi Saat Ini

Penduduk di Kabupaten Boyolali tahun 2004 mencapai 939.087 jiwa, terdiri dari 459.106 jiwa penduduk laki-laki dan 479.981 jiwa penduduk perempuan. Selama tahun 1999–2004 terjadi penambahan jumlah penduduk dengan pertumbuhan 0,55% per tahun. Dilihat dari perkembangan tiap tahun, terjadi penurunan pertumbuhan penduduk dari sebesar 0,57% pada tahun 1999 menjadi hanya 0,35% pada tahun 2004. Jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki, terlihat dari angka rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 95,7 artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 96 orang penduduk laki-laki.

Meningkatnya jumlah penduduk per tahun secara absolut, dan menurunnya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian yang menurun. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tingkat kelahiran kasar (CBR) dan tingkat kematian Kasar (CDR). Tingkat kelahiran dalam kurun waktu 1999-2004 menunjukkan kecenderungan menurun dari 10,40 per seribu penduduk pada tahun 1999, menjadi 9,10 per seribu penduduk

pada tahun 2004. Sementara itu tingkat kematian menunjukkan peningkatan dari 4,20 per seribu penduduk pada tahun 1999 menjadi 4,50 per seribu penduduk pada tahun 2004.

Angka pertumbuhan penduduk yang semakin menurun di Kabupaten Boyolali ini akan berpengaruh pada banyak aspek, salah satu diantaranya yang cukup penting adalah perubahan struktur umur apabila penyebab utamanya adalah penurunan tingkat kematian dan kelahiran. Penurunan tingkat kematian mengindikasikan bahwa derajat kesehatan semakin meningkat. Hal ini berarti penduduk yang ada semakin bertambah sehat (semakin bertambah panjang usia harapan hidup), sehingga jumlah penduduk akan terus bertambah.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan daerah apabila berkualitas. Agar penduduk lebih berkualitas, maka perlu peningkatan tingkat pendidikan bagi seluruh penduduk. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk, tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), tetapi juga lebih mengarah pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Selain masalah pendidikan, yang perlu mendapat perhatian dan ditangani secara terpadu adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan program Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan keluarga, serta peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kualitas hidup keluarga. Pemberdayaan keluarga dimulai dari keluarga balita, keluarga anak dan remaja serta keluarga Lansia.

Pencatatan sipil di Kabupaten Boyolali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengangkatan anak, akta kutipan kelahiran dan legalisasi. Akta catatan sipil yang paling banyak diperlukan adalah akta kelahiran. Dalam kurun waktu 1999-2004 bersifat fluktuatif, yaitu dari sebanyak 15.345 buah di tahun 1999 meningkat menjadi 20.001 buah di tahun 2004.

b. Prediksi

Sampai dengan tahun 2025 penduduk di Kabupaten Boyolali diprediksikan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,30% per tahun. Sementara itu tingkat kelahiran dan tingkat kematian kasar sampai dengan tahun 2025 diperkirakan menurun. Struktur penduduk di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 dalam proses kearah struktur penduduk tua tetap berlangsung. Jumlah secara absolute dan relative untuk kelompok umur pertama yaitu balita dan anak cenderung menurun, kemudian kelompok remaja dan dewasa secara absolute ada peningkatan, tetapi secara relative mengalami penurunan.

Sampai dengan tahun 2025 diperkirakan sebagian besar penduduk (72,68%) termasuk kelompok usia kerja, sebanyak 27,26% wanita usia subur, dan paling rendah adalah kategori balita (8,37%). Penurunan secara relatif jumlah balita dan anak sebagai hal yang wajar, merupakan indikator keberhasilan program reduksi kelahiran, tetapi program ini belum kelihatan pada kelompok penduduk usia kerja dan usia lanjut.

5. Urusan Ketenagakerjaan

a. Kondisi Saat Ini

Seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya, jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja semakin meningkat. Penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun 45) dalam kurun waktu sejak tahun 2003 hingga tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,35% dari sebanyak 680.110 orang menjadi 682.521 orang. Angkatan kerja juga mengalami peningkatan dari 449.888 orang di tahun 2003 menjadi 454.501 orang pada tahun 2004 dengan pertumbuhan sebesar 1,03%. Angkatan kerja terdiri dari (1) angkatan kerja yang bekerja, meningkat dari sebanyak 428.877 orang di tahun 2003 menjadi 434.880 orang di tahun 2004; dan (2) angkatan kerja yang mencari kerja, meningkat dari sebanyak 21.011 orang di tahun 2003 menjadi 19.621 orang pada tahun 2004.

Jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Boyolali menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan sebesar -0,95%. Pada tahun 2003 jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 230.222 orang, pada tahun 2004 menjadi hanya sebanyak 228.020 orang, termasuk didalamnya adalah penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sebagian tenaga kerja masih merupakan siswa atau murid di sekolah, mengurus rumah tangga maupun sementara tidak bekerja dikarenakan alasan-alasan tertentu. TPAK di Kabupaten Boyolali menunjukkan peningkatan dari sebanyak 66,15% pada tahun 2003 menjadi 66,59% pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi semakin bertambah.

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dalam kurun waktu 2001 hingga tahun 2004 cenderung meningkat dari sebanyak 44 orang menjadi 130 orang. Sementara itu, penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 2.006 orang (2001) menjadi 1.498 orang (2004). Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) untuk bekerja di luar negeri cenderung meningkat dari sebanyak 187 orang (2001) menjadi sebanyak 65 orang (2004). Program AKAD dan AKL lebih banyak diminati oleh tenaga kerja perempuan dari pada penduduk laki-laki, karena pekerjaan yang ditawarkan kedua program tersebut lebih banyak sebagai kepanjangan tangan pekerjaan domestik perempuan.

Tingkat kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari besarnya Upah minimum Kabupaten. Nilai UMK di Kabupaten Boyolali menunjukkan peningkatan dari sebanyak Rp 153.000,00 pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp 385.000,00 pada tahun 2004. Rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak pada kurun waktu yang sama juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 81,00% pada tahun 2003 menjadi 92,48% pada tahun 2004.

Tingkat kerentanan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu sejak tahun 1999-2004 tergolong cukup tinggi. Kerentanan tersebut disebabkan banyaknya kasus PHK, kasus perselisihan tenaga kerja, dan kasus kecelakaan kerja. Setidaknya pada tahun 2003 dan 2004 terdapat perusahaan mengalami bangkrut sebanyak 2 unit. Hal ini berakibat pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 274 orang pekerja. Dalam kurun waktu 1999-2004 tahun juga telah terjadi sebanyak 165 kasus perselisihan tenaga kerja. Standar keselamatan kerja juga belum sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan, sehingga sering terjadi kasus kecelakaan kerja. Sejak tahun 1999-2004 setidaknya telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.165 kasus.

b. Prediksi

Prospek angkatan kerja di Kabupaten Boyolali merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk di masa lalu dan momentum perekonomian pertumbuhan yang tengah berlangsung saat ini. Jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan masih akan meningkat sampai tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 0,30%. Angkatan kerja juga diperkirakan akan bertambah dengan rata-rata sebesar 0,30%.

Peningkatan angkatan kerja ini menegaskan arti strategis pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkesinambungan untuk memberikan peluang kerja secara memadai. Prospek ekonomi diharapkan dapat menyerap angkatan kerja ke dalam pasar kerja secara lebih baik, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperkirakan menurun. Perlu diantisipasi untuk bisa menekan jumlah pengangguran terbuka yang ada akibat terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor formal, diantaranya dengan meningkatkan peran serta penyelenggaraan pendidikan formal yang menitikberatkan pada kompetensi kebutuhan lapangan pekerjaan dan penguatan kelembagaan lembaga-lembaga pelatihan ketenagakerjaan.

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan semakin meningkat. Penempatan AKAD dan AKL diperkirakan masih didominasi oleh tenaga kerja perempuan, dengan keterampilan yang lebih baik. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran, perlu dilakukan optimalisasi AKAD dan AKL melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja, dan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam penyelenggaraan bursa kerja antar daerah untuk meningkatkan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja. Jumlah antar kerja antar negara sampai dengan tahun 2025 diperkirakan tidak mengalami perubahan karena jumlahnya sudah tergolong tinggi, yaitu mencapai 563 orang.

Tingkat kesejahteraan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Boyolali yang dapat diketahui dari UMR diperkirakan mengalami peningkatan, namun tidak signifikan dan masih rendah dibandingkan kebutuhan hidup layak. Hal ini memacu sebagian tenaga kerja di

Kabupaten Boyolali untuk mencoba mencari pekerjaan di kabupaten/kota lain yang nilai UMRnya tinggi.

Sampai dengan tahun 2025 diperkirakan masih ditemukan ketidakharmonisan hubungan industrial, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), perselisihan tenaga kerja, namun kecelakaan kerja semakin berkurang. Kasus PHK tidak banyak mempengaruhi proporsi angka pengangguran terbuka, karena tenaga kerja korban PHK tidak menganggur, tetapi berusaha di sektor informal atau ada yang menjadi TKI dan TKW di luar negeri. Kasus hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan tentunya harus menjadi perhatian agar jumlahnya dapat terus menurun pada tahun-tahun mendatang. Peran serta pemerintah tentunya harus dioptimalkan melalui pendekatan-pendekatan kepada dunia usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengedepankan keselamatan kerja. Dengan demikian jaminan untuk dapat hidup layak dan keselamatan kerja yang merupakan hak pekerja dapat diperoleh.

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Kondisi Saat Ini

Upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, negara kita telah menandatangani beberapa konvensi internasional yang memberikan dasar kuat tentang untuk meningkatkan kualitas perempuan dan perlindungan anak, melalui ratifikasi Konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) dengan UU No. 7 tahun 1984, menandatangani 12 Program Aksi Beijing (1995), menandatangani Konvensi No. 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengisyaratkan penggajian yang sama untuk pekerjaan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Demikian pula dengan Ratifikasi Hak-Hak Ekonomi dan Sosial dengan UU No. 15 tahun 2003. Acuan kebijakan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Strategi pembangunan daerah di era otonomi daerah lebih diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, termasuk pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, sesuai dengan komitmen internasional sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Konferensi Wanita Internasional di Beijing (China) yang dirumuskan dalam Dua Belas Program Aksi Beijing, Pendidikan Untuk Semua (Education for All), Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals), dan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Diharapkan pembangunan daerah di era otonomi daerah lebih responsif gender, sehingga permasalahan terkait dengan masalah diskriminasi, marginalisasi, kemiskinan, kerentanan dan ketertinggalan perempuan dapat dieliminasi.

Kualitas sumber daya manusia digambarkan dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80. Nilai IPM

diketahui dari usia harapan hidup (tahun), angka melek huruf (%), rata-rata lama sekolah (tahun), dan pengeluaran riil per kapita per bulan (ribuan Rp). Besarnya IPM di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999-2004 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari sebesar 64,4 pada tahun 1999 menjadi 69,0 pada tahun 2004. Peningkatan ini terutama karena meningkatnya tingkat pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan meningkatnya pendapatan yang dicerminkan dari rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam satu bulan. Namun demikian rata-rata IPM Kabupaten Boyolali masih berada di bawah rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah, baik pada tahun 1999 (64,6) maupun tahun 2004 (66,3).

Besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur keberhasilan pembangunan berwawasan gender di suatu wilayah, dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80, diketahui dari usia harapan hidup (tahun); angka melek huruf (%); rata-rata lama sekolah (tahun) dan kontribusi pendapatan rumah tangga berdasarkan kelompok laki-laki dan perempuan (%).

Jika dilihat dari peringkat nasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999-2004 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari 61,9 di tahun 1999 menjadi 62,6 di tahun 2004. Nilai IPG tersebut lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 57,4 di tahun 1999 dan 59,8 di tahun 2004. Meningkatnya IPG Kabupaten Boyolali terutama karena meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan persentase angkatan kerja perempuan. Dengan kata lain, meningkatnya pendidikan perempuan berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan kelompok usia produktif yang memasuki lapangan kerja di sektor publik.

Keberhasilan pembangunan yang responsif gender dapat diketahui dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan komposisi dari persentase perempuan di parlemen (%), persentase perempuan bekerja pada kelompok profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, persentase perempuan dalam angkatan kerja (%), persentase jumlah penduduk perempuan dan laki-laki (%), dan rata-rata upah di sektor non pertanian laki-laki dan perempuan (%). Besarnya nilai IDG antara 40 (terendah) dan 80 (tertinggi).

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 1999-2004 menunjukkan kategori cukup baik. Besarnya IDG tahun 1999 sebesar 47,1, meningkat menjadi 52,3 pada tahun 2004. Peningkatan IDG Kabupaten Boyolali terutama ditopang meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki angkatan kerja dan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik serta meningkatnya rata-rata pendapatan pekerja perempuan di sektor non pertanian. Namun demikian perkembangan IDG Kabupaten Boyolali masih berada di bawah rata-rata IPG Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 51,2 pada tahun 1999 dan 56,9 pada tahun 2004. Permasalahan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan partisipasi politik di Kabupaten Boyolali relatif tertinggal dari pada laki-laki. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun pendidikan dan kesadaran politik perempuan masih

rendah. Kaum perempuan dan pemilih pemula relatif kurang mendapatkan pendidikan politik, menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya peningkatan keterwakilan politik bagi perempuan sebesar 30%.

Perlindungan dan kesejahteraan anak, dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan struktur kelompok umur penduduk termasuk kategori muda, jumlah penduduk kelompok umur 0-18 tahun (anak-anak) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 cukup besar (36,33%), sebagian besar anak laki-laki (55%) dan lainnya anak perempuan (45%) yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Masalah pendidikan anak perempuan, masih terdapat kecenderungan pendidikan anak perempuan lebih rendah daripada laki-laki, terutama pendidikan menengah. Pada anak usia sekolah (7-12 tahun) rata-rata tahun sekolah anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Kondisi ini dapat dimengerti karena budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat, bahwa menyekolahkan anak laki-laki lebih diprioritaskan oleh orang tua dibandingkan menyekolahkan anak perempuan. Kondisi di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan (misalnya SMA/SMK/MA) lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah daripada murid perempuan.

b. Prediksi

Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dimasa mendatang diperkirakan semakin mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender semakin menguat. Hal ini didukung oleh meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya pendidikan perempuan, kesehatan dan partisipasi politik kaum perempuan. Dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak, sehingga dimasa mendatang kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik.

Meningkatnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik diperkirakan semakin mendekati kouta 30%, seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem sosial di masa mendatang semakin egaliter sejalan dengan meningkatnya perkembangan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda, diperkirakan perhatian terhadap anak akan semakin tinggi, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun perlindungan anak. Pemenuhan hak-hak anak pada masa mendatang akan semakin baik. Fasilitasi pembentukan Kabupaten Boyolali ramah anak menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari kekerasan dan tumbuh kembang anak.

7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Saat Ini

Pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Boyolali menunjukkan peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,87%. Kondisi ini berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk apabila PUS tersebut tidak mengendalikan jumlah kelahirannya.

Pencapaian peserta KB baru selama tahun 1999-2004 menunjukkan penurunan, yaitu dari sebanyak 19.055 orang menjadi 14.167 orang. Peserta KB baru banyak memilih alat kontrasepsi jangka pendek yaitu suntik. Peserta KB baru mulai tertarik alat kontrasepsi jangka panjang yaitu Implant. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah peserta KB baru yang menggunakan alat kontrasepsi Implant setiap tahunnya sebesar 13,54%. Partisipasi laki-laki sebagai peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 1999-2004 menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 5,85%.

Jumlah peserta KB aktif selama kurun waktu tahun 1999-2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sebanyak 129.769 orang menjadi sebanyak 133.030 orang. Jumlah peserta KB mandiri sedikit mengalami peningkatan, rata-rata kenaikannya per tahun sebesar 1,72%. Peningkatan partisipasi peserta KB tidak lepas dari peran kader dan petugas KB. Di Kabupaten Boyolali jumlah PLKB pada tahun 2004 sebanyak 91 orang, cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya (129 orang pada tahun 1999). Jumlah sub PPKBD juga cenderung menurun dari sebanyak 1.345 orang (1999) menjadi 1.361 orang (2004). Sementara itu, jumlah PPKBD cenderung meningkat dari sebanyak 267 orang di tahun 1999 menjadi 271 orang di tahun 2004. Kondisi yang sama juga terjadi pada PKS yang meningkat dari sebanyak 6.150 orang (1999) menjadi 6.236 orang (2004).

Indikator keluarga sejahtera dalam pembangunan adalah jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Berdasarkan data yang ada jumlah keluarga miskin (pra sejahtera) dari tahun 1999 sampai 2004 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar 1,13% dari sebanyak 135.258 KK menjadi hanya sebanyak 129.339 KK. Jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 5,44% dari hanya sebanyak 33.662 KK menjadi 43.836 KK. Dalam kurun waktu yang sama jumlah keluarga sejahtera II dan III juga jumlahnya meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,67% dari sebanyak 58.640 KK menjadi sebanyak 74.482 KK.

b. Prediksi

Prediksi untuk pelaksanaan program KB dan KS di Kabupaten Boyolali semakin meningkat, terutama persentase peserta KB baru rata-rata per tahun sebesar 0,1%. Peningkatan peserta KB baru dan KB aktif semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga sejahtera. Pada masa mendatang diperkirakan promosi KB akan lebih diintensifkan, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat akan Program

KB semakin tinggi. Banyak sedikitnya anak juga dipandang sebagai hal yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, sehingga masyarakat lebih memilih memiliki sedikit anak.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I diperkirakan semakin menurun. Peningkatan kesejahteraan keluarga ini disebabkan jumlah anggota keluarga semakin kecil, sehingga beban tanggungan kepala keluarga berkurang. Selain itu, peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada masa mendatang semakin luas, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dalam berbagai lapangan usaha.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Boyolali terbagi menjadi sebanyak 267 desa/kelurahan, 874 dusun, 1.414 Rukun Warga (RW), dan 6.406 Rukun Tetangga (RT). Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan masih belum maksimal, demikian pula peningkatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa baik LPMK/LPMD, KPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya belum dapat menjadi pelopor dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan selalu bertumpu pada peran kelembagaan, keseimbangan gender, baik di tingkat kelurahan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan/Perkotaan, dan lab site pemberdayaan partisipatif (P2SP), PNPM PIP, PAMSIMAS, PUAP, Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) maupun di tingkat RT/RW.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan kerentanan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan yang penting bagi peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi.

Potensi peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup semakin baik, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sasaran semakin luas dalam pengambilan keputusan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kesiapan masyarakat, peningkatan kecakapan hidup (life skills) dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan secara berkelanjutan.

b. Prediksi

Sampai dengan tahun 2025 Kabupaten Boyolali masih menghadapi tantangan masalah kemiskinan di pedesaan. Namun diperkirakan jumlah keluarga miskin akan mengalami penurunan setiap tahun rata-rata sebesar 2% sesuai dengan target nasional. Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi tugas seluruh SKPD, kalangan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan partisipasi masyarakat luas. Ketersediaan data kemiskinan yang sudah akurat menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan daerah dapat tepat sasaran. Melalui pemberdayaan masyarakat, kemandirian dan keswadayaan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik individu maupun kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan akan mengalami peningkatan semakin baik, sejalan dengan berkembangnya kelembagaan dan organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada penyusunan rencana, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pelestarian dan keberlanjutannya. Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat ditahun-tahun mendatang, mengingat program-program penanggulangan kemiskinan, kesetaraan dan keadilan gender. Diharapkan peningkatan peran perempuan tersebut akan semakin luas, mencakup semua bidang kehidupan.

9. Urusan Sosial

a. Kondisi Saat Ini

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya persoalan kesenjangan sosial, disintegrasi sosial dan penyakit sosial yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat. Pada tahun 2004 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Boyolali sebanyak 64.540 orang, sedang yang tertangani hanya 34.753 orang (31,12%). Jumlah PMKS mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -11,23%. Sebagian besar PMKS adalah keluarga fakir miskin sebanyak 46.778 orang (72,48%) dan wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 4.313 orang (6,68%).

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali antara lain melalui beberapa panti sosial dan organisasi sosial yang peduli dalam penanggulangan PMKS. Jumlah panti asuhan pada tahun 2004 sebanyak 13 buah dan organisasi sosial sebanyak 20 buah. Keberadaan panti dan organisasi sosial berfungsi menampung dan membina para penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain anak-anak korban NAPZA, anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat tubuh dan lain sebagainya.

Pada permasalahan sosial kemasyarakatan sangat rumit dan saling tumpang tindih antara kemiskinan, kerentanan, cacat, penyakit kronis dan penyakit menular, serta korban NAPZA dan anak-anak terlantar. Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi

penanganan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan serta profesional. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan mengembalikan martabat kemanusiaan menjadi perhatian utama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain dilakukan melalui bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan perlindungan dan fasilitasi penampungan bagi PMKS, dengan harapan kehidupan mereka dapat lebih baik dan bermartabat.

Pada tahun 2004 potensi sumber daya kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali, yakni Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) cukup banyak (1.746 orang). Perkembangan jumlah PSM selama tahun 2002-2004 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,19% pertahun. Selain pekerja sosial masyarakat, di Kabupaten Boyolali juga terdapat potensi sumber daya kesejahteraan sosial yang lain, yaitu jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS). Dalam kurun waktu 2002-2004 terjadi peningkatan jumlah WPKS dari sebanyak 1.864 orang menjadi 3.354 orang. Diharapkan ke depan pekerja sosial yang peduli akan para penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin banyak, sehingga masalah PMKS semakin tertanggulangi.

b. Prediksi

Jumlah PMKS di Kabupaten Boyolali di masa mendatang akan semakin bertambah, jika dibiarkan tanpa adanya jaminan penanganan secara berkesinambungan. Jumlah panti sosial dan santunan penyandang PMKS yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta daya tampungnya terbatas, sehingga tidak mampu menampung semua PMKS. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS melalui swadaya masyarakat.

Jumlah tenaga pekerja sosial masyarakat (PSM) dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM) serta relawan sosial akan mengalami peningkatan. Peningkatan PSM, LPSM dan relawan diharapkan lebih memperhatikan penyakit sosial dalam masyarakat. Jumlah panti sosial dan jumlah organisasi sosial yang eksis dalam penanggulangan PMKS diprediksikan meningkat sampai dengan tahun 2025.

10. Urusan Kebudayaan

a. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Boyolali memiliki kekayaan benda purbakala cukup banyak, terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda purbakala yang bergerak tersebut terdiri dari arca, prasasti, yoni, lingga, alat upacara, alat rumit dan senjata tajam. Sementara itu, benda purbakala tidak bergerak terdiri dari petilasan, petirtaan, candi, monumen, situs, masjid kuno, gereja kuno, bangunan kuno, makam kuno, dan gua. Kekayaan budaya ini merupakan aset daerah yang perlu tetap dilestarikan, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh nilai-nilai budaya atas peninggalan sejarah tersebut. Dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 terjadi peningkatan benda purbakala yang dapat bergerak dari 24 buah menjadi 37 buah.

Jumlah benda purbakala tidak bergerak juga mengalami peningkatan dari sebanyak 32 buah di tahun 1999 menjadi 44 buah di tahun 2004.

Selain benda purbakala, di Kabupaten Boyolali juga memiliki kekayaan budaya daerah berupa kesenian tradisional. Setidaknya terdapat sebanyak 11 jenis kesenian yang berkembang, yaitu tari tradisional, rebana, campursari, keroncong, reog/tari rakyat, kethoprak, rodan, solawatan, karawitan, laras madyo, dan cokekan. Dalam perkembangannya, dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah kelompok kesenian tradisional dari sebanyak 385 kelompok menjadi sebanyak 446 kelompok. Dari sebanyak 11 jenis kesenian yang ada, campursari dan rebana yang paling baik perkembangannya pada tahun 2004, dengan jumlah kelompok berturut-turut sebanyak 120 kelompok dan 83 kelompok.

Seiring dengan perkembangan kesenian yang semakin maju, jenis kesenian daerah di Kabupaten Boyolali juga semakin bervariasi. Setidaknya terdapat sebanyak 7 jenis kesenian modern yang berkembang, diantaranya organ tunggal, group band, orkes melayu, congdut, kulintang, qosidah, dan pedalangan. Dalam kurun waktu tahun 1999 – 2004 jumlah kelompok kesenian modern setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yaitu dari sebanyak 124 kelompok di tahun 1999 menjadi sebanyak 158 kelompok di tahun 2004. Diantara ke jenis kesenian modern tersebut, yang perkembangannya paling banyak diminati adalah group band. Pada tahun 1999 jumlahnya hanya sebanyak 75 kelompok, pada tahun 2004 jumlahnya telah mencapai sebanyak 112 kelompok.

Dalam rangka memperkenalkan keragaman dan kekayaan budaya di Kabupaten Boyolali diselenggarakan pemilihan duta kesenian. Setidaknya minimal satu kali dalam setahun diadakan pengiriman duta kesenian Kabupaten Boyolali untuk mengikuti event di tingkat provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah pengiriman duta wisata, yaitu dari 2 kali pengiriman pada tahun 1999- menjadi 3 kali pada tahun 2004.

b. Prediksi

Pembangunan dibidang kebudayaan kedepan dihadapkan pada meningkatnya efek negatif dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi, kebebasan pers, dan globalisasi dari satu sisi memang memberikan keuntungan dalam pembangunan, namun disisi lain memberikan ruang bagi masuknya kebudayaan asing yang kurang sesuai dengan nilai moral dan kepribadian Bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut diperkirakan akan terjadi pergeseran budaya, serta menipisnya nilai-nilai moral dan agama pada masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pemeliharaan kearifan lokal dalam peradaban, harkat, dan martabat manusia, serta penguatan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Pelestarian kekayaan benda purbakala di Kabupaten Boyolali baik benda bergerak maupun benda tak bergerak diperkirakan akan mengalami peningkatan dari segi kualitas.

Melalui pelestarian aset-aset budaya tersebut masyarakat akan tetap memperoleh nilai-nilai budaya dari peninggalan sejarah tersebut. Sementara itu, kekayaan budaya yang berupa kesenian tradisional diperkirakan akan mengalami penurunan apabila upaya pembinaan dan pelestariannya tidak dilakukan secara berkesinambungan. Perkembangan musik-musik modern yang sangat pesat dewasa ini, dimungkinkan akan mengeliminir kemajuan musik/kesenian tradisional. Dari sebanyak 11 jenis kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Boyolali, diperkirakan hanya Reog/tarian rakyat yang perkembangannya masih dapat diharapkan, sedangkan lainnya akan tertinggal dibandingkan kemajuan kesenian modern, terutama group band. Kesenian tradisional ini dalam perkembangannya lebih banyak disukai oleh kalangan usia tua, sedangkan kesenian modern saat ini telah menjangkau semua kalangan usia, terutama pemuda dan anak-anak.

11. Urusan Keperpustakaan

a. Kondisi Saat Ini

Kondisi perpustakaan di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 2002-2004 menunjukkan kondisi yang tetap, yaitu sebanyak 19 unit, semuanya dalam kondisi aktif. Perpustakaan tersebut terdiri dari perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan perkembangan baik dari jumlah anggota, jumlah peminjam, maupun koleksi buku. Jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali dari tahun 2001 hingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, dari sebanyak 13.236 orang menjadi 13.253 orang. Pada tahun 2004 sebagian besar pengunjung adalah dari kalangan umum yang mencapai 22,85%, dan pengunjung paling sedikit dari kelompok SD yaitu hanya 2,75%. Anggota perpustakaan daerah lebih banyak didominasi oleh PNS (62,97%), selanjutnya kalangan mahasiswa (15,85%), dan kalangan pelajar SMA (12,75%).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan Kabupaten Boyolali salah satunya adalah dengan menambah koleksi buku yang ada. Namun demikian, sampai dengan tahun 2004 terjadi penurunan jumlah buku perpustakaan daerah, dari sebanyak 6.671 buah menjadi 6247 buah. Sebagian besar buku yang ada termasuk dalam kategori ilmu sosial (36,31%), selanjutnya ilmu terapan (9,17%) dan fiksi (3,49%).

Bantuan buku yang diterima perpustakaan sampai dengan tahun 2004 sebanyak 274 buku. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi dan lainnya. Jumlah buku dari pemerintah kabupaten hanya 135 buah, sedangkan dari pemerintah pusat dan provinsi hanya 115 buah. Untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan daerah, selain koleksi buku-buku yang ada juga disediakan majalah dan surat kabar yang berlanggan bulanan. Jumlah majalah yang berlanggan sebanyak 4 jenis majalah, sedangkan surat kabar sebanyak 5 jenis yang berbeda setiap harinya.

b. Prediksi

Kondisi perpustakaan di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan semakin membaik seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengembangan perpustakaan masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, ketersediaan buku-buku literatur perpustakaan, serta kualitas dan kuantitas pustakawan yang belum memadai. Kedepan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Boyolali perlu diarahkan pada pengembangan perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah di seluruh kecamatan dan desa, tidak hanya terpusat pada perpustakaan daerah. Dengan demikian, perpustakaan dapat diakses secara luas oleh semua kalangan masyarakat.

Khusus di perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali, jumlah koleksi perpustakaan diperkirakan akan semakin bertambah dan bervariasi. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan, fasilitas perpustakaan diperkirakan akan semakin meningkat, dilengkapi dengan sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat akan semakin mudah mencari literatur dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan.

Kedepan, pembangunan perpustakaan harus lebih profesional dan lebih modern, hal ini di karenakan ke depan minat baca masyarakat akan mengalami peningkatan. Tuntutan era globalisasi membuat masyarakat harus mencari informasi sendiri sehingga tidak ketinggalan perkembangan. Selain itu tuntutan masyarakat modern adalah memerlukan informasi yang lebih cepat dan akurat. Perpustakaan digital dan perpustakaan online menjadi sarana untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Penambahan koleksi dan jumlah buku yang lebih variatif akan meningkatkan pengunjung dari segala lapisan masyarakat.

12. Urusan Ketransmigrasian

a. Kondisi Saat Ini

Kondisi perekonomian di Kabupaten Boyolali kurang menguntungkan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang berkaitan dengan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masih sempitnya lapangan kerja mendorong sebagian masyarakat di Kabupaten Boyolali untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik melalui transmigrasi. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke berbagai daerah di luar pulau Jawa dalam kurun tahun 1999 hingga tahun 2004 mengalami pasang surut, namun cenderung mengalami peningkatan, dari sebanyak 122 orang (46 KK) menjadi 238 orang (65 KK). Transmigran sebagian besar termasuk jenis transmigrasi umum, sebagian kecil lainnya tergolong dalam transmigrasi swakarsa mandiri dan transmigrasi swakarsa berbantuan ternak.

Transmigran di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 1999-2004 telah diberangkatkan ke sebanyak 6 provinsi, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau,

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung dan Jambi. Dari keenam provinsi tersebut, daerah yang paling diminati oleh para transmigran adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2002, transmigran dari Kabupaten Boyolali sebagian besar diberangkatkan ke Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Upaya meningkatkan jumlah transmigran selama ini Pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kebijakan pembangunan wilayah pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT) di daerah tujuan. Melalui kerjasama dan koordinasi antar daerah tersebut diharapkan penetapan lokasi yang dijadikan pemukiman transmigran sesuai dengan harapan dan kebutuhan calon transmigran. Selain itu, diperoleh pula jaminan legalitas atas hak kepemilikan tanah dan terpenuhinya hak transmigran untuk mendapatkan fasilitas.

Selain kerjasama antar daerah dengan provinsi tujuan, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan pelatihan bagi calon transmigran agar pada saat telah menjadi transmigran dapat bertahan dan berkembang di wilayah yang ditempatinya. Pelaksanaan pelatihan bagi calon transmigran telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan jumlah peserta bervariasi, yaitu sebanyak 50 orang di tahun 2003 dan sejumlah 65 orang di tahun 2004.

b. Prediksi

Jumlah transmigran asal Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah pemberangkatan transmigran cenderung stagnan disebabkan mekanisme penyelenggaraan transmigrasi yang tidak mudah. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, daerah diharuskan mengadakan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang menjadi tujuan transmigrasi dengan melibatkan masyarakat setempat. Apabila kerjasama antar daerah ini tidak berjalan secara optimal tentunya berdampak pada tertundanya pemberangkatan calon transmigran. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk terus memperluas kerjasama dengan provinsi lain di luar Jawa dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Hal lain yang menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah transmigran ke daerah tujuan adalah daerah tujuan transmigrasi belum memenuhi aspek 4L dan 2C (layak huni, layak lingkungan, layak berkembang dan layak usaha, clear and clean). Akibat dari hal tersebut banyak para transmigran yang kemudian kembali ke daerah asal. Faktor lain yang mempengaruhi minat dan keseriusan transmigran adalah rendahnya motivasi, kemampuan dan pengetahuan para transmigran sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu mengelola lahan yang ada, disamping itu banyaknya transmigran yang hanya mau di tempatkan di daerah transmigrasi tertentu saja seperti di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini

yang kemudian menyebabkan banyak dari penduduk di Kabupaten Boyolali yang berkeinginan untuk bertransmigrasi rendah.

2.4 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Ekonomi

1. Urusan Penanaman Modal

a. Kondisi Saat Ini

Kinerja dan prospek investasi di Kabupaten Boyolali cukup baik. Jumlah nilai investasi PMDM cenderung menurun, dari Rp 520.300.000,00 pada tahun 2002 menjadi hanya sebesar Rp 406.500.000,00 pada tahun 2004 (menurun sebesar 21,87%). Walaupun demikian, penyerapan tenaga kerja menunjukkan peningkatan dari sebanyak 1.343 orang menjadi 6.715 orang. Sementara itu nilai investasi PMA tetap, yaitu sebesar US \$ 14.052.000 dalam jangka waktu 2002-2004.

Jumlah proyek dan nilai investasi yang tetap tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerja pun relatif tetap, yaitu sekitar 3.000 orang untuk PMA (0,5% diantaranya tenaga kerja asing), dan sekitar 6.000 orang tenaga kerja untuk PMDN. Jenis investasi dengan nilai proyek dan jumlah tenaga terbanyak adalah investasi pada bidang industri tekstil dan produk tekstil.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten.

Dalam hal perijinan investasi, di kabupaten Boyolali telah beroperasi sistem Pelayanan Peijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Adapun bentuk instansi untuk PPTSP sampai dengan saat ini masih dalam bentuk kantor dengan nama Kantor Perijinan dan Penanaman Modal, yang didirikan dengan dasar SK Bupati Nomor 061.1/870 Tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan satuan kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Boyolali, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali. Untuk menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam proses perijinan investasi, PPSTP mensosialisasikan waktu serta biaya untuk setiap ijin yang diterbitkan.

Meskipun promosi investasi dilakukan secara agresif, investasi tidak akan masuk jika tidak terdapat faktor-faktor pendukung. Beberapa hal yang dinilai mendukung investas di di Kabupaten Boyolali antara lain adanya potensi atau klaster pendukung (supporting industries) ketersediaan pusat perdagangan serta ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Faktor

pendukung yang lain adalah kondisi sosial politik serta keamanan yang baik serta keterbukaan masyarakat dalam menerima investasi, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, pangsa pasar luas dan relatif dekat dengan bandara.

b. Prediksi

Perkembangan penanaman modal dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh jenis potensi ekonomi daerah. Dalam hal pelayanan perijinan investasi, kedepan yang ditangani oleh dinas teknis akan dijadikan satu (terpadu) pada Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali. Tingkat persaingan dalam menarik investor juga semakin ketat. Fluktuasi nilai penanaman modal akan terjadi pada saat telah ada investor yang merealisasikan investasinya untuk potensi investasi yang saat ini ditawarkan, yakni benteng, beberapa wisata air, dan beberapa lahan untuk pabrik (garmen, otomotif, elektronik, dsb). Jika pengertian penanaman modal tidak dibatasi pada investasi yang nilainya besar, pada masa yang akan datang akan terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan sebagai akibat dari kemudahan perijinan dan iklim investasi yang semakin kondusif. Diharapkan ke depan untuk mencari perijinan persyaratannya akan semakin ringkas, prosedurnya mudah (tidak berbelit-belit) guna mendukung pertumbuhan Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali.

2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Kondisi Saat Ini

Jumlah koperasi di Kabupaten Boyolali cenderung meningkat dalam kurun waktu 1999-2004. Pada tahun 1999 jumlah koperasi sebanyak 360 buah, selanjutnya terus meningkat menjadi 858 buah di tahun 2004. Koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Boyolali relatif besar, yakni mencapai rata-rata 22,41%. Secara khusus, koperasi simpan pinjam juga cukup berkembang yaitu sebanyak 119 unit pada tahun 1999 menjadi 161 unit pada tahun 2004. Kondisi koperasi dilihat dari kesehatannya belum cukup tergambarkan, karena sebagian besar dari koperasi tersebut belum dinilai kondisi kesehatannya. Namun demikian, jika dianggap bahwa koperasi yang pernah dinilai sebagai sampel, maka dapat dikatakan kecenderungan kesehatan dari seluruh koperasi yang ada adalah cukup baik atau cukup sehat.

Seperti telah diketahui, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi Koperasi dan UKM di Kabupaten Boyolali dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun jumlah unit usahanya. Jumlah UKM pada tahun 1999 sebanyak 5392 buah, selanjutnya mengalami peningkatan sampai tahun 2004 menjadi 9.981 buah. Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada sektor UKM dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 12.792 orang menjadi 40.274 orang. Nilai produksi juga menunjukkan peningkatan, dari sebanyak Rp 196.886.390.000,00 menjadi Rp 440.917.010.000,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UKM adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti kurang terampilannya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar, sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas koperasi dan UKM. Demikian pula terbatasnya akses pembiayaan yang masih dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah, terutama terhadap akses kredit investasi; dan kerja sama antara UKM, IKM, BUMD, dan pengusaha besar. Oleh karena itu, peran pemerintah terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut mengacu pada kondisi bahwa bantuan dana kepada koperasi yang berasal dari APBD relatif masih rendah.

b. Prediksi

Perkembangan koperasi dan UKM pada masa yang akan datang semakin meningkat seiring dengan perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peran koperasi dan UKM terhadap perekonomian khususnya penyerapan tenaga kerja cenderung sama dengan saat ini. Kondisi demikian disebabkan karena perannya saat ini sudah cukup besar. Dalam hal nilai produksi, trennya akan meningkat seiring dengan semakin mudahnya akses usaha kecil menengah terhadap pembiayaan permodalan usaha, semakin meningkatnya penguasaan teknologi dan manajemen usaha, dan meningkatnya keterampilan SDM.

3. Urusan Ketahanan Pangan

a. Kondisi Saat Ini

Ketersediaan produk-produk pertanian sebagai bahan pangan dapat diperoleh dari konversi volume produksi pertanian menggunakan satuan-satuan standar konversi Departemen Pertanian. Produk-produk pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Boyolali, berkisar antara 70–80%, kecuali beras yaitu sebesar 50–55%. Artinya, sebagian besar (antara 70–80%) produk-produk pertanian dikonsumsi oleh masyarakat Boyolali sendiri, kecuali beras yang hanya 50–55% dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya dipasarkan ke kabupaten lain.

Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Boyolali untuk jenis beras, jagung, kacang tanah dalam kurun waktu 1999-2004 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 128.580 ton menjadi 120.123 ton (beras), dari 77.067 ton menjadi 85.806 ton (jagung), dan dari 3.086 ton menjadi 7.515 (kacang tanah). Adapun untuk jenis kedelai, ubi kayu, ubi jalar, telur, susu, dan daging sapi dalam kurun waktu yang sama cenderung mengalami penurunan dari 3.251 ton menjadi 3.020 ton (kedelai), dari 171.858 ton menjadi 93.503 ton (ubi kayu), dari 2.897 ton menjadi 496 ton (ubi jalar), dari 3.248 ton menjadi 496 ton (telur), dari 26.462 ton menjadi 16.797 ton (susu), dan dari 4.230 ton menjadi 4.141 ton (daging sapi).

Dalam kurun waktu 1999-2004 terjadi penurunan kebutuhan konsumsi pangan jenis beras, yaitu dari 122.139 ton menjadi 85.305 ton. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada

jenis jagung, kedelai, kacang tanah, dan telur, yaitu menurun dari 15.162 ton menjadi 13.775 (jagung), dari 9.734 ton menjadi 6.596 ton (kedelai), dari 3.086 ton menjadi 3.155 ton (kacang tanah), dan dari 3.710 ton menjadi 3.193 ton (telur). Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama kebutuhan konsumsi beberapa jenis bahan pangan ada yang memiliki kecenderungan meningkat, antara lain ubi kayu (dari 1.010 ton menjadi 1.033 ton), ubi jalar (dari 51.702 ton menjadi 52.871 ton), daging sapi (dari 5.877 ton menjadi 5.663 ton), dan susu (dari 2.929 ton menjadi 2.996 ton).

Kebutuhan konsumsi bahan pangan apabila dikorespondensikan kembali dengan data ketersediaan bahan makanan, akan diperoleh angka kelebihan atau kekurangan masing-masing bahan makanan. Dari analisis ini maka didapatkan bahwa Kabupaten Boyolali mengalami surplus bahan pangan beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan susu, namun terjadi kekurangan pada produk-produk pangan kedelai, ubi jalar, daging sapi dan telur. Surplus beras, jagung dan kacang tanah dalam kurun waktu tahun 1999-2004 terjadi peningkatan, dari 6.441 ton menjadi 34.818 ton pada beras, dari 61.905 ton menjadi 72.031 ton pada jagung, dan dari 2.177 ton menjadi 4.360 ton pada kacang tanah. Dalam kurun waktu yang sama terjadi penurunan surplus ubi kayu dan susu, yaitu dari 170.848 ton menjadi 124.563 ton, dan dari 23.533 liter menjadi 21.385 liter pada susu. Tingkat defisit ubi jalar mengalami peningkatan dari -48.805 ton pada tahun 1999 menjadi -51.579 ton pada tahun 2004. Sementara itu, tingkat defisit kedelai, daging sapi dan telur menunjukkan penurunan, yaitu dari -6.484 ton menjadi -3.797 ton (kedelai), dari -1.648 ton menjadi -1.522 ton (daging sapi), dan dari -462 ton menjadi -225 ton (telur).

b. Prediksi

Hingga tahun 2025 kebutuhan pangan dari bahan tanaman padi dan palawija, terutama jagung dan kedelai akan terus meningkat. Dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah, maka kebutuhan akan beras per kapita diperkirakan akan terus meningkat. Walaupun demikian, ketersediaan beras diperkirakan akan tetap surplus. Surplus juga terjadi pada jagung dan ubi kayu, karena pada masa mendatang konsumsi keduanya diperkirakan rendah.

Berbeda dengan produk-produk pertanian lain yang dapat membentuk "budaya pangan" secara komunal, tingkat konsumsi susu diperkirakan hanya akan berkembang bila tersedia jaringan pasar yang dapat sampai pada dua sisi, yaitu peternak dan konsumen. Hal ini mengingat susu memiliki karakteristik unik dalam budaya pangan masyarakat Indonesia. Tingkat produksi susu sapi diprediksi akan terus meningkat. Peningkatan akan lebih tinggi jika dilakukan kampanye minum susu segar dalam masyarakat. Intervensi tersebut akan menempatkan susu sebagai bagian dari budaya pangan pokok dalam kelompok strategis dalam masyarakat, misalnya : anak sekolah dasar dan menengah, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat menengah atas yang lebih menghargai gaya hidup kembali ke alam (back to nature).

Tingkat konsumsi telur, baik telur ayam buras dan telur itik, maupun telur puyuh hingga tahun 2025 diprediksi terus meningkat, sehingga diperlukan peningkatan produksi. Perkembangan selama tahun 1999-2004, penyediaan telur terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa telur telah menjadi bagian dalam budaya pangan masyarakat. Dengan semakin membaiknya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, maka kedepan diperkirakan kebutuhan konsumsi daging terutama daging sapi di Kabupaten Boyolali semakin meningkat, sehingga diperlukan pengembangan peternakan sapi. Dengan demikian maka ketergantungan daging sapi dari daerah maupun impor semakin berkurang.

4. Urusan Perikanan

a. Kondisi Saat Ini

Potensi perikanan Kabupaten Boyolali terutama perikanan darat yaitu budidaya (kolam) dan perairan umum. Di perairan umum, potensi perikanan tersebar di sungai dan waduk dengan produksi yang stabil. Produksi perikanan sungai menunjukkan peningkatan dari sebanyak 300.000 ton pada tahun 1999 menjadi 161.975 ton di tahun 2004. Produksi perikanan waduk dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan dari sebanyak 1.150.000 ton pada tahun 1999 menjadi 430.130 ton pada tahun 2004.

Perikanan budidaya, baik di kolam, Usaha Perikanan Rakyat (UPR), Keramba, maupun budidaya di perairan umum, produksinya terus meningkat, dengan laju peningkatan antara 5–10%. Produksi perikanan UPR meningkat dari 1.914.579 ekor di tahun 2002 menjadi 2.229.665 ekor di tahun 2003. Produksi perikanan karamba cenderung meningkat dari 192 ton di tahun 1999 menjadi 386 ton di tahun 2003. Produksi perikanan budidaya di perairan umum juga meningkat dari 450 ton di tahun 1999 menjadi 595 ton di tahun 2004. Sementara itu produksi benih ikan di BBI cenderung mengalami peningkatan dari sebanyak 4.188.000 ekor di tahun 1999 menjadi 15.012.000 ekor di tahun 2004.

Stabilnya produksi ikan di perairan umum dan peningkatan produksi di perairan budidaya ini mengindikasikan bahwa pengusahaan perikanan di perairan umum dilakukan oleh masyarakat oleh segmen sosial yang sama, sementara pembudidayaan ikan oleh masyarakat di kelima perairan tersebut semakin intensif.

b. Prediksi

Perikanan di Kabupaten Boyolali kedepan diperkirakan yang potensial untuk terus dikembangkan adalah budidaya perikanan air tawar, baik di kolam, karamba maupun di perairan umum. Usaha perikanan yang dikelola oleh masyarakat (UPR) memiliki prospek yang cukup menjanjikan apabila dikembangkan dengan baik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi bagi kesehatan manusia, permintaan akan ikan dan benih ikan diperkirakan akan semakin meningkat. Namun demikian selama ini penyediaan benih ikan masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini merupakan peluang bagi masyarakat maupun dunia usaha

untuk dapat mengembangkan sektor perikanan, sehingga dapat memenuhi permintaan yang diperkirakan akan semakin besar.

Peningkatan produksi perikanan budidaya perikanan diperkirakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses permodalan, manajemen usaha dan penggunaan teknologi tepat guna, serta ketersediaan sarana dan prasarana perikanan. Dalam hal peningkatan produktivitas hasil perikanan, diperkirakan akan berkembang pemanfaatan teknologi dalam produksi maupun pengolahan hasil perikanan sehingga dapat menjadi produk khas daerah.

Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap di perairan umum sampai tahun 2025 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan dapat dimungkinkan mengalami penurunan jika terjadi perubahan kualitas lingkungan. Perikanan tangkap di perairan umum ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti pencemaran air dan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, sedimentasi dan penurunan debit air yang terjadi pada sungai dan waduk. Dengan demikian, produksi hasil perikanan di perairan umum ini diperkirakan akan berfluktuasi bergantung pada daya dukung lingkungan dan tingkat eksploitasi yang dilakukan oleh manusia.

5. Urusan Pertanian

a. Kondisi Saat Ini

Produksi padi di Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 1999-2004 menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebanyak 243.945 ton menjadi 227.901 ton dengan rata-rata pertumbuhan berkisar antara -3,95%. Dari sejumlah ini, sebanyak 93,21% merupakan padi sawah, dan sisanya padi lahan kering. Jumlah produksi padi di Kabupaten Boyolali ini terkesan sangat ditentukan oleh luas panen, karena ketika produksi tertinggi pada tahun 2000 sebanyak 244.165 ton, saat itu pula luas panen juga yang paling besar, yaitu 47.858 ha. Demikian pula, produksi terendah pada tahun 2003 sebanyak 207.312 ton, juga disebabkan oleh luas panen paling sempit yaitu 37.194 ha.

Sekalipun besaran produksi lebih banyak ditentukan oleh luas panen, analisis data menunjukkan laju perubahan produksinya terkesan lebih kuat ditentukan oleh produktivitas padi. Kondisi ini terlihat dari penurunan luas panen yang relatif besar pada tahun 2000–2003, namun berdampak pada perubahan produksi yang besar, karena perkembangan produktivitas tanaman padi. Namun perubahan produktivitas lahan terkesan masih labil yang disebabkan belum mantapnya peningkatan produksi di tingkat petani.

Komoditas jagung, sekalipun luas panennya bersifat fluktuatif, namun produksinya terus menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 1999-2004. Kondisi sebaliknya terjadi pada tanaman ubi kayu dan ubi jalar yang produksinya terus menurun, karena luas panen dan produktivitasnya cenderung menurun. Pada tanaman ubi kayu, menurunnya produksi terutama disebabkan oleh luas panennya yang terus menurun. Penurunan luas panen ini diperparah dengan tingkat produktivitasnya yang semakin rendah. Pada tanaman ubi jalar, peningkatan produktivitas yang tinggi terkesan belum dapat mengangkat produksi, karena

tingginya penurunan luas panen dari 237 ha pada tahun 1999 menjadi hanya 107 ha pada tahun 2004.

Seperti halnya perkembangan produksi jagung, perkembangan produksi kacang-kacangan di Kabupaten Boyolali selama tahun 1999-2004 juga cukup menggembirakan. Luas panen dan produktivitasnya meningkat, sehingga jumlah produksi meningkat dari sebanyak 5.847 ton menjadi 8.350 ton. Pada kurun waktu yang sama produksi tanaman kacang kedelai mengalami penurunan dari sebanyak 3.612 ton menjadi 3.111 ton, walaupun produktivitasnya sedikit meningkat, dari 10,46 kuintal/ha menjadi 11,02 kuintal per ha.

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu sentra produksi sayur-sayuran, terutama adalah cabe, wortel, kobis dan bawang merah. Besarnya produksi tahun 2004, kelima jenis sayuran ini pengusahaannya diatas 500 ha per tahun. Sementara itu, bawang putih, kentang, terung, mentimun dan labu siam termasuk jenis-jenis sayuran yang tidak banyak diminati petani, sehingga penanamannya di bawah 100 ha per tahun. Tanaman bawang putih bahkan tidak diusahakan lagi pada tahun 2004. Secara umum pada kurun waktu tahun 1999-2004, luas panen tanaman sayuran mengalami penurunan dari total luas 8.834 ha menjadi hanya 7.015 ha. Jenis-jenis tanaman yang luas panennya meningkat hanya tanaman wortel, kobis, dan tomat. Produktivitas tanaman-tanaman sayuran secara umum cukup menggembirakan. Jenis-jenis sayuran bawang merah, kentang, bawang daun, kentang, wortel, sawi, tomat, terong, buncis, mentimun, labu siam, kangkung dan bayam produktivitasnya cenderung meningkat. Jenis-jenis sayuran yang produktivitasnya cenderung menurun hanyalah ditemukan bawang putih, kobis dan cabe.

Dengan perubahan-perubahan luas panen dan produktivias tersebut, maka jenis-jenis sayuran yang produksinya meningkat adalah bawang daun, wortel, kobis, sawi, terung, tomat, mentimun, labu siam dan kangkung dengan laju peningkatan rata-rata diatas 15% per tahun. Sementara itu, tanaman bawang merah, bawang putih, kentang, cabe, buncis dan bayam produksinya cenderung menurun. Jenis-jenis sayuran andalan di Kabupaten Boyolali adalah wortel dan kubis, dengan produksi berturut-turut sebesar 00.426 ton dan 135.436 ton. Kabupaten Boyolali juga merupakan penghasil utama bawang merah dengan produksi sebesar 30,202 ton, bawang daun sebanyak 35.373 ton dan sawi sebanyak 39.648 ton.

Produk utama buahan-buahan di Kabupaten Boyolali adalah pepaya, mangga dan pisang, yang produksinya masing-masing lebih dari 100 ton per tahun. Namun demikian, selama tahun 1999-2004 perkembangan produksinya menunjukkan penurunan, kecuali mangga. Produksi buah-buahan lain seperti alpukat, rambutan, durian dan nangka juga cukup besar, dengan produksi antara 10.000 – 40.000 ton per tahun. Namun dalam kurun waktu tahun 1999-2004, perkembangan produksi keempat jenis buah-buahan tersebut menurun. Demikian pula dengan manggis, jeruk keprok, jeruk besar nanas dan sawo, sedangkan untuk jenis duku, jeruk siam, jambu biji dan jambu air produksinya meningkat walaupun kecil.

Sebagai salah satu kabupaten penghasil tembakau utama di Jawa Tengah dan sebagai salah satu "center of origin" lima tembakau khas Jawa Tengah (SK Gubernur Jawa Tengah

No. 525.2/96/1993 tentang Klasifikasi Tembakau di Jawa Tengah), luas panen tembakau Kabupaten Boyolali cukup besar yaitu 2.470 ha pada tahun 2004. Namun, seperti halnya wilayah lain penghasil tembakau, produksinya menurun secara signifikan, terutama sejak terjadi pembatasan nikotin dan TAR dalam rokok tahun 2001. Akibat isu tersebut luas panen tembakau cenderung menurun dari 3.777 ha (2001), menjadi antara 2.470 ha (2004). Komoditas perkebunan kedua setelah tembakau adalah kelapa, namun dalam kurun waktu tahun 1999-2004 luas panennya terus menurun dari sebesar 8.734 ha menjadi hanya 4.393 ha. Potensi terbesar ketiga adalah tanaman-tanaman kencur dengan luas tanam meningkat dari 510 ha pada tahun 1999 menjadi 645 ha pada tahun 2004. Adapun luas panen cengkeh, teh, kopi robusta, kopi arabika, jambu mete dan kenanga terus menurun.

Dalam kurun waktu 1999-2004 produktivitas tembakau cenderung meningkat dari 712 kw/ha menjadi 4.033 kw/ha. Produktivitas tanaman kelapa juga mengalami peningkatan 1.586 butir/ha menjadi 3.672 butir/ha. Produktivitas tanaman kencur juga meningkat dari sebanyak 6.000 kg/ha menjadi 9.528 kg/ha. Produktivitas tanaman jahe, kopi robusta dan jambu mete juga mengalami peningkatan, sedangkan produktivitas tanaman cengkeh, teh, dan kenanga menunjukkan penurunan.

Dari perkembangan luas panen dan produktivitas tersebut, produksi kelapa di Kabupaten Boyolali pada kurun waktu tahun 1999-2004 menunjukkan peningkatan dari 13.855.000 butir menjadi 16.133.000 butir. Hal yang sama juga terjadi pada tembakau (dari 1.442 ton menjadi 9.961 ton); kencur (dari sebanyak 3.060 ton menjadi 6.149 ton), jahe (dari 1.809 ton menjadi 4.267 ton), cengkeh (dari 155 ton menjadi 1.066 ton), kopi robusta (dari 18 ton menjadi 91 ton), dan jambu mete (dari 23 ton menjadi 69 ton), dan kenanga (dari 250 kg menjadi 4.180 kg). Komoditas perkebunan yang mengalami penurunan produksi yaitu teh dengan jumlah produksi tahun 2004 hanya 15 ton.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2004, minat masyarakat tani Kabupaten Boyolali untuk mengikuti program TRI terus menurun, dari 1500 petani di tahun 2000 menjadi hanya 453 petani pada tahun 2004. Akibatnya, luas panennya pun menurun dari 713 ha pada tahun 2000 menjadi 419 ha di tahun 2004. Sebagai konsekuensinya, maka produksi tebu di Kabupaten Boyolali juga ikut menurun, yaitu dari 2.319 ton pada tahun 2003 menjadi 1.731 ton pada tahun 2004.

Potensi peternakan Kabupaten Boyolali sangat besar, tidak hanya sapi perah yang menjadi "andalan", tetapi juga sapi potong dan ternak lainnya. Populasi sapi perah sendiri sebanyak sekitar 60 ribu ekor, sedang potensi sapi potong lebih banyak yaitu sebesar 85.000 – 90.000 ekor. Populasi kedua jenis sapi tersebut relatif stabil selama kurun waktu 1999-2004, yang mengindikasikan kedua jenis sapi tersebut telah mencapai keseimbangan sosial, ekonomi, dan potensi perwilayahan. Populasi kerbau, kuda, kambing dan kelinci menurun dengan rata-rata penurunan 1– 8% per tahun. Sementara itu populasi ternak babi menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,81%.

Disamping ternak ruminansia dan monogastrik, Kabupaten Boyolali juga memiliki potensi besar ternak unggas. Populasi unggas terbesar pada tahun 2004 adalah ayam bukan ras (1.094 ribu ekor), burung puyuh (1.065 ribu ekor), ayam pedaging (909.000 ekor), dan terakhir itik (122 ribu ekor). Seperti ditemukan di kabupaten-kabupaten sentra itik yang lain, usaha peternakan itik ini sempat menurun pada akhir tahun 2000, yaitu dari 259 ribu ekor menjadi hanya 100 ribu ekor. Namun segera meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Ternak puyuh secara keseluruhan juga meningkat dari 475 ribu ekor pada tahun 1999 menjadi 1.065 ribu ekor pada tahun 2004.

Kabupaten Boyolali masih menjadi sentra produksi susu, dengan volume produksi sekitar 30 juta liter per tahun. Namun demikian produksi susu menunjukkan penurunan dari sebanyak 31,39 juta liter pada tahun 1999 menjadi 28,92 juta liter. Potensi besar berikutnya adalah telur puyuh dengan volume produksi mencapai 163,95 juta butir pada tahun 2004. Selama kurun waktu tahun 1999-2004 volume produksi telur puyuh terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga terjadi untuk produksi telur ayam ras petelur (dari 5,86 juta butir menjadi 32,41 juta butir), telur ayam buras (49,54 juta butir menjadi 15,77 juta butir), dan telur itik (dari 13,80 juta butir menjadi 15,77 juta butir). Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha peternakan unggas penghasil telur di Kabupaten Boyolali, sedang menuju keseimbangan antara volume produksi dan ekonomi, beserta aspek-aspek teknis lainnya.

Produksi daging, baik daging sapi maupun daging kambing/domba lebih kurang stabil selama kurun waktu 1999-2004, karena populasi kedua jenis ternak tersebut juga stabil. Demikian pula dengan produk-produk dari hasil pemotongan ketiga jenis ternak tersebut, terutama kulit.

b. Prediksi

Pertanian di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan hasil yang meningkat. Namun permasalahan semakin menyempitnya lahan pertanian yang disebabkan pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri, menjadikan rata-rata luas panen mengalami penurunan. Terbatasnya infrastruktur pertanian, semakin berkurangnya pasokan air untuk pertanian akibat memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai, dan masih rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, petani juga masih menghadapi kendala terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan agribisnis pertanian. Dalam peningkatan nilai jual hasil-hasil pertanian diperkirakan masih menghadapi kendala terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan yang berdaya jual tinggi.

Jumlah produksi padi (padi sawah dan padi lahan kering) diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,42% per tahun. Produksi tanaman palawija juga diperkirakan akan meningkat, khususnya jagung (rata-rata 0,67% per tahun), kacang tanah (rata-rata 1,76% per tahun), kacang kedelai 0,27%. Sementara itu produksi ubi jalar dan ubi kayu diperkirakan mengalami penurunan.

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 diprediksikan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan antara 0,20% - 2,80%. Kabis menjadi komoditas utama Kabupaten Boyolali. Jumlah produksi wortel juga diperkirakan tetap tinggi dan meningkat. Jenis sayuran bawang daun dan sawi juga produksinya diprediksikan cukup tinggi. Sementara itu untuk jenis sayuran lainnya seperti bawang merah, kentang, cabe, tomat, terong, buncis, mentimun, labu siam, kangkung dan bayam, dan bawang putih jumlah produksinya relatif sedikit.

Jenis buah yang jumlah produksinya paling banyak di Kabupaten Boyolali adalah mangga, pepaya dan pisang. Diprediksikan produksi buah mangga meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 1,68% per tahun. Produksi pepaya juga diprediksikan meningkat dengan rata-rata per tahun sebesar 0,70% per tahun. Sementara itu, produksi buah pisang mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -2,5% per tahun. Produksi buah duku, jambu biji, sawo dan nangka juga mengalami penurunan. Adapun jenis buah lainnya, seperti alpukat, manggis, rambutan, jeruk siam, jeruk besar, nanas, durian, dan jambu air diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan rata-rata antara 0,70% hingga 6,59%.

Produksi tanaman perkebunan hingga tahun 2025 secara umum diperkirakan akan mengalami peningkatan, kecuali teh. Jumlah produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Boyolali yang paling besar adalah kelapa, kencur dan tembakau. Tembakau masih diminati petani di Kabupaten Boyolali, karena memberikan keuntungan yang cukup besar apabila cuaca dan harganya sedang tinggi.

Produksi peternakan Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan, namun karena laju pemotongan ternak yang tinggi dan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ternak yang ada, maka Kabupaten Boyolali setiap hari diperkirakan masih mendatangkan ternak potong dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Pada tahun-tahun mendatang peredaran produk pertanian yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kaidah agama, seperti sapi glonggongan, daging bangkai, dan pencampuran daging dengan bahan lain diperkirakan masih ada, sehingga perlu diwaspadai dan dipantau peredarannya agar tidak merugikan peternak. Perkembangan penyakit-penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular tidak hanya dari hewan ke hewan lainnya tetapi juga dari hewan ke manusia) pada tahun-tahun mendatang juga dapat mengancam kesehatan, baik hewan maupun manusia yang perlu diwaspadai.

6. Urusan Pariwisata

a. Kondisi Saat Ini

Kebijakan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang sejalan dengan perkembangan jalur wisata Solo-Selo dan Borobudur (SSB) di Kabupaten Boyolali, dengan berpedoman Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Boyolali, standar pengelolaan dan pengembangan destinasi. Upaya pemasaran pariwisata baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dapat dikatakan

rutin dilakukan setiap tahun, termasuk dalam pengembangan sistem informasi pariwisata di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2001 telah dilaksanakan promosi pariwisata tingkat provinsi. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2004 promosi pariwisata juga dilakukan lebih luas lagi, mencakup tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional.

Pengenalan potensi pariwisata kepada masyarakat luas juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam berbagai event pameran pariwisata. Pada tahun 2003 Kabupaten Boyolali mengikuti pariwisata tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2004 pameran pariwisata yang diikuti meliputi hanya tingkat provinsi dan tingkat internasional. Untuk mempermudah akses masyarakat tentang informasi kepariwisataan di Kabupaten Boyolali juga telah didirikan pusat informasi pariwisata. Melalui promosi dan pameran pariwisata serta keberadaan pusat informasi pariwisata tersebut diharapkan masyarakat di luar Kabupaten Boyolali lebih mengenal berbagai obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Obyek wisata yang berkembang antara lain obyek wisata Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Waduk Cengklik, Gunung Tugel, Arga Merapi Merbabu, dan OW R. Ng Yosodipuro. Dari ke obyek wisata tersebut, obyek wisata yang paling diminati wisatawan adalah Umbul Tlatar. Pada tahun 1999 jumlah pengunjung di obyek wisata tersebut hanya sebanyak 49.129 orang, dan pada tahun 2004 jumlahnya mencapai 148.840 orang. Obyek wisata favorit kedua bagi wisatawan adalah umbul pengging dengan jumlah wisatawan sebanyak 19.368 orang pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 telah mencapai 62.573 orang.

Evaluasi kinerja bidang pariwisata dapat diukur dari banyaknya obyek wisata yang sudah dikembangkan dan meningkatnya jumlah pengunjung di masing-masing obyek wisata. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Boyolali belum optimal. Peningkatan pariwisata telah memberikan keuntungan bagi pelaku usaha wisata, antara lain tenaga pengelola, pedagang dan jasa pariwisata. Sampai dengan tahun 2004 di obyek wisata umbul pengging hanya terdapat sebanyak 9 tenaga pengelola, 9 pedagang dan 1 jasa pariwisata. Di obyek wisata Umbul Tlatar jumlah pedagang yang ada sebanyak 25 orang, sedangkan tenaga pengelola sebanyak 11 orang. Pada obyek wisata Waduk Cengklik jumlah tenaga pengelola obyek 4 orang, dan jumlah pedagang mencapai 18 orang. Sementara itu jumlah tenaga kerja di Obyek Wisata Arga Merapi Merbabu sebanyak 12 orang, di obyek wisata R. Ng Yosodipuro 4 orang, dan di obyek wisata Gunung Tugel dan Pantaran semakin ditingkatkan.

Perkembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti bagi perkembangan aktifitas perhotelan. Meskipun terdapat penambahan jumlah hotel kelas melati, namun bila di tinjau dari penginapnya hanya mengalami sedikit penambahan. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 jumlah hotel melati di Kabupaten Boyolali meningkat sebanyak 2 unit dari 4 unit menjadi 6 unit. Sementara itu, hotel berbintang terdapat 1 unit. Jumlah wisatawan yang penginap di hotel melati sejak tahun 2002 hingga tahun 2004 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 14.232 orang (2002) menjadi 23.811 orang (2004).

Jumlah penginap di hotel bintang 1 juga mengalami peningkatan, dari 4.987 orang di tahun 2002 menjadi 5.419 orang di tahun 2004.

b. Prediksi

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 diperkirakan meningkat cukup baik. Pengembangan pariwisata lebih ditekankan pada pengembangan obyek wisata dan promosi serta pemasaran obyek wisata yang dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah (Subosukowanastraten atau Solo Raya). Pengembangan obyek wisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama tinggal wisatawan dan tingkat pengeluaran wisatawan. Pasar utama pariwisata di Kabupaten Boyolali adalah wisatawan domestik dari Kabupaten Boyolali dan daerah sekitarnya.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan terus meningkat. Pengunjung obyek wisata akan didominasi wisatawan nusantara yang menjadi pasar potensial dan sedikit wisatawan asing. Umbul tatar diperkirakan akan tetap menjadi obyek wisata pilihan terfavorit bagi wisatawan. Perkembangan perhotelan di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 akan meningkat cukup baik, sejalan dengan perkembangan Bandar Udara Adisumarmo, pelayanan haji dan lain-lainnya. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel-hotel di wilayah Kabupaten Boyolali diperkirakan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan antara 5 – 12,5% per tahun.

7. Urusan Perindustrian

a. Kondisi Saat Ini

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Boyolali dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yakni pada tahun 2004 sebesar 17,68% dari PDRB atas dasar harga Berlaku dan 17,12% dari PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Boyolali juga cukup pesat. Pada tahun 2000 nilai produksi sektor industri atas dasar harga berlaku sebesar Rp 3,29 Trilyun, meningkat menjadi Rp. 7,51 trilyun pada tahun 2004. Sementara itu perkembangan nilai produksi sektor industri atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 1,67 trilyun, selanjutnya terus meningkat menjadi Rp 6,09 trilyun pada tahun 2004.

Unit usaha industri di kabupaten Boyolali dikelompokkan menjadi empat, yakni industri besar, industri menengah, industri kecil formal dan industri kecil non formal. Jumlah keseluruhan unit usaha industri di Kabupaten Boyolali pada tahun 1999 sebanyak 10,244 unit usaha, terdiri dari 0,14% industri besar, 0,06% industri skala menengah, 1,74% industri kecil formal dan 98,07% industri kecil non formal. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10.689 unit usaha pada tahun 2004, terdiri dari 0,17% industri skala besar, 0,14% industri skala menengah, 1,73% industri skala kecil formal dan 97,96% industri skala kecil non formal.

Mencermati beberapa perkembangan unit usaha industri, peran industri skala besar menunjukkan kecenderungan menurun. Sementara itu, jumlah unit industri skala menengah

cenderung meningkat. Industri skala kecil, terutama industri kecil informal merupakan jenis industri yang paling dominan di Kabupaten Boyolali, dengan proporsi di atas 95%. Bahkan jika menyatukan jenis industri kecil formal dan non formal, perannya mencapai kisaran 99%.

Dalam kurun waktu tahun 2001-2004 jumlah nilai produksi industri di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari Rp 468.664 juta rupiah pada tahun 2001 menjadi Rp 721.798 juta rupiah pada tahun 2004. Dengan mencermati nilai produksi pada masing-masing skala industri, industri skala besar yang jumlah unit usaha tidak lebih dari 1% dari seluruh unit usaha industri yang ada, memiliki peran yang cukup besar (bahkan dominan) selama tahun 2001–2004. Pada tahun 2001 proporsi nilai produksi industri skala besar sebesar 66,04%, dan pada tahun 2004 proporsi nilai produksi menjadi 94,23%. Proporsi nilai produksi industri menengah dalam kurun waktu tahun 2001-2004 hanya pada kisaran 1% - 4%. Unit industri skala kecil, baik formal maupun non formal sangat mendominasi dalam hal jumlah unit usaha. Namun demikian, dari sisi nilai produksi belum menunjukkan peran yang sama. Dari sisi nilai produksi, perannya masih cenderung rendah. Dari berbagai jenis industri yang ada, industri pengolahan serta barang dari logam, mesin dan peralatannya merupakan jenis industri dengan nilai produksi terbesar.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Hal demikian dimungkinkan karena kehidupan sektor industri sangat rentan terhadap perubahan ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004, jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat dari sebanyak 40.813 orang menjadi 45.174 orang. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2002 dengan tingkat penyerapan 71.269 orang.

Mengaitkan antara jumlah unit usaha menurut skala industri, seiring dengan banyaknya jumlah industri kecil baik formal maupun non formal yang dominan dalam perekonomian, skala industri ini juga dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004, industri skala kecil mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 70% tenaga kerja di Kabupaten Boyolali. Untuk unit industri skala besar, meskipun jumlah unit usahanya relatif sedikit, namun kemampuannya menyerap tenaga kerja cukup besar. Pada tahun 1999-2004, industri skala besar menyerap tenaga kerja rata-rata di atas 25% dari tenaga kerja di Kabupaten Boyolali. Secara khusus, jenis industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri pengolahan dan barang dari logam, mesin dan peralatannya.

b. Prediksi

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali serta kecenderungan perubahan struktur ekonomi secara nasional, sektor industri semakin memegang peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan merujuk pada fenomena perkembangan industri pada berbagai skala usaha, yakni skala besar, skala menengah dan skala kecil (formal dan non formal), industri menengah dan skala kecil akan cenderung meningkat, sedangkan untuk industri skala besar, meskipun tetap memegang peran yang penting, namun proporsi peran tersebut akan semakin menurun dalam jangka panjang. Industri skala menengah dan kecil formal selalu meningkat

dari tahun ke tahun, industri skala besar cenderung menurun, dan industri kecil non formal cenderung fluktuatif. Menurunnya proporsi industri skala besar disebabkan karena beberapa hal seperti pengembangan jiwa kewirausahaan yang cenderung masuk pada industri skala kecil dan keterbatasan lahan industri besar.

Terkait dengan jenis produksi yang akan berkembang pada masa yang akan datang, industri tekstil atau pakaian jadi dan kulit, kertas serta kayu dan logam masih akan menjadi produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap output industri daerah. Bahkan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit tetap akan menjadi industri yang dominan. Hal tersebut di sebabkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat kesamaan pola gerakan pada trend nilai output yang diproduksi. Selain itu, industri pengolahan akan menjadi industri yang semakin besar perannya karena perkembangannya yang sangat pesat.

8. Urusan Perdagangan

a. Kondisi Saat Ini

Pembangunan perdagangan di Boyolali selama kurun waktu menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan yang telah tersedia terus dikembangkan lebih baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Boyolali cukup meningkat. Keberhasilan perdagangan di Boyolali salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ekspor dan impornya. Perkembangan ekspor Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2002-2004 menunjukkan penurunan dari 79.319.070 US dollar (tahun 2002), menjadi 35.936.460 US dollar. Volume ekspor dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan penurunan, yaitu dari sebanyak 36.316,16 ton pada tahun 2002 menjadi 15.469.230 ton pada tahun 2004. Ekspor unggulan Boyolali adalah dari sektor industri yang meliputi benang tenun, pakaian jadi, kerajinan tembaga dan barang cetakan/stasionary. Perkembangan ekspor Boyolali relatif lebih rendah dan masih perlu ditingkatkan kinerjanya.

Walaupun volume dan nilai ekspor cenderung menurun, namun jumlah unit usaha perdagangan dan penyerapan tenaga kerjanya cenderung meningkat. Jumlah unit usaha perdagangan pada tahun 2003 sebanyak 10.428 unit, pada tahun 2004 menjadi 10.689 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan perdagangan di tahun 2003 hanya sebanyak 44.287 orang, dan pada tahun 2004 sebanyak 45.174 orang.

Jumlah pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan secara keseluruhan cenderung fluktuatif. Dari berbagai skala usaha dimana pengusaha perdagangan bergerak, pengusaha perdagangan skala menengah memiliki kecenderungan menurun, yaitu dari sebanyak 30 buah pada tahun 2002 menjadi 27 buah pada tahun 2004. Sebaliknya, perkembangan jumlah pengusaha perdagangan besar dalam kurun waktu 2002-2004 cenderung meningkat dari sebanyak 4 buah pada tahun 2002 menjadi 15 buah pada tahun 2004. Sementara itu, jumlah pengusaha perdagangan kecil cenderung menurun dari sebanyak 676 buah (2002) menjadi 535 buah (2004).

Seiring dengan perkembangan jumlah pengusaha di bidang perdagangan, penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) juga cenderung fluktuatif. Jumlah SIUP Perusahaan dagang skala kecil cenderung menurun dari sebanyak 932 buah pada tahun 2002 menjadi 535 buah pada tahun 2004. Jumlah SIUP perusahaan dagang menengah juga mengalami penurunan dari sebanyak 39 buah (2002) menjadi 37 buah (2004). Sementara itu, jumlah SIUP perusahaan dagang besar mengalami peningkatan dari hanya 4 buah menjadi sebanyak 15 buah (tahun 2004).

b. Prediksi

Seiring dengan ketersediaan fasilitas pendukung perdagangan yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2025 diperkirakan aktivitas perdagangan akan semakin besar, baik ekspor maupun impor. Selain itu, diperkirakan juga akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, misalnya Ngemplak. Oleh karena itu perlu diupayakan pembangunan sarana prasarana perdagangan/ekonomi di wilayah pertumbuhan baru. Walaupun demikian, sektor perdagangan menghadapi beberapa tantangan diantaranya semakin meningkatnya persaingan perdagangan global. Pada masa mendatang perekonomian Kabupaten Boyolali akan semakin terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada perkembangan wilayah-wilayah di Kabupaten Boyolali.

Produk industri unggulan Kabupaten Boyolali yang masih memiliki prospek ekspor cukup bagus sampai dengan tahun 2025 antara lain benang tenun, pakaian jadi, kerajinan tembaga dan barang cetakan/stasionary. Kedepan kualitas produk industri tersebut perlu terus ditingkatkan agar jumlah ekspor dapat terus meningkat dan dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian Kabupaten Boyolali.

Jumlah unit usaha perdagangan dan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Walaupun demikian, kedepan sektor perdagangan akan menghadapi tantangan yang besar seiring dengan pelaksanaan pasar bebas dunia. Produk-produk dari luar negeri akan sangat mudah masuk ke Indonesia dan bersaing dengan produk-produk buatan dalam negeri. Oleh karena itu, agar sektor perdagangan di Kabupaten Boyolali berkembang dengan baik diperlukan dukungan sektor industri dalam penciptaan produk-produk yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

2.5 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Tata Ruang

1. Urusan Penataan Ruang

a. Kondisi Saat Ini

Perencanaan tata ruang di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari ketersediaan dokumen RTRW dan efektivitas implementasi dari rencana tersebut. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang ada di kabupaten Boyolali meliputi sistem kota, kawasan lindung, kawasan budidaya dan pengembangan kawasan khusus.

Pada aspek pemanfaatan ruang, dilihat dari perkembangan implementasi pola dan struktur pemanfaatan ruang yang meliputi Sistem Kota, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Pengembangan Kawasan Khusus.

a. Sistem Kota, adalah sistem yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan (interdependency) dan keterkaitan (linkage) antara kota satu dengan kota yang lain secara seimbang. Sistem perkotaan ini digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten Boyolali melalui pembagian Sub Wilayah Pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan (linkage) dan kemiripan karakteristik (homogenitas), yang dibagi menjadi empat Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:

- 1) SWP I: meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, dan Kecamatan Boyolali. Sektor pembangunan yang dominan adalah industri, kerajinan, pertanian, perdagangan dan pariwisata serta pusat pemerinthan dan pendidikan, pusat pertumbuhan di Kecamatan Boyolali;
- 2) SWP II: meliputi Kecamatan Banyudono, Sawit, Teras, Ngemplak, dan Sambi. Sektor pembangunan yang dominan adalah industri, perdagangan, dan pertanian serta pariwisata, pusat pertumbuhan di Kecamatan Banyudono;
- 3) SWP III: meliputi Kecamatan Simo, Andong, Nogosari, Klego. Sektor pembangunan yang dominan adalah pertanian tanaman pangan, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Simo;
- 4) SWP IV: meliputi Kecamatan Karanggede, Juwangi, Kemusu dan Kecamatan Wonosegoro. Sektor pembangunan yang dominan adalah pertanian tanaman pangan dan kehutanan, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Karanggede.

b. Kawasan lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan budaya berkelanjutan. Sesuai dengan RTRW kawasan lindung di Kabupaten Boyolali adalah 15.465,2 Ha atau 15,23% dari seluruh luas Kabupaten Boyolali. Kawasan lindung meliputi:

- 1) Kawasan Konservasi dan Resapan Air

Luas kawasan konservasi dan resapan air di Kabupaten Boyolali adalah 15.465 Ha atau 15,23 % dari luas wilayah Kabupaten Boyolali keseluruhan. Wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan resapan air meliputi daerah sekitar puncak gunung Merapi dan gunung Merbabu; Kecamatan Juwangi (7.618,7 Ha); kawasan konservasi sabuk hijau di sekitar waduk Kedungombo di Kecamatan Kemusu, waduk cengklik di Kecamatan Ngemplak, waduk Babe di Kecamatan Klego dan waduk Kedungdowo di Kecamatan Andong. Penetapan kawasan konservasi ini untuk melindungi mata air yang ada, dimana jumlah mata air tersebar di 14 kecamatan.

Kecamatan yang paling banyak mata airnya adalah Kecamatan Banyudono (17 buah) dan Kecamatan Sawit (16 buah). Mata air yang ada di pergunakan oleh masyarakat sekitar untuk air bersih dan irigasi pertanian.

2) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di Kabupaten Boyolali kawasan cagar budaya ini menempati areal seluas 18,2 Ha atau 0,18% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Boyolali.

3) Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis dan topografi Kabupaten Boyolali meliputi kawasan pegunungan yang masih aktif, daratan, dan perairan. Wilayah yang merupakan kawasan rawan bencana letusan gunung api yaitu kawasan yang berdekatan dengan puncak Gunung Merapi di bagian barat seluas 1.143 Ha atau 1,1% dari luas wilayah Kabupaten Boyolali, secara administratif masuk wilayah Kecamatan Cepogo, Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk. Wilayah yang rawan terjadi longsor terdapat di perbukitan terjal di kaki Gunung Merapi dan Merbabu (Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk) serta pelapukan batuan yang intensif di lereng timur gunung Merbabu (kecamatan Ampel). Kawasan rawan tanah longsor juga terdapat di Kecamatan Simo, terutama di Desa Gunggung, Pentur, Talakbroto, Kedunglengkong dan Sumber.

Wilayah rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Ampel, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, Karanggede, Klego, Andong dan Simo. Sementara itu wilayah rawan banjir berada di Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, dan Wonosegoro. Bahaya banjir lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah banjir lahar dingin yang sangat berbahaya bagi masyarakat di kawasan bawah Gunung Merapi.

Beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali juga termasuk dalam wilayah rawan angin puting beliung, diantaranya Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, dan Ngemplak.

4) Lahan Kritis

Luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Boyolali terbagi dalam tiga kriteria, yaitu lahan kritis seluas 3.995,2 Ha, lahan agak kritis 12.881 Ha dan lahan potensial kritis seluas 25.290,9 Ha. Lahan kritis berada di sekitar puncak Gunung Merapi dan Merbabu hingga ketinggian berada di 1.500 dpl. Kondisi lahan dekat puncak (1.058 Ha) berupa lahan tandus dengan material pasir-bongkah andesit lepas-lepas, sarang, permeabilitas sangat tinggi dan mudah longsor. Areal tanah rusak (1.680 Ha) di jumpai di sebagian kecil barat Kecamatan Musuk, bagian barat Kecamatan Cepogo, bagian utara Kecamatan Klego, bagian selatan kecamatan Kemusu. Lahan kritis

lainnya dijumpai pada lembah atau tebing sungai yang terdapat di kecamatan Ampel bagian selatan, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan selo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Teras. Kondisi lahan berupa material agak lepas dan pasir bongkah yang memiliki sifat rentan terhadap gerakan tanah (longsor dan erosi).

- c. Kawasan Budidaya, adalah kawasan diluar kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti industri, pertanian, pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, permukiman, termasuk permukiman transmigrasi dan daerah penyangga (budidaya terbatas). Kawasan budidaya kabupaten Boyolali di dominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor unggulan pertama. Luas kawasan budidaya di Kabupaten Boyolali mencapai 68,184 Ha atau 67% dari total luas wilayah. Kawasan budidaya ini meliputi lahan persawahan, tegalan/kebun, padang gembala, dan kolam.
- d. Pengembangan Kawasan Tertentu, meliputi pengembangan Kawasan Pertumbuhan Cepat, Kawasan Perbatasan, Kawasan Penunjang Sektor Unggulan, Kawasan Kritis yang perlu dipelihara fungsi Lindungnya. Pengembangan kawasan tertentu merupakan salah satu upaya percepatan pertumbuhan wilayah potensial sebagai pemicu pertumbuhan wilayah sekitarnya. salah satunya adalah Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Cepat yang dipengaruhi oleh jalur atau aktivitas strategis. Kawasan perbatasan merupakan salah satu pengembangan kawasan tertentu yang dipengaruhi oleh kabupaten yang berbatasan. Karakteristik kabupaten tetangga secara langsung maupun tidak mempengaruhi perkembangan wilayah ini. Kawasan Penunjang sektor unggulan yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan merupakan kawasan prioritas pengembangan. Kawasan ini diantaranya adalah Kecamatan Banyudono, Sawit, Teras, Ngemplak dan Sambu.

Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi tanah sawah dan tanah kering. Berdasarkan data tahun 2004, wilayah Kabupaten Boyolali memiliki luas 101.510 ha, dengan penggunaan lahan terdiri atas tanah sawah sawah seluas 22.118 ha dan tanah kering seluas 78.637 ha. Luas lahan sawah sejak tahun 1999-2004 menunjukkan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,14%. Kabupaten Boyolali masih memiliki hutan yang dikelola oleh negara seluas 14.835,50 ha, paling banyak di Kecamatan Juwangi dan Kemusu. Sebagian kecil lainnya berada di Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Klego, Karanggede dan Wonosegoro.

Berdasarkan persebaran penggunaan lahan yang ada, terdapat beberapa kecenderungan sebagai berikut:

- 1) Persentase dominan untuk penggunaan sawah adalah sawah tadah hujan dibandingkan dengan sawah jenis lainnya, terdapat di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Boyolali, dan Sawit. Prosentase sawah irigasi didominasi oleh sawah irigasi

teknis, irigasi 1/2 teknis, dan irigasi sederhana. Satu-satunya kecamatan yang tidak ditemukan adanya lahan sawah adalah di Kecamatan Musuk.

- 2) Sebaran tanah pekarangan/bangunan belum menjadi penggunaan lahan yang dominan, tetapi terus meningkat baik sebaran penggunaan maupun luas penggunaan lahannya. Penggunaan lahan tertinggi untuk bangunan dan pekarangan terdapat di Kecamatan Ampel, Musuk, Andong, Nogosari dan Sambu. Hal ini disebabkan karena kecamatan-kecamatan tersebut merupakan daerah dengan topografi landai dan memiliki luasan yang cukup luas. Untuk penggunaan lahan terendah terdapat di Kecamatan Selo, Teras, Sawit, Banyudono dan Kemusu. Kelima kecamatan tersebut memiliki jenis tanah yang sangat peka terhadap bahaya erosi.
- 3) Sebaran penggunaan lahan pekarangan dan bangunan ini meningkat seiring perkembangan penduduk, perkembangan ekonomi wilayah, dan perkembangan fungsi kota-kota yang ada di Kabupaten Boyolali. Untuk itu peningkatan sebaran penggunaan lahan bangunan dan pekarangan perlu diarahkan pada pola pemanfaatan dan pengelolaan yang sesuai tata aturan penggunaan lahan.
- 4) Hutan negara memiliki sebaran penggunaan lahan sebesar 14.835,5 Ha dengan sebaran terbesar di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Sebaran penggunaan lahan hutan dari tahun ke tahun cenderung tetap, karena penggunaan tanah hutan untuk keperluan lain selalu mendapatkan ganti tanah yang selanjutnya dikelola sebagai hutan lagi. Sebaran ini hendaknya dipertahankan karena kecamatan-kecamatan yang memiliki sebaran hutan negara tersebut merupakan kecamatan yang termasuk dalam kawasan penyangga yang berfungsi sebagai kawasan resapan air yang mempertahankan intensitas air tanah di Kabupaten Boyolali.
- 5) Untuk sebaran penggunaan lahan tegalan dan kolam/tambak sangat dipengaruhi oleh adanya musim penghujan dan musim kemarau. Sehingga dari luasan yang ada sering terjadi overlapping penggunaan lahan tegalan untuk kegiatan lain dan kolam juga demikian, sesuai dengan kondisi masing-masing kecamatan. Untuk lahan tegalan, juga terdapat pengembangan fungsi hutan rakyat.

Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Boyolali diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengendalian merupakan aspek yang masih perlu banyak ditingkatkan dalam implementasinya terutama pada penegakan hukumnya. Kondisi ini sangat terpengaruh dengan kewenangan dalam penertiban yang bertitik tolak pada perijinan dan penindakan yang merupakan kewenangan utama pada Kabupaten/Kota, serta kondisi substansi peraturan perundangan yang kurang optimal dalam memberikan sanksi serta masih rendahnya peran serta masyarakat.

b. Prediksi

Sebagaimana tercantum **Rencana** RTRW Kabupaten Boyolali 2010–2029, rencana pembangunan jangka panjang yang akan mempengaruhi perubahan lahan di Kabupaten Boyolali, antara lain:

1. Rencana Rinci Pengembangan Kawasan Bandara Adi Sumarmo
2. Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo, Jalan Tol Solo – Mantingan, dan Jalan Tol Solo – Jogjakarta. Guna mendukung Pembangunan Jalan Tol tersebut maka direncanakan Pembangunan Jalan Kolektor dan Jembatan yang menghubungkan wilayah selatan bandara ke bandara, yaitu melalui akses Ruas Jalan baru Ngasem – Bolon – Ngesrep – Bandara.
3. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Kolektor Sruwen – Karanggede – Juwangi – Godong
4. Pembangunan Terminal Tipe A yang direncanakan di Kecamatan Banyudono
5. Pengembangan dan Pembangunan Jalur Kereta Api Commuter Solo – Boyolali
6. Peningkatan Investasi di Kabupaten Boyolali dengan pengembangan zona-zona Industri baru, yaitu di wilayah Kecamatan Ampel, Ngemplak, Nogosari dan Klego.

Kecenderungan-kecenderungan perubahan lahan yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

1) Kecenderungan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali tiap tahunnya selalu berubah mengikuti pertambahan jumlah dan aktivitas penduduknya. Perubahan guna lahan ini biasanya berupa perubahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Jumlah sawah diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 22.777 ha pada tahun 2010, menjadi 22.612 ha di tahun 2015, menjadi 22.449 ha di tahun 2020, dan menjadi 22.287 ha di tahun 2025. Tegalan dan kebun juga diperkirakan akan mengalami penurunan luasan menjadi 30.561 ha di tahun 2010, menjadi 30.329 ha di tahun 2015, menjadi 30.100 ha di tahun 2020, dan menjadi 29.872 ha di tahun 2025. Sementara itu, pekarangan/bangunan justru mengalami peningkatan menjadi 25.411 ha di tahun 2010, menjadi 26.320 ha di tahun 2015, menjadi 27.848 ha di tahun 2020, dan menjadi 27.520 ha di tahun 2025. Peningkatan lahan terbangun ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali di tahun 2025 mendatang, dimana perkembangannya harus diberikan perhatian guna tidak berkurangnya lahan 30%.

Prediksi ini dianalisis didasarkan pada pertumbuhan positif luas penggunaan lahan pekarangan/bangunan seiring dengan pertambahan penduduk yang membutuhkan ruang lahan terbangun, dan rencana pembangunan jalan tol, jalan kolektor, terminal, bandara Adi Sucipto, jalur kereta api, dan zona-zona industri. Penggunaan lahan selain pekarangan/bangunan dan lahan lainnya diasumsikan pertumbuhannya bernilai negatif. Semakin berkurangnya lahan terbuka di Kabupaten Boyolali ini mengindikasikan perlunya pertimbangan yang tegas dalam pemanfaatannya agar lahan lindung berupa kawasan konservasi air dan lahan kritis tidak dialihfungsikan sebagai lahan terbangun.

2) Kecenderungan Perkembangan Lahan Terbangun

Kecenderungan perkembangan penggunaan lahan terbangun sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas dan kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dapat diketahui bahwa bangunan-bangunan yang ada yaitu perdagangan, pertokoan, sekolah, jasa dan lain-lainnya, pada umumnya berada di kanan kiri jalan poros baik pada kota-kota kecamatan maupun pada desa-desa sehingga cenderung membentuk satu pola linier.

Kecenderungan perubahan guna lahan untuk lahan terbangun juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan jalan Tol Semarang-Solo; jalan Tol Solo – Mantingan; Jalan Tol Solo – Jogjakarta; jalan kolektor dan jembatan yang menghubungkan wilayah selatan bandara ke bandara, yaitu melalui akses Ruas Jalan baru Ngasem – Bolon – Ngesrep – Bandara; jalan kolektor Sruwen – Karanggede – Juwangi – Godong, Pengembangan Kawasan Bandara Adi Sumarmo, Pembangunan Terminal Tipe A yang direncanakan di wilayah Kecamatan Banyudono, Pembangunan Jalur Kereta Api Commuter Solo – Boyolali, dan pengembangan zona-zona Industri baru, yaitu di wilayah Kecamatan Ampel dan Kecamatan Ngemplak.

Pembangunan jalan dan sarana prasarana transportasi tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena secara aksesibilitas cukup tinggi sehingga menghemat biaya transportasi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis seperti kegiatan perdagangan dan jasa, industri akan cenderung bergeser posisinya mendekati lokasi tersebut karena kegiatan di lokasi tersebut akan menarik kedatangan banyak orang. Dalam perkembangan selanjutnya akan berkembang kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan-kegiatan ekonomis tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya akan berkembang kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan-kegiatan ekonomis tersebut atau memanfaatkan aksesibilitas dari keberadaan jalan dan sarana prasarana tersebut.

Keberadaan sarana prasarana transportasi yang melewati Kabupaten Boyolali ini diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi perkembangan Kabupaten Boyolali sebagai penarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Boyolali. Namun, perlu dicermati pula agar pengembangan yang akan dilakukan tidak memanfaatkan lahan produktif tetapi dialokasikan pada lahan non produktif. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan penggunaan lahan yang jelas di daerah-daerah yang diperkirakan akan terpengaruh dengan keberadaan ketiga kegiatan tersebut.

Pembangunan lahan terbangun juga diperkirakan akan mengalami peningkatan terkait dengan pembangunan pengembangan zona-zona Industri baru di wilayah Kecamatan Ampel dan Kecamatan Ngemplak.

3) Kecenderungan Penggunaan Lahan Sawah

Berdasarkan kenyataan bahwa luas lahan persawahan di Kabupaten Boyolali setiap tahun mengalami penyusutan. Pada umumnya, lahan sawah yang hilang dikonversi menjadi

lahan permukiman dan industri. Pengalihan fungsi lahan persawahan tidak dibarengi dengan pembukaan lahan pertanian baru. Akibatnya, lahan persawahan otomatis terus berkurang. Berkurangnya lahan sawah ini mengakibatkan berkurangnya produksi padi yang mengancam ketahanan pangan nasional.

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Tol Solo – Mantingan, dan Jalan Tol Solo – Jogjakarta, jalan kolektor dan jembatan yang menghubungkan wilayah selatan bandara ke bandara, yaitu melalui akses Ruas Jalan baru Ngasem – Bolon – Ngesrep – Bandara; jalan kolektor Sruwen – Karanggede – Juwangi – Godong juga sangat mempengaruhi perkembangan lahan sawah di Kabupaten Boyolali. Banyaknya kecamatan dan luasnya lahan persawahan yang akan dilalui proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Boyolali menyebabkan terjadinya pergeseran guna lahan terutama lahan persawahan.

Rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Boyolali melewati 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras dan Banyudono. Pengembangan jalan tol ini secara otomatis juga akan menarik aktivitas terbangun lain yang menggunakan lahan persawahan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Boyolali secara keseluruhan, terutama aspek ekonomi yang terkait dengan program ketahanan pangan. Untuk mempertahankan ketahanan pangan khususnya tanaman padi di Kabupaten Boyolali maka formulasi dan implementasi kebijakan hendaknya mencakup upaya antara lain:

- 1) Mengintensifkan upaya peningkatan produksi melalui perbaikan produktivitas lahan,
- 2) Intensitas pertanaman,
- 3) Perluasan areal tanam,
- 4) Penurunan susut panen dan pasca panen, serta
- 5) Upaya peningkatan kualitas dan nilai tambah pengolahan padi.

Kebijakan Pengembangan sawah abadi juga diharapkan mampu mengurangi akibat dari adanya penggunaan lahan sawah untuk pembangunan jalan tol dan sarana prasarana transportasi (terminal dan bandara). Lokasi lahan sawah abadi diarahkan pada kawasan persawahan yang memiliki kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai) dan secara ekonomi menguntungkan. Lahan persawahan yang berada di sepanjang jalan yang potensial perkembangannya dapat dialihfungsikan sebagai lahan terbangun kurang lebih 100 m pada sisi kanan dan kiri jalan. Penetapan lahan sawah abadi/sawah lestari perlu didukung dengan peraturan perundangan yang kuat serta pemecahan permasalahan sosial dan ekonomi.

4) Kecenderungan Perkembangan Lahan Hutan

Untuk lahan hutan negara yang ada di Kabupaten Boyolali cenderung tetap. Sedangkan untuk lahan hutan rakyat biasanya menjadi satu dengan lahan tegalan masyarakat. Perkembangan hutan rakyat ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan hutan rakyat ini diarahkan pada kawasan-kawasan lahan kritis, kawasan resapan air, dan kawasan lindung untuk mempertahankan fungsi lahan tersebut dan mengurangi tingkat kekritisannya lahan. Selain itu, adanya Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Gerhan) dapat mempercepat upaya RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) pada DAS Prioritas yang sekaligus sebagai upaya penanggulangan banjir, tanah longsor dan kekeringan di Kabupaten Boyolali.

5) Kecenderungan Perkembangan Lahan Perkebunan

Lahan perkebunan di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi luas lahan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh belum tingginya minat masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan lahan di Kabupaten Boyolali untuk aktivitas perkebunan. Pengembangan kawasan perkebunan ini dapat dilakukan di Kawasan Penyangga untuk mendukung fungsi lahan tersebut. Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali perlu lebih dikembangkan untuk aktivitas perkebunan, khususnya pada kecamatan yang luasan lahannya untuk perkebunan masih relatif kecil, antara lain pada Kecamatan Sawit, Banyudono, dan Ngemplak.

6) Kecenderungan Perkembangan Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering yang berupa lahan hutan negara merupakan penggunaan lahan tertinggi ketiga di Kabupaten Boyolali setelah bangunan/pekarangan dan tegalan/kebun. Kecenderungan perkembangan lahan kering ini akan mengalami peningkatan terutama untuk penggunaan lahan terbangun. Perubahan ini terutama terjadi pada sepanjang jalan potensial dan pembangunan sarana-prasarana transportasi, meliputi jalan Tol Semarang-Solo; jalan Tol Solo – Mantingan; Jalan Tol Solo – Jogjakarta; jalan kolektor dan jembatan yang menghubungkan wilayah selatan bandara ke bandara, yaitu melalui akses Ruas Jalan baru Ngasem – Bolon – Ngesrep – Bandara; jalan kolektor Sruwen – Karanggede – Juwangi – Godong, Pengembangan Kawasan Bandara Adi Sumarmo, Pembangunan Terminal Tipe A yang direncanakan di wilayah Kecamatan Banyudono, Pembangunan Jalur Kereta Api Commuter Solo – Boyolali, dan kawasan pengembangan zona-zona Industri baru, yaitu di wilayah Kecamatan Ampel dan Kecamatan Ngemplak.

2. Urusan Pertanahan

a. Kondisi Saat Ini

Kepemilikan sertifikat tanah di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 19.574 buah menjadi 15.766 buah di tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan dalam kepemilikan sertifikat tanah, dikarenakan adanya kemudahan dalam pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini sejalan dengan penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara terpadu. Namun demikian belum semua masyarakat mampu mengurus sertifikat tanah.

Berdasarkan jenis kepemilikan tanah, di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 1999-2004 banyaknya Sertifikat Hak Milik (HM) yang diterbitkan mencapai 3.736 buah. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam kurun waktu yang sama juga diterbitkan sebanyak 88 buah,

sedangkan sertifikat hak pakai sebanyak 492 buah, dan sertifikat tanah wakaf sebanyak 300 buah.

Kondisi saat ini pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kabupaten Boyolali baru mencapai sebagian kecil dari keseluruhan wilayah. Kedepan secara bertahap tanah di Kabupaten Boyolali perlu diukur dan dipetakan sehingga statusnya jelas. Sementara itu, perubahan fungsi lahan belum terpantau atau terkendali dengan baik. Perubahan fungsi lahan saat ini banyak yang tidak memperhatikan tata ruang wilayah. Tanah sawah banyak dialih-fungsikan untuk perumahan atau industri, sehingga lahan pertanian semakin sempit. Sempitnya lahan pertanian ini akan mempengaruhi besarnya produksi pangan, yang berimbas pada rendahnya ketahanan pangan Kabupaten Boyolali.

Kebutuhan akan tanah untuk dialihkan untuk perumahan tentunya akan semakin besar seiring dengan penambahan penduduk yang semakin besar. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas dalam pembangunan perumahan dan fasilitas umum agar menggunakan sistem bangunan bertingkat (*strata title*), baik rumah, gedung pertemuan, sekolah, hotel, tempat ibadah dan sebagainya.

b. Prediksi

Penggunaan tanah di Kabupaten Boyolali semakin meningkat seiring perubahan nilai dari fungsi lahan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan perkembangan aktivitas pembangunan wilayah yang memberikan kontribusi terhadap nilai jual tanah dan perkembangan pembangunan ini juga diikuti dengan perkembangan sarana prasarana pendukung kegiatan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Sampai dengan tahun 2025 terdapat kecenderungan semakin banyaknya sertifikat peralihan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,22%.

Kecenderungan lain yang terjadi adalah pergantian sertifikat, namun perkembangannya cukup fluktuatif dengan kisaran sebesar 3,43%. Selain itu, diperkirakan sertifikat hak milik cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,88%. Kecenderungan peningkatan ini dikarenakan perkembangan pertumbuhan penduduk yang memberikan pengaruh terhadap kepemilikan sertifikat guna membangun sarana hunian (tempat tinggal) dan menjadi sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka. Pada masa mendatang diprediksikan masih ditemukan adanya sengketa pertanahan yang memerlukan penyelesaian secara adil berdasarkan hukum agraria. Untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan pendataan dan penataan kembali administrasi pertanahan.

2.6 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana

1. Urusan Pekerjaan Umum

a. Kondisi Saat Ini

1) Bidang Bina Marga

Sistem transportasi Kabupaten Boyolali secara umum terdapat pintu akses eksternal maupun internal. Secara kesisteman jaringan transportasi ini di hubungkan melalui sistem jaringan transportasi jalan saja. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Boyolali dilalui jalan Nasional yang menghubungkan wilayah secara linier, dan jalan provinsi. Jaringan jalan nasional merupakan jaringan jalan penghubung utama pusat kegiatan nasional. Kabupaten Boyolali berada diantara Kota Semarang dan Kota Surakarta. Jaringan jalan utama antar kabupaten di wilayah Boyolali terbagi menjadi dua kelas, yaitu :

- a) Kelas II Arteri primer, merupakan jalan yang menghubungkan antara Ampel-Boyolali-Banyudono-Bangak (Jalan Nasional).
- b) Kelas III B Kolektor sekunder, merupakan jalan yang menghubungkan antara Karang gede-Klego-Andong-Kacangan (Jalan Provinsi), dan jalan yang menghubungkan antara Boyolali-Tulung (perbatasan Klaten).

Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten tercatat sepanjang 551,83 km, hampir seluruhnya teraspal (497,68 km). Pada tahun 2004 kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi rusak ringan 230,18 km (41,71%), lainnya kondisi rusak sedang sepanjang 164,65 km (29,84%), kondisi baik sepanjang 100,5 km (18,21%), dan sisanya rusak berat sepanjang 56,5 km (10,24%). Selama kurun waktu 1999-2004 terjadi penurunan kualitas jalan dari sebanyak 195,90 km berkondisi baik menjadi hanya 100,5 km berkondisi baik. Jembatan sebagai sarana penunjang transportasi, pada tahun 2004 terdapat sebanyak 246 buah yang memiliki beban muatan 70 ton, dan lainnya (10 buah) memiliki beban muatan < 10 ton. Dari jumlah tersebut, jembatan yang berkondisi baik sebanyak 79,26%, jembatan yang berkondisi rusak ringan sebanyak 17,62%, dan jembatan berkondisi rusak berat sebanyak 3,13%.

2) Bidang Sumber Daya Air

a) Air Tanah

Ditinjau dari kedalaman air tanah, wilayah Boyolali termasuk dalam kategori akuifer berproduksi sedang, yaitu akuifer tidak menembus, tipis dan keterusan rendah. Muka air tanah umumnya dangkal, debit air sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik, dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Wilayah sebelah Utara termasuk wilayah yang tidak potensial untuk pengembangan air tanah (0-5 liter/detik) hal ini disebabkan oleh kondisi batuanannya berupa litologi endapan aluvial antar perbukitan, batu gamping berlapis dan endapan vulkanik berukuran halus. Wilayah ini meliputi: Kecamatan Juwangi, Wonosegoro dan Kemusu.
- (2) Wilayah bagian Tengah termasuk wilayah yang berpotensi untuk pengembangan air tanah berbagai keperluan permukiman. Debit air berkisar 20-200 m³ per hari dengan produksi rata-rata 0-10 liter/detik, meliputi Kecamatan Wonosegoro, Karanggede, Klego, Andong, Simo, Nogosari, Boyolali, dan Sambi. Litologi

material hasil aktivitas vulkanik Merapi dan Merbabu terdiri dari larva, breksi laharik, konglomerat dan batu pasir vulkanik, kontak dengan perbukitan lipatan dengan litologi yang lebih tua terdiri dari material vulkanik berukuran halus terdiri lempeng tuffan, lanau tuffan, batu pasir vulkanik halus dan konglomerat polimik.

- (3) Wilayah yang berpotensi baik untuk pengembangan air bagi irigasi. Debit air berkisar antara 300-800 m³ per hari dengan produksi rata-rata lebih dari 10 liter per detik, meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, dan Sawit. Litologi wilayah tersebut terdiri dari lava andesit, breksi laharik, konglomerat, dan batu pasir vulkanik yang bagian atasnya tertutup oleh material fluvio vulkanik Merapi dan Merbabu berupa pasir krikilan sampai pasir bongkah lepas. Daerah dengan lereng >40% kedalaman air >150 meter meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, kerucut gunung berapi dan kaki atas kerucut gunung berapi (G. Merapi dan G. Merbabu) terdiri dari pasir vulkanik halus sampai kasar, lava andesit ekstrusif dan bongkah-bongkah andesit. Potensi air tanah ini apabila diusahakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan air bersih bagi masyarakat.

Sumber air dangkal merupakan sumber air yang terserap pada permukaan tanah, salah satu diantaranya dalam bentuk mata air. Mata air ini terus-menerus memancarkan air sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk keperluan sehari-hari dan pertanian bahkan ada yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata seperti kolam renang dan kolam pemancingan. Mata air di Kabupaten Boyolali antara lain:

- (1) Mata air Tlatar di Kecamatan Boyolali
- (2) Mata air Nepen di Kecamatan Teras
- (3) Mata air Pengging di Kecamatan Banyudono
- (4) Mata air Pantaran, Sipendak dan Simuncar di Kecamatan Ampel
- (5) Mata air Wonopedut di Wonodoyo Kecamatan Cepogo

Mata air lainnya yang terdapat di Kabupaten Boyolali teridentifikasi sebanyak 104 mata air, tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Pengelolaan air di Kabupaten Boyolali kedepan perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan kebutuhan air bersih
- (2) Pemenuhan kebutuhan irigasi
- (3) Pelestarian sumber daya air tanah
- (4) Pengaliran limpasan air yang dapat menimbulkan banjir

Pemenuhan kebutuhan pengairan sawah, sistem saluran irigasi yang ada juga belum menjangkau keseluruhan areal sawah di Kabupaten Boyolali. Disamping itu kondisi sumber daya air baik air tanah dan air permukaan belum dikelola sepenuhnya dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan air secara optimal perlu ditingkatkan dan

juga sumber-sumber mata air baru perlu dicari untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya.

b) Air Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut. Sungai merupakan bagian dari DAS sebagai tempat atau wadah dan jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara yang dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan. Sungai juga berfungsi sebagai pematuan pada saat musim hujan. Di Kabupaten Boyolali terdapat 6 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Serang dan Braholo, DAS Cemoro, DAS Butak, DAS Pepe, DAS Tempel dan Kali Larangan/Gede, dan DAS Gandul.

Wilayah Kabupaten Boyolali dilalui oleh 5 (lima) sungai besar dan beberapa anak sungai. Pada umumnya aliran sungai dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu (1) Aliran langsung, yaitu air hujan langsung dibuang ke laut tanpa ada yang meresap ke dalam tanah; dan (2) aliran dasar, yaitu air hujan sebagian meresap ke dalam tanah hingga jenuh dan beberapa waktu kemudian keluar sebagai aliran dasar yang mengalir ke laut bersama-sama atau tidak bersama aliran langsung.

Pada umumnya kondisi sungai di Kabupaten Boyolali telah mengalami penurunan kapasitas daya tampung akibat sedimentasi, rusaknya tanggul serta longsor tebing sungai. Pada musim kemarau debit sungai relatif lebih kecil dan pada musim penghujan debit sungai sangat besar sehingga pada musim kemarau penyediaan air untuk irigasi dilakukan rotasi/giliran tetapi pada musim penghujan hampir setiap tahun terjadi bencana banjir.

c) Air Waduk

Waduk merupakan danau buatan yang dipergunakan untuk menampung air, hal ini dimaksudkan untuk keperluan irigasi, pembangkit tenaga listrik, usaha perikanan dan tempat wisata. Waduk yang terdapat di Kabupaten Boyolali yaitu :

- (1) Waduk Kedungombo, memiliki luas genangan seluruhnya ada 6.576 ha, meliputi tiga wilayah yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan. Khususnya Kabupaten Boyolali seluas 3.536 ha di Kecamatan Kemusu.
- (2) Waduk Kedungdowo, memiliki luas 48 ha terdapat di Kecamatan Andong.
- (3) Waduk Cengklik, memiliki luas 240 ha terdapat di Kecamatan Ngemplak.
- (4) Waduk Bade, memiliki luas 80 ha terdapat di Kecamatan Klego.

Waduk-waduk tersebut dapat digunakan untuk pengairan pada saat musim kemarau, sehingga pertanian pada kawasan tersebut masih tercukupi kebutuhan

airnya. Dengan adanya waduk yang terdapat pada berbagai wilayah tersebut diharapkan lahan pertanian tetap subur. Jumlah bendungan/waduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 233 buah dilengkapi bangunan bagi/sadap sebanyak 1.029 buah, dan bangunan pelengkap sebanyak 1.806 buah. Sementara itu, panjang saluran air di Kabupaten Boyolali mencapai 360.589 m, terdiri dari sepanjang 41.872 m saluran pasangan dan 402.461 m saluran tanah.

3) Bidang Air Minum/Air Baku

Produksi air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Boyolali dalam kurun waktu tahun 1999-2004 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1999 produksi air PDAM hanya 3.897.961 m³ dengan jumlah distribusi sebanyak 3.732.326 m³, pada tahun 2004 produksinya mencapai 4.831.706 m³ dan terdistribusi sebanyak 4.597.385 m³. Pada tahun 1999 dari sejumlah air yang terdistribusi tersebut, volume air yang terjual hanya sebanyak 3.102.669 m³, sisanya (629.657 m³) berupa air yang hilang/bocor. Sementara itu pada tahun 2004 volume air PDAM yang terjual hanya sebanyak 3.667.544 m³ dengan volume kehilangan mencapai 879.841 m³ (18,21%).

Pelayanan PDAM di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2004 baru menjangkau sebanyak 10 kecamatan, sementara sebanyak 9 kecamatan lainnya belum terjangkau layanan. Sembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Selo, Mojosongo, Ngemplak, Nogosari, Karanggede, Klego Andong, Kemusu dan Wososegoro. Banyaknya pelanggan PDAM di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 mencapai 15.943 unit dengan komposisi terbanyak pelanggan rumah tangga, selanjutnya pelanggan niaga, pelanggan sosial, instansi pemerintah, Sekolah, dan industri.

4) Bidang Air Limbah

Salah satu sumber air limbah di Kabupaten Boyolali adalah industri agro. Volume limbah cair dari agro industri pada tahun 2004 sebanyak 2.275.000 m³/org. Limbah tersebut mengandung BOD₅ sebanyak 77.615,23 ton, kandungan SS sebanyak 195.878,19 ton, dan kandungan N sebanyak 9.407,22 ton. Volume limbah domestik cair di Kabupaten Boyolali pada tahun 2006 sebanyak 6.892.520 m³ dengan perhitungan limbah yang dihasilkan tiap orang sebanyak 7,3 m³. Besarnya cemaran BOD₅ pada limbah cair tersebut sebesar 6.514,85 ton, sedangkan cemaran COD sebanyak 15.106,90 ton, SS sejumlah 15.106,90 ton, TDS sebanyak 34.462,61 ton, dan N sejumlah 3.115,80 ton.

b. Prediksi

Panjang jalan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2025 diperkirakan tidak mengalami perubahan, yaitu sepanjang 551,83 km. Terkecuali apabila terjadi pembukaan jalan baru atau peningkatan status jalan dari jalan kecamatan menjadi jalan **kabupaten**. Kualitas jalan kabupaten di Kabupaten Boyolali hingga tahun 2025 diperkirakan akan semakin baik.

Panjang jalan berkondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat diperkirakan mengalami penurunan.

Jumlah jembatan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Boyolali diperkirakan akan mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan apabila ada pembangunan jalan baru. Kualitas jembatan yang dibangun ini disesuaikan dengan beban angkutan jalan, paling banyak memiliki beban muatan diatas 70 ton agar memiliki daya tahan sangat tinggi. Pengembangan jembatan diperkirakan berupa peningkatan kemampuan beban muatan, dan peningkatan kualitas jembatan dari berkondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi berkondisi baik. Jembatan yang kondisinya baik diperkirakan mengalami peningkatan, sedangkan jembatan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat mengalami penurunan.

Pembangunan jalan dan jembatan ini harus dilakukan melalui pemeliharaan jalan secara intensif dan melakukan penegakan peraturan tentang tonase kendaraan untuk masing-masing kelas jalan. Walaupun demikian, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menghadapi tantangan meningkatnya potensi bencana alam yang dapat berdampak pada penurunan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memiliki program pembangunan jalan Tol Semarang-Solo, merupakan salah satu program nasional yang menjadi rangkaian program Tol di Pulau Jawa. Ramp atau pintu penghubung jalan tol ini dengan jalan lokal ada yang melalui Kabupaten Boyolali. Jalan tol ini dapat dijadikan jalan alternatif yang diharapkan dapat mengurangi beban pada jalan utama.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1990 pengertian jalan tol merupakan jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol. Terlepas dari pembayaran tol, keberadaan jalan tol ini memiliki perubahan yang signifikan terhadap Kabupaten Boyolali terutama transportasi Kabupaten Boyolali.

Pembangunan jalan tol ini secara otomatis akan berdampak pada kondisi tata ruang wilayah baik yang dilalui maupun disekitarnya di Kabupaten Boyolali. Perubahan ini juga akan berpengaruh pada perubahan transportasi yang ada di Kabupaten Boyolali. Dengan adanya jalan tol, transportasi lintas utama pada jalur ini akan berkurang lalu lintasnya karena sebagian akan beralih pada jalan tol, sehingga bebannya akan berkurang. Perkembangan jalan tol akan memberikan dampak yang besar bagi kabupaten Boyolali baik yang bersifat menguntungkan maupun berdampak negatif. Untuk itu rencana pembangunan jalan tol ini diperlukan antisipasi baik tata ruang kota dan perencanaan transportasi yang baik agar dapat tercipta kesinambungan yang dapat menekan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif bagi perkembangan jalan tol tersebut, terutama yang mengarah pada lahan-lahan produktif dan sistem perekonomian rakyat.

Dalam bidang sumber daya air, ketersediaan air di Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada ketersediaan air tanah, air sungai maupun air waduk. Ketersediaan air tanah diperkirakan sampai dengan tahun 2025 akan tetap tersedia dan terjaga kelestariannya

jika penutupan lahan tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelestarian hutan akan menentukan kemampuan penyerapan air hujan kedalam tanah dan debit mata air.

Air sungai yang menjadi sumber pengairan irigasi diperkirakan sampai dengan tahun 2025 belum dapat menjangkau ke seluruh areal persawahan di Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan debit air dari sumber mata air yang mengalir ke sungai kurang mencukupi kebutuhan pengairan yang digunakan tidak hanya di wilayah Kabupaten Boyolali, tetapi juga di Kabupaten lainnya. Kapasitas sungai yang melewati Kabupaten Boyoli juga kapasitas daya tampungnya juga diperkirakan akan mengalami penurunan akibat adanya sedimentasi, kerusakan tanggul dan longsor tebing sungai. Kondisi irigasi di Kabupaten Boyolali diperkirakan masih akan menghadapi permasalahan perbedaan debit antara musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau debit sungai sangat sedikit sehingga penyediaan air irigasi terpaksa digilir, tetapi pada musim penghujan debit sangat besar sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Kemampuan daya tampung waduk sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan, disebabkan sedimentasi yang dialirkan melalui sungai sangat tinggi.

Produksi air oleh PDAM di Kabupaten Boyolali diperkirakan akan meningkat. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya permintaan masyarakat akan jasa layanan PDAM, terutama pada kawasan perumahan baru di wilayah perkotaan, serta semakin meningkatnya sarana dan prasarana air bersih. Hal ini diasumsikan bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali meningkat, sehingga kebutuhan akan air semakin meningkat. Tingkat distribusi juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2025. Meningkatnya produksi air oleh PDAM dikarenakan optimalnya pengelolaan produksi air dari sumber-sumber mata air yang dikelola oleh PDAM di Kabupaten Boyolali. Tetapi tingkat kehilangan air baik saat distribusi ataupun dalam produksi juga meningkat. Dengan meningkatnya kehilangan air oleh PDAM maka perlu dilakukan penanganan yang lebih baik dalam peningkatan kualitas dan kuantitas air minum yang dikelola oleh PDAM di Kabupaten Boyolali. Tingkat kehilangan air yang dikelola oleh PDAM dikarenakan pengelolaan distribusi air bersih oleh PDAM yang masih belum optimal penanganannya, sehingga perlu perhatian dalam pendistribusian air ke pelanggan.

2. Urusan Perumahan

a. Kondisi Saat Ini

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi lebih menonjol berfungsi sebagai tempat tinggal, sehingga aspek kesehatan dan kenyamanan menjadi hal penting dalam rangka pemenuhan rumah tinggal. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, dan secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan seseorang yang menghuninya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga, maka kebutuhan rumah untuk segala jenis tipe juga mengalami peningkatan. Pembangunan pada sektor Perumahan dan Permukiman dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Penataan lingkungan perumahan dan permukiman berperan sebagai wadah pengembangan sumberdaya masyarakat dan pengejawantahan dari lingkungan sosial yang tertib, sehingga masyarakat berkembang produktifitasnya dan terciptanya lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, sehat, rapi, dan indah terhadap lingkungan.

Penyediaan perumahan di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sampai saat ini penyediaan perumahan oleh masyarakat (sektor informal) masih dominan dibanding dengan penyediaan yang dilakukan oleh sektor formal (pengembang). Banyaknya perumahan di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999-2004 tidak mengalami peningkatan pesat, rata-rata pertumbuhannya hanya 0,86%. Pada tahun 1999 jumlah rumah di Kabupaten Boyolali sebanyak 207.497 unit, dan pada tahun 2004 jumlahnya menjadi 220.090 unit.

Pertumbuhan jumlah rumah di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 1999-2004 paling banyak pada jenis rumah semi permanen yang mencapai rata-rata sebesar 4,55%. Pada tahun 1999 jumlah rumah semi permanen sebanyak 29.321 unit, pada tahun 2004 menjadi sebanyak 35.475 unit. Sementara itu, jumlah rumah permanen peningkatannya rata-rata hanya sebesar 4,30% per tahun. Jenis rumah kayu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,65%, sedangkan rumah bambu sirap mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,91%.

Proporsi jumlah rumah permanen di Kabupaten Boyolali hanya sebesar 33,65%, menunjukkan bahwa rumah di Kabupaten Boyolali yang kondisinya masih belum permanen jumlahnya masih banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan dan rehabilitasi lebih lanjut agar kualitas perumahan di Kabupaten Boyolali semakin meningkat. Peningkatan status jenis rumah terutama diarahkan pada jenis rumah bambu/sirap dan rumah kayu/papan agar kesehatan penghuninya dapat terjaga.

Pelayanan air bersih untuk perumahan di Kabupaten Boyolali selama ini dilakukan oleh PDAM. Produksi air PDAM pada tahun 2004 sebanyak 4.831.706 m³ dengan jumlah pelanggan mencapai 15.943 unit. Pelayanan air bersih PDAM baru menjangkau 10 kecamatan, sementara 9 kecamatan lainnya belum terjangkau layanan air bersih. Banyaknya pelanggan PDAM di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 dengan komposisi terbanyak dari pelanggan rumah tangga. Dibidang sanitasi, di Kabupaten Boyolali masih banyak rumah yang berkondisi tidak sehat, dalam arti tidak memiliki jamban yang dilengkapi tangki septik. Pada tahun 2004 kepemilikan jamban yang dilengkapi tangki septik hanya 42,2%. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.

b. Prediksi

Jumlah rumah di Kabupaten Boyolali diperkirakan sampai dengan tahun 2025 akan mengalami peningkatan. Rumah yang paling banyak adalah dari jenis rumah permanen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,88%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan rumah dari segi fisik kecenderungan kualitas bangunannya semakin membaik. Demikian juga jumlah rumah yang kondisinya masih dibawah standar kelayakan hunian mengalami penurunan. Peningkatan jumlah rumah dengan jenis permanen ini dikarenakan semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di wilayah kabupaten Boyolali yang semakin tinggi, serta juga dikarenakan adanya bantuan program pemerintah dalam memberikan pelayanan sarana perumahan bagi warga yang memiliki pendapatan rendah (keluarga miskin) untuk dapat memiliki kualitas rumah yang lebih baik (permanen).

Penyediaan air bersih untuk pemukiman oleh PDAM Kabupaten Boyolali diperkirakan akan mengalami peningkatan dan akan lebih banyak menjangkau 9 kecamatan yang belum terlayani PDAM. Penyediaan air bersih PDAM ini terutama untuk perumahan yang dibangun oleh pengembang. Namun demikian pelayanan air bersih masih menghadapi kendala dalam proses produksi dan pendistribusian air bersih, karena sarana dan prasarana masih minim. Dalam hal sanitasi, diperkirakan jumlah rumah yang memiliki jamban dilengkapi tengki septik semakin banyak dengan peningkatan proporsi sebesar 3% per tahun.

3. Urusan Perhubungan

a. Kondisi Saat Ini

Sistem jaringan transportasi merupakan suatu sistem yang meliputi jaringan prasarana dan pelayanan yang dikelompokkan antara lain menurut hirarki, wilayah, kelas dan sifat pelayanannya. Jaringan prasarana terdiri atas simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur jadwal perjalanan serta perpindahan intra dan antarmoda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk lalu lintas sarana transportasi dan khusus untuk ruang lalu lintas jalan disamping untuk lalu lintas kendaraan juga lalu lintas orang dan barang (Setijowarno, 2001). Transportasi di wilayah Kabupaten Boyolali mengarah pada suatu hubungan keterpaduan sistem transportasi dengan tata ruang.

Saat ini konsentrasi sistem transportasi yang ada masih terletak pada sistem jaringan transportasi jalan. Kendaraan yang terdaftar di Polda Jawa Tengah untuk wilayah Resort Boyolali pada tahun 2004 meliputi mobil penumpang sebanyak 3.692 unit, mobil beban sebanyak 2.161 unit, mobil bus sebanyak 222 unit, dan sepeda motor sebanyak 41.022 unit. Jumlah sepeda motor tersebut sangat mendominasi hingga mencapai 91,74% dari kepemilikan kendaraan pribadi lainnya.

Sarana transportasi angkutan umum bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Boyolali cukup lengkap. Angkutan pedesaan/perkotaan dilayani sebanyak 21 trayek dengan jenis angkutan berupa Mobil Penumpang Umum (MPU) sebanyak 238 unit. Di Kabupaten Boyolali juga terdapat angkutan taksi sebanyak 21 unit. Keberadaan angkutan pedesaan/kota dan taxi ini mempermudah jangkauan untuk memperoleh layanan angkutan udara di Bandar udara Adi Sumarmo Surakarta. Sementara itu untuk keperluan transportasi keluar Kabupaten terdapat Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 92 unit bus kecil, 282 unit bus sedang, dan 66 unit bus besar.

Prasarana transportasi lainnya di Kabupaten Boyolali berupa simpul transportasi adalah terminal penumpang. Di Kabupaten Boyolali terdapat dua terminal utama, yaitu terminal Karanggede yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT Karanggede, dan terminal Sunggingan yang dikelola oleh UPT Sunggingan. UPT Karanggede juga mengelola sebanyak sepuluh sub terminal, yaitu sub terminal Simo (Kecamatan Simo), Andong (Kec. Andong), Nogosari (Kec. Nogosari), Bangak (Kec. Banyudono), Guwo (Kec. Kemusu), dan Klewer. Sementara itu, UPT Sunggingan juga mengelola Sub terminal Pasar Sunggingan, Cepogo (Kec. Cepogo), Ampel (Kec. Ampel), dan Taman sari.

Selain terminal, transportasi di Kabupaten Boyolali juga dilengkapi Bandar Udara Adi Sumarmo. Bandara Internasional Adi Sumarmo ini berada di sebelah Barat dari kota Solo atau tepatnya pada 07°31' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur. Secara administratif Bandara Adi Sumarmo berada di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, namun dalam pengembangannya erat kaitannya dengan Kota Surakarta, sehingga lebih dikenal Bandara Internasional Surakarta, bukan Boyolali.

Bandara Internasional Adi Sumarmo merupakan Bandara Enclave Sipil. Disamping berfungsi sebagai lapangan terbang militer, Bandara ini juga digunakan untuk kegiatan pelayanan angkutan udara komersial, baik domestik maupun internasional. Kegiatan pelayanan penerbangan komersial saat ini sudah berada di sebelah utara landas pacu (run way) yang merupakan bangunan baru yang dibangun oleh PT (Persero) Angkasa Pura I. Tahun 1997 pemerintah juga telah mencanangkan Bandara Internasional Adi Sumarmo sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji.

Mobilisasi orang dan barang di Kabupaten Boyolali relatif banyak. Hal ini dikarenakan Kabupaten Boyolali merupakan penghubung wilayah Selatan dan Utara Jawa Tengah serta penghubung dua PKN wilayah Jawa Tengah. Pola pergerakan orang dan barang yang ada pada jaringan transportasi jalan dapat dikatakan untuk pergerakan eksternal berada pada jalur jaringan jalan provinsi dan untuk internal hampir diseluruh wilayah penghubung kecamatan. Khusus angkutan barang kebanyakan menggunakan jalur jaringan provinsi mengingat pergerakan angkutan barang ini lebih dominan untuk pergerakan antar wilayah eksternal kabupaten. Aksesibilitas di wilayah Kabupaten Boyolali masih kurang disebabkan kondisi jaringan jalan yang ada masih kurang memadai. Jalan nasional yang seharusnya dapat

memberikan aksesibilitas tinggi terjadi bottle neck yang mengurangi kinerja dari jaringan jalan yang ada.

b. Prediksi

Sampai dengan tahun 2025 diperkirakan jumlah kendaraan sepeda motor di Kabupaten Boyolali akan terus bertambah setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,56% per tahun. Meningkatnya jumlah kendaraan ini dikarenakan semakin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan pribadinya melalui sistem pembayaran yang mudah dalam hal pelayanan dan keringanan setoran pembayaran, serta belum optimalnya pelayanan transportasi umum di seluruh bagian wilayah Kabupaten Boyolali sehingga masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi. Dengan penambahan jumlah sepeda motor ini akan meningkatkan kepadatan lalu lintas di jalan utama Kabupaten Boyolali. Diperlukan pengaturan lalu lintas secara ketat untuk menghindari terjadinya kemacetan, terutama pada jam-jam padat.

Seiring semakin banyaknya jumlah kendaraan sepeda motor, jasa angkutan umum, terutama angkutan kota dan angkutan pedesaan di Kabupaten Boyolali diperkirakan semakin kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih sepeda motor yang lebih efisien, murah, cepat dan fleksibel untuk menuju tempat yang dituju. Selain sepeda motor, penurunan minat tersebut juga disebabkan oleh keberadaan taxi di Kabupaten Boyolali. Taxi mempermudah masyarakat menjangkau wilayah-wilayah tertentu secara mudah dan cepat. Dengan penurunan minat masyarakat terhadap angkutan kota dan angkutan desa, maka kedepan perlu dihindari penambahan trayek angkutan dan mengupayakan angkutan massal yang lebih menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.

Jumlah mobil pribadi di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan, walaupun kecil. Walaupun demikian, Angkutan Umum Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) diperkirakan masih tetap diminati oleh masyarakat karena jangkauan wilayahnya jauh. Jenis angkutan ini dipandang lebih memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Walaupun demikian kedepan perlu dilakukan perbaikan pelayanan agar keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin.

4. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Kondisi Saat Ini

Surat menyurat masih menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Boyolali dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 terjadi kecenderungan penurunan surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,01%. Dari tahun 1999 hingga tahun 2004 surat biasa yang dikirim meningkat dari sebanyak 315.541 buah menjadi 712.257 buah. Dalam kurun waktu yang sama (1999-2004) juga terjadi peningkatan jumlah surat kilat yang dikirim dari sebanyak

303.320 buah menjadi 432.784 buah. Secara total surat yang dikirim mengalami peningkatan dari 618.861 buah pada tahun 1999 menjadi 1.148.896 buah pada tahun 2004.

Jumlah surat yang diterima oleh kantor pos dan giro juga menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -8,63%. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 jumlah surat yang diterima meningkat dari sebanyak 817.134 buah menjadi 1.421.609 buah. Jumlah surat biasa yang diterima pada tahun 1999 sebanyak 494.794 buah, selanjutnya meningkat hingga tahun 2004 menjadi sebanyak 908.257 buah. Hal serupa juga terjadi untuk jenis surat kilat yang diterima, yaitu dari sebanyak 322.340 buah di tahun 1999 menjadi 513.257 buah di tahun 2004.

Semakin banyaknya sarana komunikasi yang lebih praktis menjadi salah satu sebab berkurangnya pemanfaatan surat. Penggunaan surat hanya sebatas pada keperluan tertentu yang sifatnya resmi, seperti keperluan dinas dan surat lamaran pekerjaan, bukan surat yang bersifat pribadi. Pesan/berita yang sifatnya pribadi kini lebih banyak menggunakan pemanfaatan handphone yang multi fungsi dengan tarif layanan yang sangat murah dan cepat. Melalui handphone akses informasi dapat tersampaikan dan dapat memperoleh umpan balik yang sangat cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Arus lalu lintas surat warkat pos dan kartu pos dalam negeri di Kabupaten Boyolali yang diposkan dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 1999 jumlah surat warkat pos dan kartu pos sebanyak 623.864 buah, selanjutnya terus menurun hingga pada tahun 2004 menjadi 145.041 buah. Sementara itu, untuk jumlah surat warkat pos dan kartu pos yang diterima justru cenderung menurun dari sebanyak 838.180 buah pada tahun 1999 menjadi 1.421.609 buah pada tahun 2001.

Berbeda dengan surat warkat pos dan kartu pos, pengiriman maupun penerimaan paket pos justru menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 1999 jumlah paket pos hanya sebanyak 2.824 buah, pada tahun selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 12.158 di tahun 2004. Jumlah paket pos yang diterima juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 5.610 buah di tahun 1999 menjadi sebanyak 12.569 buah di tahun 2004.

Masih tingginya penggunaan paket pos disebabkan oleh masih dirasakan manfaatnya jasa ini oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan mengantarkan secara langsung. Selain dapat menghemat biaya, pengguna jasa juga dapat menghemat tenaga. Bisnis pengiriman paket ini juga kini makin marak, tidak hanya dilakukan oleh PT Pos Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta. Selain dilakukan oleh perusahaan khusus pengiriman paket, jasa ini juga dilakukan oleh perusahaan travel yang dwi fungsi, yaitu jasa pengangkutan orang dan pengangkutan paket kiriman.

Penurunan arus lalu lintas surat menyurat di Kabupaten Boyolali disebabkan oleh penambahan jumlah saluran sambungan telepon yang masuk ke wilayah-wilayah perdesaan. Dalam kurun waktu 1999-2004 terjadi kecenderungan peningkatan jumlah saluran

sambungan telepon yang dipasang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,83%. Pada tahun 1999 jumlah saluran sambungan telepon hanya sebanyak 3.730 SST, pada tahun 2004 telah mencapai 5.025 SST. Peningkatan jumlah saluran sambungan telepon yang terpasang sangat nampak pada rumah tangga, yaitu dari sebanyak 3.456 SST di tahun 1999 menjadi 4.717 SST di tahun 2004. Jumlah saluran sambungan telepon yang terpasang pada perusahaan sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 tidak mengalami perubahan, yaitu 103 SST. Sementara itu, saluran sambungan telepon yang terpasang pada kantor/dinas cenderung meningkat dari sebanyak 171 kantor/dinas menjadi sebanyak 205 kantor/dinas.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pemanfaatan telepon umum dalam kurun waktu 1999-2004 menunjukkan penurunan. Jumlah sarana telepon umum kartu pada tahun 1999 sebanyak 14 buah, sampai dengan tahun 2004 menjadi 5 buah. Jumlah telepon umum coin dari tahun 1999 sampai tahun 2004 tetap, yaitu sebanyak 2 buah. Wartel pada tahun 2004 jumlahnya masih banyak, yaitu sejumlah 269 buah.

Pengetahuan masyarakat akan manfaat internet yang sangat luas menjadikan usaha ini semakin berkembang di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2004 warung internet mulai didirikan oleh masyarakat sebanyak 5 buah. Perkembangan radio dan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan setiap tahunnya juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,79% dan 12,43%. Radio dan televisi kini lebih cenderung menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pada tahun 1999 jumlah radio di Kabupaten Boyolali sebanyak 52.792 buah, selanjutnya terus meningkat menjadi 72.912 buah di tahun 2004. Televisi juga meningkat dari sebanyak 37.796 buah di tahun 1999, menjadi 77.073 buah di tahun 2004.

Teknologi komunikasi kini semakin berkembang dan mudah dijangkau oleh masyarakat, salah satu diantaranya handphone (HP). Perkembangan teknologi komunikasi ini menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga secara tidak langsung menguntungkan pengguna (masyarakat) terutama dari segi harga maupun fasilitas. Harga pulsa terendah juga saat ini semakin dapat dijangkau oleh masyarakat, baik berupa voucher maupun pulsa elektronik.

b. Prediksi

Hingga tahun 2025 diprediksikan penggunaan surat sebagai sarana komunikasi masyarakat di Kabupaten Boyolali akan semakin berkurang, baik surat yang dikirim maupun surat yang diterima. Surat saat ini telah banyak tergantikan oleh sarana telekomunikasi handphone dalam bentuk SMS (Short Message Service) yang sangat murah, praktis dan cepat. Secara bertahap diprediksikan jumlah surat yang dikirim maupun diterima kantor pos dan giro akan menurun. Penurunan jumlah surat yang dikirim maupun diterima tersebut terjadi baik pada jenis surat biasa maupun surat kilat.

Jumlah surat warkat pos dan kartu pos, baik yang dikirim maupun yang akan diterima juga diprediksikan akan terus mengalami penurunan seiring dengan semakin beragamnya alat

komunikasi yang berkembang di masyarakat dengan layanan yang makin beragam dan harga yang makin terjangkau. Sementara itu, jumlah paket, baik yang dikirim maupun yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Boyolali diperkirakan masih akan terus meningkat. Hal tersebut akan dapat diwujudkan apabila peningkatan layanan, terutama waktu tempuh pengiriman paket kiriman dapat lebih dipersingkat, sehingga masyarakat lebih diuntungkan.

Jumlah saluran sambungan telepon yang terpasang di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diprediksikan akan terus mengalami peningkatan. Sementara itu jumlah saluran sambungan telepon yang terpasang pada kantor/dinas hingga tahun 2025 tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Pemasangan saluran sambungan telepon pada perusahaan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah perusahaan. Hal ini sangat dimungkinkan apabila kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali semakin membaik. Sementara itu kebutuhan telepon rumah tangga diperkirakan hanya akan mengalami sedikit peningkatan, mengingat telepon rumah mulai tergantikan handphone.

Dalam kurun waktu hingga tahun 2025 diperkirakan perusahaan telekomunikasi saling berlomba untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung agar komunikasi dapat berjalan secara lancar, diantaranya tower telekomunikasi. Semakin banyak tower komunikasi yang didirikan, maka jangkauan wilayahnya akan semakin luas, sehingga jumlah masyarakat yang menggunakan jasa layanan perusahaan tersebut akan semakin bertambah dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi, peningkatan teknologi komunikasi juga perlu diawasi karena masyarakat akan dapat mudah mengakses berbagai informasi baik positif maupun negatif. Informasi yang bersifat positif akan dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, namun informasi yang bersifat negatif akan merusak moral dan etika dalam masyarakat. Masih lemahnya pengawasan dalam bidang komunikasi dan informatika juga dipengaruhi oleh lemahnya regulasi yang ada khususnya yang terkait dengan bidang komunikasi.

2.7 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Politik dan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Kondisi Saat Ini

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian produk-produk dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya berbasis data yang bersifat komprehensif. Perencanaan pembangunan yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat, berupa data statistik, hasil monitoring, hasil evaluasi, hasil pengawasan, hasil validasi maupun hasil studi/penelitian. Data dan informasi yang akurat sangat membantu dalam mempertajam prediksi atau perkiraan keadaan di masa mendatang.

Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

semakin baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun demikian validitas data masih harus ditingkatkan agar dapat memberikan informasi obyektif terhadap kondisi maupun prestasi pembangunan yang telah dicapai. Berbagai data dan informasi telah disediakan oleh Bappeda, antara lain Sistem Informasi Profil Daerah, Buku Kabupaten Boyolali dalam Angka, buku Dokumen Evaluasi Kegiatan atau Proyek yang telah disusun oleh Bappeda dan berbagai dokumen yang menggambarkan profil masing-masing urusan kewenangan Kabupaten.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali telah memasukkan unsur partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder pada masing-masing urusan, dari pemerintah kabupaten Boyolali yang diwakili SKPD, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, dan asosiasi profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

Dalam rangka percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan, Kabupaten Boyolali telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Karanganyar dan Kota Surakarta. Salah satunya kerjasama untuk mengembangkan asset pariwisata dan sumberdaya alam yang dimiliki. Kabupaten Boyolali menjadi bagian dari kerjasama regional meliputi Subosukawanasraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten), yang dalam perkembangannya kerjasama tersebut ditingkatkan ke dalam sebuah perusahaan yang berfungsi mempromosikan potensi yang ada di ke kabupaten/kota tersebut. Perusahaan tersebut bernama PT. Solo Raya. Modal perusahaan tersebut berasal dari kontribusi masing-masing kabupaten/kota.

Untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil pembangunan, Kabupaten Boyolali juga menerapkan kebijakan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Dengan tersusunnya RPJP Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 ini, menjadikan penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali berkesinambungan. Penyusunan dokumen RPJMD tahun 2011–2015 berpedoman pada tahap RPJPD tahap kedua, RPJMD tahun 2016–2020 berpedoman pada RPJP tahap ketiga dan RPJMD tahun 2021 – 2025 berpedoman pada RPJP tahap keempat.

b. Prediksi

Sistem perencanaan pembangunan nasional hingga tahun 2025 diperkirakan akan mengalami perbaikan dan kemungkinan akan ada perubahan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan. Ketersediaan data bagi keperluan perencanaan pembangunan juga akan semakin baik, sehingga memudahkan penyusunan rencana pembangunan daerah. Kemampuan aparat pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan juga akan semakin baik, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan meningkat kualitasnya. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diperkirakan akan semakin meningkat, bersamaan semakin menguatnya amanat undang-undang untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, semakin membaiknya iklim demokrasi di Indonesia.

Hingga tahun 2025 diperkirakan koordinasi antar pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kabupaten dalam perencanaan pembangunan semakin intensif. Dengan koordnasi yang semakin membaik tersebut, diperkirakan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan provinsi dapat terwujud. Demikian pula konsistensi antara dokumen perencanaan daerah jangka panjang dengan jangka menengah dan jangka pendek serta dokumen perencanaan pada masing-masing SKPD.

Kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan diperkirakan akan semakin meningkat. Walaupun demikian, kerjasama ini masih akan menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, karena peraturan perundangan yang ada saat ini belum memungkinkan adanya pengelolaan keuangan secara bersama-sama dalam pengembangan wilayah perbatasan. Kerjasama antar daerah hanya dapat dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan yang mengarah pada pengembangan wilayah strategis.

2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kondisi Saat Ini

Perkembangan demokratisasi di daerah sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2000 menunjukkan perkembangan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan pejabat politik secara langsung baik melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Sejak Masa Reformasi telah terselenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil serta penyelenggaraannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen, yaitu pada tahun 1999 dan 2004. Demikian pula dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Boyolali tahun 2004 terlaksana dengan baik.

Jumlah partai politik di Kabupaten Boyolali meningkat cukup besar pada Pemilu tahun 2004 menjadi sebanyak 24 parpol. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004 cukup baik, namun sosialisasi dan pendidikan politik perlu mendapatkan perhatian, terutama

bagi kelompok pemilih pemula dan pemilih perempuan. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik, hak dan kewajiban warga negara serta mendorong tumbuhnya keterwakilan politik bagi perempuan sebesar 30%.

Dari sebanyak 24 parpol peserta Pemilu, terdapat sebanyak 9 parpol yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali sebanyak 45 orang. Terdapat tiga partai politik dengan pendukung besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 12 orang wakil; Partai Golongan Karya (Golkar) sejumlah 10 orang wakil; dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 8 orang wakil. Dalam pembangunan politik di daerah di masa mendatang, perlu ditingkatkan adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara, peningkatan kualitas partai politik, peningkatan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, keterwakilan politik, pengawasan dan peningkatan kualitas penganggaran di daerah.

Hal lain yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah pendidikan politik yang kurang, dan menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat baik dalam pelaksanaan Pemilu, Pilkada, maupun Pemilihan Presiden. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 masih tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 82,90% (569.574 pemilih dari 687.063 orang yang memiliki hak pilih) dan 77,14% (547.423 pemilih dari 711.291 orang yang memiliki hak pilih). Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan, terutama terkait pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, pemahaman hukum dan hak asasi manusia, keterwakilan perempuan dalam politik dan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Pengembangan kelembagaan dalam pembangunan daerah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, terutama peningkatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) berdasarkan profesi, Ormas berdasarkan agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada tahun 2004 jumlah Ormas profesi sebanyak 60 buah, Ormas keagamaan sebanyak 15 buah, sedangkan jumlah LSM hanya sebanyak 40 buah.

Meningkatnya jumlah Ormas berdasarkan pada profesi meningkat cukup baik, terutama semakin berkembangnya kelembagaan dalam masyarakat yang berbasis pada ikatan kepentingan dan profesi, seperti Kadinda, IDI, Korpri, PGRI, Dharma Wanita dan lain-lain. Ormas berdasarkan keagamaan lebih banyak terdiri dari organisasi keagamaan yang berbasis Agama Islam, seperti NU, Fatayat, Muhammadiyah, Aisyiyah, KWI dan PGI dan lain-lain. Meningkatnya jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama terkait dengan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan demokratisasi di daerah.

Dalam bidang kesatuan bangsa, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pentingnya peningkatan persatuan dan kesatuan serta pendidikan kewargaan (civic education) agar pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara.

Dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat di Kabupaten Boyolali dapat dikatakan cukup baik. Kasus pidana dalam kurun waktu tahun

1999-2004 cenderung mengalami peningkatan dari sebanyak 172 perkara (1999) menjadi 291 perkara (2004), sedangkan kasus perdata cenderung menurun dari 54 perkara (1999) menjadi 39 perkara (2004). Dari jumlah perkara tersebut, yang terselesaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 87,62% untuk perkara pidana, dan 63,82% untuk perkara perdata. Kejadian kriminalitas sebagian besar berupa pencurian dan perampokan, sebagian kecil lainnya berupa kasus pembunuhan.

Upaya pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia terutama upaya peningkatan kesadaran hukum dan tertib hukum dalam masyarakat. Permasalahan penegakkan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha sangat terkait dengan peningkatan daya saing daerah dan peningkatan penanaman modal di daerah. Masalah persengketaan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu masalah penting dalam pembangunan hukum di daerah, terutama menumbuhkan hubungan industrial dan perlindungan sosial lainnya. Disamping itu, diperlukan pula penegakkan peraturan perundangan di daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, misalnya IMB, Pajak Reklame, Retribusi, Persampahan dan pengaturan sektor informal.

Wilayah Kabupaten Boyolali memiliki potensi bencana alam, baik gunung berapi dan tanah longsor, banjir dan kekeringan terutama di wilayah lereng Merapi dan dataran tinggi lainnya. Bencana kekeringan berpotensi juga terjadi di wilayah bagian Utara Kabupaten Boyolali. Kejadian bencana alam di Kabupaten Boyolali paling banyak terjadi disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi dan tanah longsor. Upaya pencegahan dini perlu dilakukan dengan melakukan persiapan dan pemberdayaan bagi masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Kesiapan pemerintah Kabupaten Boyolali dan masyarakat dalam mitigasi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana untuk menghindarkan kerugian material dan korban jiwa.

b. Prediksi

Tatanan kehidupan sosial politik di masa mendatang menunjukkan perkembangan demokratisasi di daerah semakin baik, meningkatnya partisipasi politik dan tuntutan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Perubahan sosial yang bersifat dinamis di era globalisasi menuntut adanya kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat secara swadaya melalui penegakkan hukum dan HAM. Dimasa mendatang pentingnya pendidikan kewargaan (civic education) menjadi bagian penting dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, peningkatan rasa nasionalisme dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Diperkirakan sampai dengan tahun 2025 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Resiko bencana telah tersusun, sehingga dapat mendorong tumbuhnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, teknis dan sosial. Meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat akan resiko bencana, baik tanah longsor, gunung berapi, kekeringan dan bencana sosial lainnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut, akan dapat mengurangi resiko bencana, baik korban jiwa dan kerugian harta benda akibat bencana.

Peningkatan kesadaran tentang resiko bencana dan penanggulangan akibat bencana dilakukan melalui pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sehingga tanggap bencana menjadi kecakapan hidup (lifeskills) masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam menjadi sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali.

3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Kondisi Saat Ini

1) Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan tugas yang diamanahkan dalam Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepada kabupaten dari pemerintah pusat yaitu sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam menangani 34 urusan tersebut. Kemampuan pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah tersebut. Penyelenggaraan urusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Seiring dengan semakin luasnya kewenangan daerah dalam otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik telah disusun peraturan daerah berupa keputusan Bupati dan Peraturan Bupati. Sejak tahun 1999 – 2004 telah tersusun peraturan daerah sebanyak 82 buah, dan peraturan bupati sebanyak 19 buah.

2) Pemerintahan Umum

Tata pemerintahan umum di Kabupaten Boyolali dilaksanakan pada 19 kecamatan dan 267 desa/kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan mendasarkan pada prinsip–prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik menuju perwujudan good governance.

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membentuk pelayanan perijinan dalam bentuk pelayanan satu atap satu pintu. Selain itu berbagai pelayanan publik di bidang yang lain juga sudah dioptimalkan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain administrasi kependudukan, pelayanan air bersih, pelayanan persampahan dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Boyolali kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelayanan publik adalah terbatasnya peralatan dan prasarana yang ada. Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan belum dapat dilakukan secara optimal.

3) Keuangan Daerah

Sejak tahun 2000-2004 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari sebanyak Rp 11.369.439.214,00 menjadi Rp 36.970.682.463,00 pada tahun 2004. PAD Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2000-2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,76%. Namun demikian "kualitas" PAD tersebut sebenarnya terletak pada proporsi PAD tersebut terhadap APBD tahun yang bersangkutan. Apabila dilihat proporsinya, ternyata pertumbuhan PAD yang relatif besar tidak cukup berarti apabila dibandingkan dengan jumlah APBD. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar antara 6% – 11% saja selama tahun 2000-2004.

Sumber pendapatan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap APBD pada kurun waktu tahun 2000-2004 adalah retribusi daerah, yaitu pada kisaran 61,59% - 73,36%. Pajak daerah hanya memberikan kontribusi sekitar 15,31% hingga 19,59%. Lain-lain pendapatan daerah berkontribusi sebesar 9,47% hingga 18,49%, sedangkan laba usaha daerah kontribusinya hanya sebanyak 1,03% hingga 1,86%.

Pos PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah pos retribusi daerah. Pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan kinerjanya. Intensifikasi terhadap pajak daerah yang sudah ada perlu dilakukan. Melalui intensifikasi pajak daerah diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Laba usaha daerah merupakan sumber yang cukup potensial. Kontribusi usaha daerah pada tahun 2004 cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa usaha daerah dapat dikembangkan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Usaha daerah juga potensial untuk dikembangkan ke usaha-usaha lain yang cukup banyak mendatangkan keuntungan. Sementara itu untuk retribusi daerah perlu ditingkatkan intensifikasinya sehingga mendatangkan pendapatan yang lebih besar lagi.

4) Aparatur Daerah

Aparatur daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pelaksana semua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui aparatur daerah semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini penyelenggaraan urusan di kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 6 Badan, 11 Dinas, 4 Kantor, 9 Bagian di Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, dan 1 Inspektorat.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur daerah perlu disusun setandar pelayanan minimal (SPM) agar masing-masing urusan dapat dilaksanakan secara maksimal. Apabila kinerja minimal urusan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilakukan, maka diharapkan pencapaian tujuan daerah yang terumuskan pada visi dan misi dapat dicapai. Saat ini belum semua SKPD pengampu urusan wajib di Kabupaten Boyolali memiliki rumusan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5) Kepegawaian

Sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 12.120 orang, terdiri dari 7.316 laki-laki dan 4.804 perempuan. Jumlah PNS menunjukkan peningkatan dari sebanyak 12.080 orang di tahun 2003. Apabila dilihat dari golongan pegawai, pada tahun 2004 sebagian besar berada pada golongan III (54,66%). Pegawai dengan golongan IV jumlahnya juga cukup banyak (26,81%), pada tahun-tahun mendatang akan mengisi jabatan struktural dan fungsional.

Kualitas PNS terlihat dari peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan, dari SMA dan diploma menjadi S1 dan S2. Persentase PNS yang berpendidikan S1 pada tahun 2004 sebesar 23,94%, sedangkan PNS yang berpendidikan S2 baru mencapai 0,78%. Sementara itu persentase PNS yang berpendidikan dasar, menengah dan diploma pada tahun 2004 berturut-turut hanya sebesar 3,96% (SD), 4,74% (SMP), 29,99% (SMA), dan 36,46% (diploma).

6) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur dari organisasi baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Boyolali dalam tahun 2000 sampai dengan 2004 telah melakukan pemeriksaan baik reguler maupun kasus terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tahun 2000-2003 pemeriksanaan reguler mencakup sebanyak 124 SKPD, sedangkan tahun 2004 mencakup 120 SKPD. Jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2004 sebanyak 17 kasus. Selain pemeriksaan, inspektorat juga melakukan monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan

kepada obyek. Pada tahun 2000-2004 monitoring dilakukan sebanyak 150 kali setiap tahun. .

7) Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal antara pemerintah pusat dengan provinsi dan provinsi dengan kabupaten/kota. Kabupaten Boyolali sudah memiliki Sub bagian Protokol dan Santel yang merupakan bagian dari Bagian Humas Informatika dan Protokol. Subag ini merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas pemerintah. Persandian ini belum optimal karena sistem persandian belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga persandian masih dianggap sebagai sarana komunikasi biasa.

b. Prediksi

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan semakin baik. Pelaporan dan koordinasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperkirakan akan semakin baik. Namun demikian pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Boyolali sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki daerah. Kedepan peraturan tentang otonomi daerah/kabupaten Kota diperkirakan akan semakin sempurna dan dimungkinkan terjadinya perubahan, sehingga perlu diantisipasi dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan pemerintahan umum hingga tahun 2025 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan tingginya tuntutan akan good governance, semakin baiknya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar pelayanan minimal sudah menjadi acuan utama bagi SKPD dalam menyelenggarakan pemerintan umum. Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membentuk pelayanan perijinan dalam bentuk pelayanan satu atap satu pintu. Dalam rangka pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, pelayanan perijinan dalam bentuk pelayanan satu atap satu pintu akan semakin optimal. Selain itu, akan terjadi perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, berupa renovasi teknologi dan informasi dalam bentuk e-government, e-procurement, e-bussiness dan cyber law.

Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali diprediksikan akan mengalami peningkatan pendapatan daerah, karena ditunjang dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun demikian, proporsi PAD terhadap APBD diperkirakan masih rendah. Hal ini disebabkan sumber utama PAD yang memiliki kontribusi besar (>60%) hanya retribusi daerah, sementara kontribusi pajak, laba perusahaan maupun lain-lain pendapatan yang sah

hanya berkontribusi kecil. Oleh karena itu, untuk keperluan belanja pembangunan daerah, Kabupaten Boyolali memerlukan dana perimbangan pusat dan provinsi yang cukup besar.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, diharapkan tidak hanya bersumber dari retribusi daerah saja, namun diharapkan merata pada semua pos pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan eksensifikasi pada semua sumber pendapatan. Proporsi masing-masing sumber pendapatan cenderung fluktuatif terhadap total PAD. Pendapatan daerah yang bersumber dari laba usaha daerah diprediksikan semakin besar kontribusinya. Hal tersebut diakibatkan oleh semakin baiknya manajemen usaha dan semakin baiknya kondisi ekonomi daerah. Diperkirakan akan ada kebijakan pembenahan usaha daerah, sehingga menghasilkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan daerah diperkirakan mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya sumber pendapatan daerah. Dengan bertambahnya pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan. Dengan demikian pembangunan daerah diharapkan akan semakin meningkat sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan perangkat daerah, hingga tahun 2025 diprediksikan akan terjadi perubahan mindset aparatur birokrasi dari sebagai pamong praja menjadi pelayan publik melalui reformasi struktur birokrasi, kultur, strategi, dan sistem akuntabilitas. Kinerja aparatur daerah diperkirakan semakin baik dengan semakin tertatanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Boyolali. Kinerja aparatur daerah juga akan semakin efektif dan efisien. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan daerah semakin diperhatikan dan diupayakan untuk dicapai, agar dapat memberikan kepastian dan jaminan pelayanan. Integrasi SPM ke dalam perencanaan pembangunan sudah dilakukan dengan baik, sehingga pencapaian indikator SPM akan terkendali.

Hingga tahun 2025 kualitas PNS diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan peningkatan kualitas dan karier pegawai yang semakin baik. Kemampuan PNS dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas juga akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan PNS sebagian besar Sarjana (S1), namun PNS yang berpendidikan SLTA atau SMK masih dibutuhkan walaupun sifatnya terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan semakin baik secara intensif dan terus menerus. Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Boyolali akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing SKPD. Dalam kurun waktu tersebut, diperkirakan pemeriksaan reguler sebanyak 1.885 obyek pemeriksaan, dan pemeriksaan aduan masyarakat baik melalui SMS kepada Bupati Boyolali maupun melalui surat yang ditujukan kepada Bupati ataupun dikirim secara langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Boyolali diprediksikan mencapai 590 kasus. Perbaikan

pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2025 diperkirakan pelaksanaan persandian di Kabupaten Boyolali akan semakin optimal, seiring dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya persandian dalam menunjang tugas pemerintah. Penyelenggaraan sistem persandian yang lebih baik tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi.

5. Urusan Statistik

a. Kondisi Saat Ini

Statistik memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan kebijakan pembangunan, karena terkait dengan pengelolaan dan penyajian data sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Informasi dan data statistik dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. Statistik ini diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah; mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

Penyediaan statistik di Kabupaten Boyolali berdasarkan kegunaannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali melalui metode sensus, survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya. Dalam penyelenggaraan statistik, selama ini BPS melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 BPS Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan penyusunan buku statistik, antara lain Kabupaten Boyolali Dalam Angka, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, dan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atau instansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadu dan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistik tersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen statistik daerah Kabupaten Boyolali diprediksikan akan semakin beragam jenisnya. Sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 pasal 152 ayat (1) dan (2) data statistik yang perlu disediakan meliputi (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah; (7)

kependudukan; (8) informasi dasar kewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menunjang hal tersebut perlu dikembangkan berbagai produk-produk statistik lain untuk melengkapi dokumen statistik yang telah ada. Data-data statistik yang lebih banyak masih sebatas informasi perlu dikembangkan agar dapat menyajikan indikator-indikator kunci keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, seluruh stakeholder terkait lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk keperluan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Statistik sektoral telah banyak diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah daerah, diantaranya dalam bentuk profil pendidikan, profil kesehatan, statistik perikanan dan peternakan, neraca lingkungan hidup, statistik pertanian, statistik industri dan sebagainya. Namun demikian masih banyak instansi pemerintah daerah yang belum menyelenggarakan statistik sektoral secara baik, seperti statistik ketenagakerjaan, statistik sosial, statistik pariwisata. Apabila dokumen statistik pada masing-masing sektor ini telah terintegrasi secara baik, akan mempermudah perencanaan pembangunan menggunakan data dan informasi yang akurat.

Akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik di Kabupaten Boyolali masih terbatas. Belum adanya perpustakaan khusus statistik yang dikelola BPS Kabupaten Boyolali masih menjadi hambatan bagi masyarakat luas untuk memperoleh data dan informasi secara jelas. Saat ini pelayanan data statistik hanya dilayani di Kantor BPS Kabupaten Boyolali. Masyarakat sebetulnya dapat mengakses dokumen statistik di kantor BPS tersebut, namun hal ini belum terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat dari statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka penyebaran informasi pelayanan statistik perlu terus dilakukan.

b. Prediksi

Perkembangan dokumen dan data-data statistik daerah dalam jangka waktu hingga tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data dan dokumen statistik. Manajemen penyimpanan data juga diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan dan instansi pemerintah daerah. Penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual, tapi juga dalam bentuk data digital, sehingga mempermudah proses pengolahan. Dengan kemajuan tersebut, diperkirakan tingkat validitas data akan semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data perencanaan pembangunan yang berkualitas. Jenis dokumen statistik yang tersusun di Kabupaten Boyolali diperkirakan juga akan semakin bervariasi, sesuai dengan keperluan pada masing-masing sektor pembangunan.

6. Urusan Kearsipan

a. Kondisi Saat Ini

Keberadaan arsip sangatlah penting, karena dokumen-dokumen arsip tersebut menyajikan hasil pelaksanaan pembangunan daerah pada kurun waktu tertentu dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Pada suatu ketika dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu. Arsip juga dapat digunakan untuk mereview sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dicapai.

Untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Boyolali, maka dibutuhkan pengelolaan kearsipan yang baik, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah penyimpanan dokumen-dokumen daerah akan mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu penyelenggaraan kearsipan diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap keamanan, kerahasiaan dan keaslian dari dokumen/arsip daerah. Dengan demikian, dokumen/arsip daerah tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah yang tepat.

Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Boyolali diantaranya dilakukan melalui akuisisi arsip, pengolahan arsip, dan penataan arsip. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 jumlah arsip tekstual yang terkelola secara rutin mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 23,15% per tahun. Dari sebanyak 1.000 bungkus pada tahun 1999 dan menjadi 4.000 bungkus di tahun 2004. Pemeliharaan arsip juga dilakukan melalui kamperisasi arsip, fumigasi arsip dan thermit control.

Dalam rangka peningkatan penataan arsip daerah, dilakukan sosialisasi tentang pemasyarakatan arsip dan penyadaran pentingnya pengelolaan dokumen/arsip daerah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Telah dilaksanakan pula pembinaan tentang kearsipan pada unit satuan kerja, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, bahkan pada instansi swasta yang ada di Kabupaten Boyolali. Untuk mengetahui jumlah arsip yang aktif tertata di unit satuan kerja juga telah dilaksanakan kegiatan akuisisi arsip satuan kerja.

Untuk mendukung penataan arsip yang lebih baik, maka diperlukan kesadaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memelihara berbagai dokumen arsip daerah. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penataan arsip di Kabupaten Boyolali antara lain pelatihan/diklat tentang arsip, pemantauan dan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan, sosialisasi kearsipan, pameran arsip.

Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan kearsipan yang baik di Kabupaten Boyolali perlu didukung dengan pengembangan sistem kearsipan dan penyusunan pedoman pengelolaan arsip dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, atau Keputusan Kepala Badan, juga konsep pengelolaan kearsipan dan modul diklat manajemen arsip dinamis. Untuk mempermudah, diperlukan pula pengembangan otomasi kearsipan.

Untuk menciptakan pengelolaan arsip daerah yang baik tentunya memerlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Tentunya dengan disertai kesadaran dan ketaatan

terhadap mekanisme pengelolaan arsip daerah yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan yang baik tersebut diharapkan keamanan, kerahasiaan dan keaslian dari dokumen/arsip daerah dapat terjaga, sehingga pada suatu saat apabila diperlukan arsip tersebut dapat digunakan kembali.

b. Prediksi

Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 diperkirakan akan terlaksana dengan baik. Jumlah arsip tekstual yang tersimpan dengan baik akan mengalami peningkatan. Arsip tekstual tersebut juga dalam pengelolaannya melalui tahapan akuisisi secara rutin dan pemeliharaan kearsipan melalui penataan arsip. Jumlah arsip tekstual yang tersimpan dan terkelola secara baik secara bertahap sampai dengan tahun 2025 diperkirakan meningkat. Selain arsip tekstual, pengelolaan arsip juga akan diperkirakan akan mencakup jenis arsip non tekstual, seperti kartografi, foto, VCD, kaset rekaman suara, slide dan sebagainya.

Pemeliharaan kearsipan tekstual di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2025 secara bertahap diperkirakan akan beragam bentuknya tidak hanya penataan arsip, tetapi juga kamperisasi arsip, labelisasi arsip, fumigasi dan thermit control. Pemeliharaan arsip di Kabupaten Boyolali diperkirakan lebih luas, tidak hanya perawatan arsip tekstual saja, namun juga arsip non tekstual. Perawatan arsip non tekstual tersebut meliputi pemutaran/cek fisik arsip film, pembersihan arsip film, pembersihan arsip foto, pembersihan arsip video, dan cek fisik/informasi arsip rekaman suara kaset.

Pelestarian arsip sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Boyolali juga diperkirakan akan mengalami kemajuan, baik arsip tekstual maupun arsip non tekstual. Pelestarian arsip tekstual antara lain dilakukan melalui laminasi arsip dan pelestarian informasi sejarah. Sementara itu arsip non tekstual dilestarikan melalui alih media arsip film ke video, alih media arsip kertas ke micro film, alih media video umatic ke video VHS/VCD, alih media foto ke digital, dan reproduksi arsip foto.

2.8 Gambaran Penyelenggaraan Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

1. Urusan Lingkungan Hidup

a. Kondisi Saat Ini

Pada tahun 2004 jumlah produksi sampah di Kabupaten Boyolali mencapai 80,00 m³/hari. Persentase sampah yang terangkut mengalami peningkatan dari tahun 2001 (89,99%) sampai dengan tahun 2003 (91,67%), namun menurun pada tahun 2004 (87,50%). Kemampuan daya angkut sampah yang masih lebih rendah daripada volume yang diproduksi menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kemampuan pengangkutan.

Dilihat dari komposisinya, sampah di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 menurut data Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan sebagian besar adalah sampah organik (75,0%), selanjutnya sampah plastik (14,0%), sampah kayu (4,0%), sampah gelas/kaca (1%), sampah kertas (0,5%), sampah kain (0,5%), sampah karet/kulit (0,5%), sampah metal/logam (0,5%) dan sampah lain-lain (4,0%). Jumlah sampah organik yang cukup tinggi tersebut dapat dimungkinkan melalui pengolahan menjadi pupuk organik, sehingga dapat memberikan nilai tambah tersendiri. Jumlah sampah plastik yang mencapai 14,0% perlu menjadi perhatian dalam penanganannya, karena sifatnya tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme.

Selama tahun 2001-2004 pengumpulan sampah di Kabupaten Boyolali dilakukan menggunakan truk sampah, arm rol/truk container, container, gerobag sampah, truk tinja, dan transfer depo. Sarana persampahan lainnya antara lain TPS, TPA dan instalasi pengolahan limbah tinja. Diantara sekian banyak sarana persampahan tersebut, TPS merupakan sarana yang banyak digunakan dari tahun ketahun, yaitu mencapai 58 buah pada tahun 2004.

Sampai tahun 2004 dari sebanyak 635 sumber air di hutan lindung, yang telah dilakukan perlindungan baru mencapai 70%. Sementara itu, kawasan daerah tangkapan air luasnya mencapai 15.465,20 ha sesuai Perda Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014. Luas daerah tangkapan air tersebut secara eksis sama dengan luas kawasan lindung, namun perlindungan daerah tangkapan air ini bukan hal yang mudah, mengingat sebagian besar kawasan tersebut telah menjadi hak milik masyarakat, sehingga pengelolaannya mesti berkaitan dengan kepentingan rakyat, kecuali pemerintah mampu mengambil alih kepemilikan tanahnya. Berkurangnya fungsi daerah tangkapan air akan mengurangi volume air yang mampu ditangkap atau diresapkan ke dalam tanah sehingga mengurangi cadangan air tanah yang berdampak berkurangnya debit sumber air. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjaga daerah tangkapan air, terutama masalah erosi tanah yang dapat menyebabkan sedimentasi dan penurunan volume air tangkapan.

Dampak dari pemakaian air untuk aktivitas domestik di Kabupaten Boyolali adalah air limbah. Apabila tidak dilakukan penanganan dengan baik akan berakibat pencemaran pada sungai, yaitu menurunnya kualitas air pada badan air. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan terhadap industri baik industri besar, menengah maupun kecil dalam mengolah air limbah. Penentuan adanya kajian lingkungan (AMDAL, UKL, UPL dan SPPL) merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menghindari adanya permasalahan lingkungan, baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Perlindungan pencemaran air masih terkendala oleh masih banyaknya usaha-usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari badan air dan masih banyak usaha yang belum memiliki persyaratan administrasi dan teknis dalam pengendalian pencemaran air. Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih perlu ditingkatkan, tentunya harus disertai tindak lanjut yang nyata atas laporan dari masyarakat. Selama ini laporan masyarakat tentang

pencemaran telah ditindaklanjuti melalui aksi yang nyata untuk menangani dan mencegah bertambahnya pencemaran lingkungan yang lebih besar. Dengan semakin meningkatnya kasus pencemaran yang bersumber dari aduan masyarakat menunjukkan semakin tinggi peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Kondisi Udara di Kabupaten Boyolali ditentukan oleh kegiatan/aktifitas yang ada. Salah satunya adalah dengan berkembangnya industri-industri baik industri kecil dan menengah. Di Kabupaten sendiri memiliki \pm 30 industri sedang yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya pencemaran udara. Dari beberapa macam komponen pencemar udara yang saling banyak berpengaruh dalam pencemar udara adalah karbon monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Belerang Oksida (SOx), Hidro Karbon (HC), dan partikel. Namun komponen pencemar yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah partikel-partikel, NOx, SOx, Hidro Karbon, dan Karbon Monoksida.

Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2004, kadar NO₂ pada udara di Kabupaten Boyolali masih dibawah ambang batas baku mutu udara. Jumlah kadar NO₂ secara keseluruhan masih di bawah ambang batas, hanya lokasi di ruang produksi PT. Safari pada tahun 2004 yang melebihi ambang batas yaitu sebesar 72,16 $\mu\text{g}/\text{nm}^3$ dengan ambang batas sebesar 5 $\mu\text{g}/\text{nm}^3$. Kandungan Ox pada tahun 2004 besarnya secara keseluruhan masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara. Berdasarkan hasil pengamatan, kandungan SO₂ pada tahun 2004 tergolong tinggi walaupun masih dibawah ambang batas. Pada beberapa titik pengukuran kandungan SO₂ mendekati ambang batas (632 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$), seperti di Pasar Boyolali (587,52 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$) dan Terminal Boyolali (586,47 $\mu\text{g}/\text{NM}^3$). Walaupun demikian, pada tahun 2004 secara umum kandungan SO₂ masih jauh lebih rendah dibandingkan ambang batas baku mutu udara.

Secara umum kondisi udara ambien di kabupaten Boyolali pada tahun 2004 masih dibawah ambang batas, kecuali di PT. Hanil Indonesia yang memiliki kondisi udara ambien melebihi ambang batas. Untuk itu perlu dicermati kemungkinan adanya pertambahan konsentrasi ambien pada tahun-tahun mendatang pada lokasi-lokasi lainnya.

Pencemaran udara seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri berpotensi menimbulkan permasalahan di Kabupaten Boyolali apabila tidak ditangani dengan baik. Pada tahun 2004 dari sebanyak 2 usaha yang menjadi sumber pencemaran udara tidak bergerak, semuanya telah dilengkapi dengan sarana teknis pengendalian pencemaran udara.

Untuk mencegah pencemaran udara pada titik-titik tertentu perlu dikembangkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota untuk mengurangi senyawa-senyawa pencemar udara. Pada tahun 2004 dari sebanyak 4 kawasan industri yang ada di Kabupaten Boyolali, 75% diantaranya telah memiliki ruang terbuka hijau seluas 10%. Kawasan padat lalu lintas baru dan lokasi pemukiman masing-masing hanya ada 1 lokasi yang telah dilengkapi RTH seluas 10%, sedangkan dari 3 lokasi pusat perdagangan, baru 33% yang telah dilengkapi RTH seluas 10%.

b. Prediksi

Semakin banyaknya jumlah penduduk dengan berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan di berbagai sektor dan budaya konsumtifnya, maka prediksi ke depan kondisi lingkungan hidup sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Jumlah timbunan sampah akan terus mengalami peningkatan terutama di kawasan perkotaan, kawasan permukiman, dan kawasan usaha dan atau kegiatan. Timbulan sampah akan menjadi permasalahan besar jika tidak dikelola dengan baik, seperti penurunan estetika lingkungan, timbulnya bau tidak sedap, dan timbulnya hewan vektor penyakit.
- 2) Masih banyaknya usaha dan atau kegiatan yang belum mengelola limbah cair dengan baik dan masih ditambah dengan prediksi berkembangnya jumlah industri maka kondisi kualitas air sungai cenderung menurun. Disamping itu permasalahan pengelolaan limbah cair untuk usaha dan atau kegiatan mikro kecil yang biasanya tersentra pada permukiman dengan keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan limbah akan mengancam kualitas lingkungan permukiman.
- 3) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan usaha dan atau kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batubara) akan menyebabkan potensi pencemaran udara akan meningkat.
- 4) Peningkatan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik, steroform, pestisida, dan bahan berbahaya lainnya akan terus berlanjut maka pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara akan semakin meningkat sehingga munculnya penyakit akibat pencemaran tersebut akan semakin banyak pula.
- 5) Pengelolaan daerah tangkapan air (catchment area) dan resapan air (recharge area) pada kawasan hutan lindung terutama kawasan merapi merbabu, kawasan hutan produksi, dan kawasan budidaya produksi biomassa lainnya belum membaik, maka diprediksi permasalahan keterbatasan sumber daya air akan tetap menjadi permasalahan penting.
- 6) Peningkatan pembangunan yang memanfaatkan ruang yang mengkonversi lahan pertanian menjadi non pertanian akan menyebabkan pengurangan ruang terbuka hijau dan penurunan daya resap air ke tanah.
- 7) Akibat pemanasan global dengan perubahan iklimnya akan menyebabkan potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir akan cenderung meningkat intensitasnya.

2. Urusan Kehutanan

a. Kondisi Saat Ini

Pembangunan kehutanan di Kabupaten Boyolali, terutama dari aspek konservasi dan pengembangan hutan rakyat cukup menggembirakan. Bila di Kabupaten-kabupaten lain luas

hutan produksi banyak yang menurun, di Kabupaten Boyolali justru meningkat dari 14.455 ha di tahun 2003 menjadi 14.553 pada tahun 2004. Luas hutan rakyat pada tahun 2004 sebanyak 14.539 ha, terutama dari jenis hutan campuran. Luas lahan kritis dan lahan reboisasi pada tahun 2003 dan tahun 2004 tetap, yaitu berturut-turut 9.997 ha dan 840 ha. Namun luas lahan penghijauan menurun, yaitu dari sebanyak 2.905 ha menjadi 1.670 ha. Kelestarian hutan sangat rawan dengan pengrusakan dan kebakaran hutan sehingga diperlukan upaya pencegahan dalam rangka penyelamatan hutan.

Perkembangan produk-produk hasil hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat di Kabupaten Boyolali cukup menggembirakan. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 terjadi peningkatan produksi kayu hutan telaga juwangi yang meliputi kayu jati, kayu rimba dan kayu lainnya dari sebanyak 1.704 m³ menjadi 3.379 m³. Volume kayu yang terjual memang mengalami fluktuasi, namun kelas kayu yang terjual semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tata nilai penjualan produk hasil hutan semakin meningkat, pada volume pengambilan yang semakin rendah. Untuk produk-produk hutan rakyat, pembinaan yang lebih intensif perlu dilakukan guna mengangkat tata nilai ekonomi dan konservasi hutan rakyat ini. Budaya ekonomi produk-produk hutan telah tumbuh di Kabupaten Boyolali, dengan relung-relung ekologi usaha yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Sehingga, upaya pengembangannya tidak akan menghadapi masalah-masalah teknis yang berarti.

b. Prediksi

Pembangunan bidang kehutanan di Kabupaten Boyolali kedepan menghadapi ancaman berupa kebakaran hutan. Untuk tetap mempertahankan keutuhan hutan lindung dan hutan produksi terbatas diperlukan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan secara optimal. Selain itu, untuk mempertahankan daya dukung lingkungan, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan hutan rakyat, sehingga luas hutan minimal seluas 30% dari luas wilayah kabupaten dapat tercapai. Keberadaan hutan tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak positif dalam pengendalian erosi tanah dan penyerapan air, sehingga dapat menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, sehingga perlu dipertahankan kelestariannya.

Hutan negara sebagai buffer penyediaan kawasan bervegetasi permanen kedepan keberadaannya harus tetap dipertahankan melalui law enforcement. Selain itu, perlu pula dilakukan pelibatan masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan. Kedepan, perlu pula dilakukan perbaikan sistem pendataan, pemantauan dan deteksi kerusakan hutan, serta mobilitas dalam penanganan kerusakan hutan.

Produksi hasil hutan berupa kayu jati di Kabupaten Boyolali diperkirakan akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Mengingat siklus ekonomi kayu jati sangat lama, maka kedepan diperlukan penanaman kembali varietas-varietas pohon jati yang umur produktifnya lebih pendek, sehingga pasar dan usaha di sub-sub sektor pengolahan kayu dapat bertahan. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mengupayakan nilai penjualan

yang lebih tinggi dengan memperketat pengawasan peredaran kayu, guna menekan perusakan hutan.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Kondisi Saat Ini

Perkembangan listrik di Kabupaten Boyolali menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Sejak tahun 2004 jangkauan pelayanan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Boyolali telah mencakup seluruh desa/kelurahan, termasuk ke wilayah desa (267 desa/kelurahan). Pada tahun 1999 jumlah rumah tangga hanya sebanyak 215.959 unit, pada tahun 2004 telah berkembang menjadi 241.805 unit. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Boyolali juga menunjukkan peningkatan dari sebanyak 122.845 unit di tahun 1999 menjadi 158.456 unit di tahun 2004. Jumlah pelanggan listrik tersebut sebagian besar adalah pelanggan rumah tangga (R-1) dengan daya 450-1300 VA.

Jika dibandingkan antara jumlah rumah tangga dengan jumlah pelanggan listrik, maka proporsi elektrifikasi rumah di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan peningkatan dari 56,88% menjadi 63,87%. Tingkat elektrifikasi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Biaya instalasi yang cukup tinggi masih menjadi kendala bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses listrik.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya saat ini juga banyak dilakukan, khususnya di desa-desa terpencil sehingga dapat menyuplai kebutuhan listrik masyarakat. Kabupaten Boyolali memiliki potensi air untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), antara lain di Umbul Tlatar. Kedepan hal ini dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan suplai listrik.

Pengembangan energi listrik di Kabupaten Boyolali dilakukan antara lain dilakukan melalui penggalian sumber-sumber energi alternatif. Sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Boyolali telah dikembangkan pemanfaatan limbah kotoran ternak sapi untuk pemenuhan energi rumah tangga menjadi biogas, seperti memasak dan lampu penerangan. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan listrik di Kabupaten Boyolali, diperlukan penyediaan pasokan listrik yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada desa-desa terpencil harus segera dilengkapi instalasi listrik yang memadai yang mencakup seluruh dusun yang ada, tidak hanya pada tingkat desa, sehingga masyarakat dapat mengakses listrik secara mudah dengan biaya yang ringan.

Penyediaan sumber energi bahan bakar bagi masyarakat selama ini dilakukan oleh SPBE, SPBU, Agen LPG, dan agen minyak tanah. Penyediaan sumber energi selama ini menghadapi masalah ketersediaan maupun distribusi yang kurang merata, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan bahan bakar bagi masyarakat.

Kabupaten Boyolali memiliki potensi bahan tambang cukup banyak. Potensi bahan tambang di Kabupaten Boyolali antara lain andesit seluas 24,5 ha, batu belah/ batu kali seluas

12 ha, tras seluas 2 ha, tanah urug seluas 275 ha, pasir dan batu (sirtu) seluas 24 ha, batu gamping seluas 200 ha, bentonit seluas 2.900 ha, tanah diatomae seluas 4,5 ha, dan tanah lempung seluas 79 ha. Penambangan Galian C (pasir, pasir batu dan tanah urug) selama ini telah menyumbang pendapatan daerah cukup besar. Setidaknya pada tahun 2004 terdapat sebanyak 24 perusahaan penambangan dan penggalian yang telah memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

b. Prediksi

Dalam kurun waktu hingga tahun 2025 diperkirakan proporsi elektrifikasi rumah tangga berangsur-angsur meningkat. Peningkatan ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah pasokan listrik dan semakin meratanya sarana prasarana kelistrikan. Permintaan akan sambungan listrik kepada PLN diprediksikan akan meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah rumah yang terbangun. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat juga menjadikan permintaan tambah daya akan semakin bertambah.

Di bidang energi, kedepan perlu dikembangkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar minyak, diantaranya biogas, bioethanol, bahan bakar nabati, dan biodiesel. Hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap bahan bakar minyak, dan mengurangi kesulitan proses distribusi energi untuk keperluan domestik. Walaupun demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi kendala keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia terhadap ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi.

Potensi bahan tambang dan bahan galian golongan C di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu hingga tahun 2025 dipastikan akan mengalami penurunan. Semakin banyaknya jumlah perusahaan penambangan yang beroperasi tentunya menyebabkan kapasitas yang tersisa akan semakin sedikit. Apabila eksploitasi bahan tambang dan bahan galian golongan C ini terus berlanjut utamanya di kawasan Merapi Merbabu dapat dimungkinkan terjadinya dampak yang merugikan bagi masyarakat, seperti bencana alam. Oleh karena itu, harus ada pembatasan wilayah penambangan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Harus selalu dilakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Diperlukan pula upaya menekan kerusakan lingkungan dengan mewajibkan perusahaan pemilik SIPD untuk melakukan reklamasi pada bekas penambangan.

Selain itu juga harus ada pengawasan kemungkinan-kemungkinan adanya penambangan liar (tanpa ijin), baik yang dikelola secara tradisional maupun menggunakan peralatan modern. Apabila hal ini berjalan dengan baik, tentunya mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Untuk meningkatkan PAD pada tahun mendatang perlu dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang dan sumber energi potensial.

BAB III

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari aspek pendidikan dan kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Boyolali yang masih rendah antara lain ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, angka partisipasi sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali menurut pendidikan yang ditamatkan sebagian besar belum mencapai tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SMP). Pada tahun 2004 jumlah penduduk usia 5 tahun keatas masih didominasi tamatan SD (35,10%), yang berpendidikan SMP baru 17,72%, diatas jenjang SMP (SMA dan Perguruan tinggi) sebanyak 13,04%, dan lainnya tidak/belum sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan angka patisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai juga masih rendah. Pada tahun ajaran 2004/2005 APM SD sebesar 85,77%, APM SMP sebesar 60,15%, APM SMA sebesar 30,24%.

Nilai IPM Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebesar 65,7 lebih rendah dibandingkan Jawa tengah yang mencapai 66,3. Usia Harapan Hidup/UHH di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 hanya 69,6 tahun. Pada tahun yang sama Angka Melek huruf baru mencapai 81,9%, rata-rata lama sekolah hanya 6,6 tahun, dan pengeluaran riil sebesar Rp 590.600,00.

Di bidang kesehatan angka kematian ibu pada tahun 1999 sebesar 27,93 per 100.000 kelahiran meningkat menjadi 131,01 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 dengan rata-rata peningkatan sebesar 59,92%. Angka kematian bayi pada tahun 1999 sebesar 8,87 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2004 menjadi 2,48 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita juga rata-rata mengalami penurunan dari 0,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 0,47 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004.

Perkembangan penyakit menular di Kabupaten Boyolali rata-rata mengalami peningkatan, baik kasus Tb Paru (rata-rata peningkatan 31,85%), kasus DBD (rata-rata peningkatan 34,56%), kasus penyakit kusta (rata-rata peningkatan 7,34%), kasus diare rata-rata penurunan 18,53%). Penyakit HIV/AIDS belum dijumpai di Kabupaten Boyolali, namun perlu diwaspadai karena kemungkinan terdapat kasus yang tidak terdeteksi. Kasus penyakit tidak menular juga memiliki kecenderungan meningkat, diantaranya neoplasma, Diabetes Melitus, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Balita dengan gizi buruk selama kurun waktu tahun 1999-2004, rata-rata mengalami penurunan sebesar 28,23% pertahun. Kasus Balita gizi buruk pada tahun 1999 mencapai 5.021 balita (8,62%), selanjutnya menurun menjadi sebesar 658 kasus pada tahun 2004 (0,76%).

Sementara jumlah balita dengan BGM mengalami penurunan dari sebanyak 609 balita (0,96%) pada tahun 1999 menjadi 472 balita (0,66%) pada tahun 2004.

2. Masih rendahnya produktivitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya pertanian

Kegiatan usaha pertanian dalam arti luas memberikan sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Boyolali, namun produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masih perlu ditingkatkan, baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Peningkatan ini perlu dilakukan untuk menunjang ketahanan pangan daerah. Kabupaten Boyolali mengalami surplus bahan pangan beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan susu, namun terjadi kekurangan pada produk-produk pangan kedelai, ubi jalar, daging sapi dan telur.

Produktivitas tanaman padi pada tahun 2004 sebanyak 51,74 kuintal/ha, sedangkan jagung baru mencapai 44,96 kuintal/ha. Untuk tanaman ubi kayu, produktivitasnya sebanyak 156,34 kuintal/ha pada tahun 2004, sedangkan produktivitas tanaman ubi jalar baru mencapai 137,29 kuintal/ha. Untuk jenis tanaman kacang-kacangan, produktivitas kacang tanah pada tahun 2004 hanya 15,36 kuintal/ha, sedangkan produktivitas kacang kedelai hanya 11,02 kuintal/ha. Pada jenis tanaman hortikultura, jenis tanaman sayuran utama di Kabupaten Boyolali antara lain cabe, wortel, kobis, bawang daun, bawang merah dan sawi. Sementara itu produk utama buahan-buahan di Kabupaten Boyolali adalah pepaya, mangga dan pisang. Adapun jenis tanaman perkebunan utama adalah tembakau, buah kelapa dan cengkeh.

Potensi perikanan di perairan umum diantaranya perikanan sungai, menunjukkan peningkatan dari sebanyak 300.000 ton pada tahun 1999 menjadi 161.975 ton di tahun 2004. Produksi perikanan waduk dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan dari sebanyak 1.150.000 ton pada tahun 1999 menjadi 430.130 ton pada tahun 2004. Perikanan budidaya, baik di kolam, Usaha Perikanan Rakyat (UPR), Keramba, maupun budidaya di perairan umum, produksinya terus meningkat dengan laju peningkatan antara 5–10%. Produksi perikanan UPR meningkat dari sebanyak 1.914.579 ekor di tahun 2002 menjadi 2.229.665 ekor di tahun 2003. Produksi perikanan karamba cenderung meningkat dari 192 ton di tahun 1999 menjadi 386 ton di tahun 2003. Produksi perikanan budidaya di perairan umum juga meningkat dari 450 ton di tahun 1999 menjadi 595 ton di tahun 2004. Sementara itu produksi perikanan BBI mengalami peningkatan dari sebanyak 4.188.000 ekor di tahun 1999 menjadi 15.012.000 ekor di tahun 2004.

Produk-produk pertanian (dalam arti luas) yang cukup banyak di Kabupaten Boyolali belum diikuti dengan perkembangan industri pengolahan. Industri pengolahan pertanian di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 baru berdiri sebanyak 628 unit. Pengembangan usaha pertanian ini diperlukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Belum optimalnya infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan industri dan jasa

Jalan kabupaten di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sepanjang 551,83 km, sebanyak 90,19% berupa jalan aspal, 7,96% berupa jalan kerikil dan 1,86% berupa jalan tanah. Walaupun demikian aksesibilitas di wilayah Kabupaten Boyolali masih kurang disebabkan kondisi jaringan jalan yang ada masih kurang memadai dan banyak yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2004 jumlah jalan yang kondisinya baik hanya sebanyak 18,21%, jalan rusak berat sebanyak 10,24%, jalan rusak sedang sebanyak 29,84%, dan rusak ringan sebanyak 41,71%. Jembatan sebagai sarana penunjang transportasi, pada tahun 2004 terdapat sebanyak 246 buah yang memiliki beban muatan 70 ton, dan lainnya (10 buah) memiliki beban muatan <10 ton.

Pada tahun 2004 kendaraan yang terdaftar di Polda Jawa Tengah untuk wilayah Resort Boyolali meliputi mobil penumpang sebanyak 3.692 unit, mobil beban sebanyak 2.161 unit, mobil bus sebanyak 222 unit, dan sepeda motor sebanyak 41.022 unit. Sementara itu, Angkutan pedesaan/perkotaan dilayani sebanyak 21 trayek dengan jenis angkutan berupa Mobil Penumpang Umum (MPU) sebanyak 238 unit. Di Kabupaten Boyolali juga terdapat angkutan taksi sebanyak 21 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi sistem transportasi di Kabupaten Boyolali masih terletak pada sistem jaringan transportasi jalan. Prasarana transportasi lainnya di Kabupaten Boyolali berupa simpul transportasi adalah terminal penumpang. Di Kabupaten Boyolali terdapat dua terminal utama, yaitu terminal Karanggede yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT Karanggede, dan terminal Sunggingan yang dikelola oleh UPT Sunggingan.

Produksi air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 4.831.706 m³ dan terdistribusi sebanyak 4.597.385 m³. Pelayanan PDAM di Kabupaten Boyolali baru menjangkau 10 kecamatan, sementara 9 kecamatan lainnya (Kecamatan Selo, Mojosongo, Ngemplak, Nogosari, Karanggede, Klego Andong, Kemusu dan Wonosegoro) belum terjangkau layanan.

Pada tahun 2004 jangkauan pelayanan listrik PT PLN (Persero) telah mencakup seluruh desa/kelurahan, sehingga jumlah desa teraliri listrik mencapai 100%. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 158.456 unit. Jumlah pelanggan listrik tersebut sebagian besar adalah pelanggan rumah tangga (R-1) dengan daya 450-1300 VA, sedangkan pelanggan untuk keperluan industri maupun jasa masih sangat minim. Jika dibandingkan antara jumlah rumah tangga dengan jumlah pelanggan listrik, proporsi elektrifikasi rumah di Kabupaten Boyolali sampai dengan 2004 baru mencapai 63,87%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah di Kabupaten Boyolali yang belum teraliri listrik.

Dalam bidang komunikasi, jumlah saluran sambungan telepon yang terpasang pada tahun 2004 hanya sebanyak 5.025 SST, terdiri dari rumah tangga sebanyak 4.717 SST, perusahaan 103 SST dan kantor/dinas sebanyak 205 SST. Pemanfaatan sarana komunikasi bagi industri ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah industri yang mencapai 10.689 unit pada tahun 2004. Pengetahuan akan manfaat internet juga menjadikan pemanfaatan

internet di instansi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat semakin luas. Pada tahun 2004 warung internet yang didirikan masyarakat baru sebanyak 5 buah. Jika dilihat dengan jumlah penduduk, maka jumlah warnet di Kabupaten Boyolali ini masih sangat kurang.

4. Masih rendahnya dukungan stakeholder dalam kegiatan penanaman modal daerah

Jumlah nilai investasi PMDM dalam kurun waktu 3 tahun (2002-2004) cenderung menurun, yaitu dari sebesar Rp 520.300.000,00 menjadi hanya sebesar Rp 406.500.000,00. Sementara itu nilai investasi PMA dalam jangka waktu 2002-2004 tetap, yaitu sebesar US\$14.052.000. Untuk meningkatkan pelayanan perijinan investasi, di Kabupaten Boyolali telah beroperasi sistem Pelayanan Peijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dalam bentuk Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM). Untuk menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam proses perijinan investasi, PPSTP mensosialisasikan waktu serta biaya untuk setiap ijin yang diterbitkan. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah

Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan mendasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik menuju perwujudan good governance. Tata pemerintahan umum di Kabupaten Boyolali dilaksanakan pada 19 kecamatan dan 267 desa/kelurahan.

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan membentuk pelayanan perijinan dalam bentuk pelayanan satu atap satu pintu, dan pelayanan di bidang lainnya meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan air bersih dan pelayanan persampahan. Namun demikian karena beberapa keterbatasan/kendala menyebabkan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara optimal dari segi kecepatan dan ketepatan pelayanan. Untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditingkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.

Penyelenggaraan urusan di Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 6 Badan, 11 Dinas, 4 Kantor, 9 Bagian di Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, dan 1 Inspektorat. Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 12.120 orang, terdiri dari 7.316 laki-laki dan 4.804 perempuan. Sumberdaya aparatur pemerintah daerah tersebut merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya berbasis pada data. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali telah memasukkan unsur partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah Kabupaten Boyolali yang diwakili SKPD, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, dan asosiasi profesi.

Penyediaan statistik di Kabupaten Boyolali berdasarkan kegunaannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya. Dalam penyelenggaraan statistik, selama ini BPS melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan statistik di Kabupaten Boyolali masih menghadapi kendala dalam hal penyediaan data dan validitas data. Selama ini belum semua data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan tersedia. Validitas data juga masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan informasi obyektif terhadap kondisi maupun prestasi pembangunan yang telah dicapai.

Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Boyolali masih kurang optimal. Selama ini penyelenggaraan kearsipan dilakukan melalui akuisisi arsip, pengolahan arsip, dan penataan arsip. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004 jumlah arsip tekstual yang terkelola secara rutin mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 23,15% per tahun. Dari sebanyak 1.000 bungkus pada tahun 1999 meningkat menjadi 4.000 bungkus di tahun 2004. Pemeliharaan arsip juga dilakukan melalui kamperisasi arsip, fumigasi arsip dan thermit control.

Penyelenggaraan keperustakaan di Kabupaten Boyolali masih kurang optimal. Dalam kurun waktu tahun 2002-2004 jumlah perpustakaan di Kabupaten Boyolalu tetap, yaitu sebanyak 19 unit, semuanya dalam kondisi aktif. Perpustakaan tersebut terdiri dari perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan perkembangan baik dari jumlah anggota, jumlah peminjam, maupun koleksi buku. Jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kabupaten Boyolali dari tahun 2001 hingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, dari sebanyak 13.236 orang menjadi 13.253 orang. Anggota perpustakaan daerah lebih banyak didominasi oleh PNS (62,97%), selanjutnya kalangan mahasiswa (15,85%), dan kalangan pelajar SMA (12,75%).

6. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 hanya sebesar 2,04%; lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,13%), dan pertumbuhan ekonomi nasional (5,13%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali juga lebih rendah jika dibandingkan kabupaten/kota di sekitarnya, seperti Kota Surakarta (5,80%),

Kabupaten Sukoharjo (4,31%), Kota Salatiga (3,13%), Kabupaten Sragen (4,60%), Kabupaten Wonogiri (3,13%), dan Kabupaten Karanganyar (6,79%).

Jumlah industri di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebanyak 10.689 unit, terdiri dari 0,17% industri besar, 0,14% industri menengah, 1,731% industri kecil formal dan 97,96% industri kecil non formal. Sementara itu, jumlah unit usaha perdagangan kecil dan menengah di Kabupaten Boyolali hanya sebanyak 10.689 pada tahun 2004. Perkembangan ekspor di Boyolali masih relatif rendah dan masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Total nilai ekspor baru mencapai 35.936.460 US dollar pada tahun 2004 dengan jenis komoditas unggulan dari sektor industri benang tenun, pakaian jadi, kerajinan tembaga dan barang cetakan/stasionary.

Jumlah koperasi di Kabupaten Boyolali cenderung meningkat dalam kurun waktu 1999-2004, dari sebanyak 360 buah menjadi 858 buah. Koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Boyolali relatif besar, yakni mencapai rata-rata 22,41%. Secara khusus, koperasi simpan pinjam juga cukup berkembang di Kabupaten Boyolali, yaitu sebanyak 119 unit pada tahun 1999 menjadi 161 unit pada tahun 2004. Kecenderungan kesehatan dari seluruh koperasi yang ada adalah cukup baik atau cukup sehat. Jumlah UKM pada tahun 1999 sebanyak 5392 buah, selanjutnya mengalami peningkatan sampai tahun 2004 menjadi 9.981 buah, sehingga berdampak pada peningkatan nilai produksi dan jumlah tenaga yang terserap.

Di bidang pariwisata, obyek obyek wisata yang sudah dikembangkan dengan baik sebanyak tujuh buah, yaitu obyek wisata Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Waduk Cengklik, Gunung Tugel, Arga Merapi Merbabu, dan OW R. Ng Yosodipuro. Walaupun promosi dan pameran pariwisata sering dilakukan, namun dirasakan masih kurang efektif karena jumlah kunjungan wisata masih kecil. Selama ini perkembangan obyek wisata juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Untuk menunjang pariwisata Kabupaten Boyolali memiliki kekayaan benda purbakala cukup banyak, terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda purbakala yang bergerak tersebut antara lain arca, prasasti, yoni, lingga, alat upacara, alat rumit dan senjata tajam. Sementara itu, benda purbakala tidak bergerak terdiri dari petilasan, petirtaan, candi, monumen, situs, masjid kuno, gereja kuno, bangunan kuno, makam kuno, dan gua. Dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 terjadi peningkatan benda purbakala yang dapat bergerak dari 24 buah menjadi 37 buah. Jumlah benda purbakala tidak bergerak juga mengalami peningkatan dari sebanyak 32 buah di tahun 1999 menjadi 44 buah di tahun 2004. Kabupaten Boyolali juga memiliki kekayaan budaya daerah berupa kesenian tradisional sebanyak 11 jenis kesenian, yaitu tari tradisional, rebana, campursari, keroncong, reog/tari rakyat, kethoprak, rodan, solawatan, karawitan, laras madyo, dan cokekan.

7. Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan

Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 267 desa/kelurahan, 874 dusun, 1.414 Rukun Warga (RW), dan 6.406 Rukun Tetangga (RT) pada saat ini upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih belum maksimal. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Keberadaan lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa baik LPMK/LPMD, KPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan kelompok-kelompok sosial lainnya belum dapat menjadi pelopor dalam pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Boyolali masih menghadapi tantangan masih tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Boyolali menurut kategori BKKBN (keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi) pada tahun 2004 mencapai 34,14%. Selama ini program pengentasan kemiskinan belum mampu mengurangi penduduk miskin secara signifikan, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada tahun 2004 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Boyolali sebanyak 64.540 orang, dan yang tertangani baru 34.753 orang (31,12%). Sebagian besar PMKS adalah keluarga fakir miskin sebanyak 46.778 orang (72,48%) dan wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 4.313 orang (6,68%). Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan upaya pencegahan timbulnya persoalan kesenjangan sosial, disintegrasi sosial dan penyakit sosial, yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat.

8. Belum optimalnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tahun 2000-2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,76%. Sumber pendapatan terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PAD pada kurun waktu tahun 2000-2004 adalah retribusi daerah, yaitu pada kisaran 61,59% - 73,36%. Pajak daerah hanya memberikan kontribusi sekitar 15,31% - 19,59%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berkontribusi sebesar 9,47% - 18,49%, sedangkan laba usaha daerah kontribusinya hanya sebanyak 1,03% - 1,86%.

Dilihat proporsinya, ternyata pertumbuhan PAD dalam kurun waktu tahun 2000-2004 yang relatif besar (4,76%) tidak cukup berarti apabila dibandingkan dengan jumlah APBD. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar antara 6% – 11% saja selama tahun 2000-2004. Dengan demikian selama ini pembangunan daerah lebih banyak ditunjang dengan dana perimbangan. Oleh karena itu, kedepan diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk dapat melakukan pembangunan daerah secara optimal.

9. Menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat

Dalam bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri, masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, masih rendahnya pendidikan politik yang berpengaruh pada pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara, dan belum optimalnya upaya peningkatan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai nasionalisme perlu ditingkatkan dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Perkembangan kelembagaan pembangunan daerah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, terlihat dari jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) berdasarkan profesi, Ormas berdasarkan agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jumlah Ormas profesi pada tahun 2004 sebanyak 60 buah, sedangkan Ormas keagamaan sebanyak 15 buah, dan LSM sebanyak 40 buah. Kelembagaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Boyolali belum dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, terlihat dari rendahnya minat dan motivasi generasi muda untuk bergabung dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelembagaan organisasi kepemudaan. Pada tahun 2004 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Boyolali sebanyak 19 organisasi. Organisasi kepemudaan di tingkat desa dan kelurahan berupa karang taruna sampai tahun 2004 sebanyak 267 organisasi, terdiri dari 84 organisasi kategori tumbuh/pasif, 125 organisasi berkembang/aktif, dan sebanyak 58 organisasi maju/rekreatif. Sementara itu, karang taruna yang memiliki kualifikasi percontohan/aktif rekreatif mandiri sampai saat ini belum ada.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 masih tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 82,90% (569.574 pemilih dari 687.063 orang yang memiliki hak pilih) dan 77,14% (547.423 pemilih dari 711.291 orang yang memiliki hak pilih). Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan, terutama terkait pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, pemahaman hukum dan hak asasi manusia, keterwakilan perempuan dalam politik dan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Masalah keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam kaitannya dalam mencegah kejahatan, kekerasan dan konflik horizontal dalam masyarakat. Upaya meningkatkan ketenteraman dalam masyarakat dilakukan melalui peningkatan sistem keamanan lingkungan secara swadaya (Siskamling), dan pengembangan kemitraan masyarakat dengan kepolisian di masing-masing desa/kelurahan.

10. Kurang terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan

Efektivitas implementasi rencana tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) di Kabupaten Boyolali masih kurang. Selama ini pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan rencana tata ruang tersebut, sehingga pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penggunaan tanah di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2004 meliputi lahan produktif (sawah, tegal/kebun, tambak/kolam, dan padang kembala) sebesar 52,32% dari total wilayah, pekarangan/bangunan (perumahan dan industri) mencapai 24,67%, hutan negara hanya 14,24%, dan sisanya lain-lain. Kebutuhan akan tanah untuk dialihkan untuk perumahan tentunya akan semakin besar seiring dengan penambahan penduduk yang semakin besar.

Potensi hutan di Kabupaten Boyolali meningkat dari pada tahun 2004 sebanyak 14.553 ha, meningkat dibandingkan tahun 2003, yaitu 14.455 ha. Luas hutan rakyat pada tahun 2004 sebanyak 14.539 ha, terutama dari jenis hutan campuran. Luas lahan kritis dan lahan reboisasi pada tahun 2003 dan tahun 2004 tetap, yaitu berturut-turut 9.997 ha dan 840 ha. Namun demikian, luas lahan penghijauan menurun, yaitu dari sebanyak 2.905 ha menjadi 1.670 ha. Kelestarian hutan sangat rawan dengan pengrusakan dan kebakaran hutan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dalam rangka penyelamatan hutan.

Potensi bahan tambang di Kabupaten Boyolali cukup banyak, antara lain andesit seluas 24,5 ha, batu belah/ batu kali seluas 12 ha, tras seluas 2 ha, tanah urug seluas 275 ha, pasir dan batu (sirtu) seluas 24 ha, batu gamping seluas 200 ha, bentonit seluas 2.900 ha, tanah diatomae seluas 4,5 ha, dan tanah lempung seluas 79 ha. Penambangan Galian C (pasir, pasir batu dan tanah urug) selama ini telah menyumbang pendapatan daerah cukup besar. Namun demikian dalam penggaliannya, banyak perusahaan walaupun sudah memiliki Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) kurang memperhatikan aspek lingkungan, sehingga kondisi alam sangat rusak dan berisiko menimbulkan bencana alam yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, harus ada pembatasan wilayah penambangan melalui evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan SIPD, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Diperlukan pula upaya menekan kerusakan lingkungan dengan mewajibkan perusahaan pemilik SIPD untuk melakukan reklamasi pada bekas penambangan.

Pada tahun 2004 jumlah produksi sampah di Kabupaten Boyolali mencapai 80,00 m³/hari dengan kemampuan terangkut sebesar 87,50%. Kemampuan daya angkut sampah yang masih lebih rendah daripada volume yang diproduksi menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kemampuan pengangkutan. Dilihat dari komposisinya, sampah di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebagian besar adalah sampah organik (75,0%), selanjutnya sampah plastik (14,0%), sampah kayu (4,0%), sampah gelas/kaca (1%), sampah kertas (0,5%), sampah kain (0,5%), sampah karet/kulit (0,5%), sampah metal/logam (0,5%) dan sampah lain-lain (4,0%). Jumlah sampah organik yang cukup tinggi tersebut dapat dimungkinkan melalui pengolahan

menjadi pupuk organik, sehingga dapat memberikan nilai tambah tersendiri. Jumlah sampah plastik yang mencapai 14,0% perlu menjadi perhatian dalam penanganannya, karena sifatnya tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme.

Sampai dengan tahun 2004 dari sebanyak 635 sumber air di hutan lindung, yang telah dilakukan perlindungan baru mencapai 70%. Sementara itu, kawasan daerah tangkapan air luasnya mencapai 15.465,20 ha. Luas daerah tangkapan air tersebut secara eksis sama dengan luas kawasan lindung, namun perlindungan daerah tangkapan air ini bukan hal yang mudah, mengingat sebagian besar kawasan tersebut telah menjadi hak milik masyarakat, sehingga pengelolaannya mesti berkaitan dengan kepentingan rakyat, kecuali pemerintah mampu mengambil alih kepemilikan tanahnya.

Perlindungan pencemaran air masih terkendala oleh masih banyaknya usaha-usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari badan air dan masih banyak usaha masyarakat yang belum memiliki persyaratan administrasi dan teknis dalam pengendalian pencemaran air. Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih perlu ditingkatkan, tentunya harus disertai tindak lanjut yang nyata atas laporan dari masyarakat.

Potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Boyolali antara lain bencana gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan Wilayah yang merupakan kawasan rawan bencana letusan gunung api yaitu kawasan yang berdekatan dengan puncak Gunung Merapi di bagian barat seluas 1.143 Ha atau 1,1% dari luas wilayah Kabupaten Boyolali, secara administratif masuk wilayah Kecamatan Cepogo, Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk. Wilayah yang rawan terjadi longsor terdapat di perbukitan terjal di kaki Gunung Merapi dan Merbabu (Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk) serta pelapukan batuan yang intensif di lereng timur gunung Merbabu (kecamatan Ampel). Kawasan rawan tanah longsor juga terdapat di Kecamatan Simo, terutama di Desa Gunggung, Pentur, Talakbroto, Kedunglengkong dan Sumber.

Wilayah rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Ampel, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, Karanggede, Klego, Andong dan Simo. Sementara itu wilayah rawan banjir berada di Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, dan Wonosegoro. Bahaya banjir lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah banjir lahar dingin yang sangat berbahaya bagi masyarakat di kawasan bawah Gunung Merapi. Sementara itu wilayah yang termasuk dalam wilayah rawan angin puting beliung diantaranya Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, dan Ngemplak.

Potensi bencana yang besar tersebut perlu didukung dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Boyolali dan masyarakat dalam mitigasi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana untuk menghindarkan kerugian material dan korban jiwa.

11. Masih cukup tingginya jumlah pencari kerja dan pengangguran terbuka

Penduduk di Kabupaten Boyolali tahun 2004 mencapai 939.087 jiwa, terdiri dari 459.106 jiwa penduduk laki-laki dan 479.981 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk dalam kurun yang sama menunjukkan penurunan dari sebesar 0,57% pada tahun 1999 menjadi hanya 0,35% pada tahun 2004. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan jumlah anak dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga. Jumlah peserta KB aktif selama kurun waktu tahun 1999-2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sebanyak 129.769 orang menjadi sebanyak 133.030 orang. Sementara itu pencapaian peserta KB baru selama tahun 1999-2004 menunjukkan penurunan, yaitu dari sebanyak 19.055 orang menjadi 14.167 orang.

Penduduk usia kerja dalam kurun waktu tahun 2003 - 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,35% dari sebanyak 680.110 orang menjadi 682.521 orang. Angkatan kerja juga mengalami peningkatan dari 449.888 orang di tahun 2003 menjadi 454.501 orang pada tahun 2004 dengan pertumbuhan sebesar 1,03%. Angkatan kerja terdiri dari (1) angkatan kerja yang bekerja, meningkat dari sebanyak 428.877 orang di tahun 2003 menjadi 434.880 orang di tahun 2004; dan (2) angkatan kerja yang mencari kerja, meningkat dari sebanyak 21.011 orang di tahun 2003 menjadi 19.621 orang pada tahun 2004.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari sebanyak 66,15% pada tahun 2003 menjadi 66,59% pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi semakin bertambah. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 sebesar 2,87%, menurun dari sebanyak 3,09% pada tahun 2003.

Dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2004 besarnya nilai UMK di Kabupaten Boyolali menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 nilai UMK hanya sebesar Rp 153.000,00 pada tahun 2004 besarnya UMK telah mencapai Rp 385.000,00. Rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak pada kurun waktu yang sama juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 81,00% pada tahun 2003 menjadi 92,48% pada tahun 2004.

Transmigrasi menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Boyolali, sehingga perlu didorong penyelenggaraannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah transmigran yang dalam kurun tahun 1999-2004 mengalami pasang surut, namun cenderung mengalami peningkatan, dari sebanyak 122 orang (46 KK) menjadi 238 orang (65 KK). Transmigran diberangkatkan ke sejumlah enam provinsi, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung dan Jambi. Transmigran sebagian besar termasuk jenis transmigrasi umum, sebagian kecil lainnya tergolong dalam transmigrasi swakarsa mandiri dan transmigrasi swakarsa berbantuan ternak. Dari keenam provinsi tersebut, daerah yang paling diminati oleh para transmigran adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya minat masyarakat untuk

bertransmigrasi tinggi khususnya untuk penempatan di pulau sumatera dan pulau kalimantan, namun alokasi yang diberikan oleh pemerintah sangat sedikit.

12. Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat yang memadai terhadap akses pelayanan perumahan

Penyediaan perumahan di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh masyarakat (sektor informal) masih dominan dibanding dengan penyediaan yang dilakukan oleh sektor formal (pengembang). Banyaknya perumahan di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999-2004 rata-rata pertumbuhannya hanya 0,86%. Pada tahun 1999 jumlah rumah di Kabupaten Boyolali sebanyak 207.497 unit, dan pada tahun 2004 jumlahnya menjadi 220.090 unit.

Secara umum kualitas rumah di Kabupaten Boyolali masih kurang baik, ditandai hanya sebanyak 33,66% yang sudah permanen, lainnya berupa rumah kayu/papan sebanyak 29,15%, rumah bambu/sirap sebanyak 21,07%, dan rumah semi permanen sebanyak 16,12%. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan dan rehabilitasi lebih lanjut agar kualitas perumahan di Kabupaten Boyolali semakin meningkat. Peningkatan status jenis rumah terutama diarahkan pada jenis rumah bambu/sirap dan rumah kayu/papan agar kesehatan penghuninya dapat terjaga.

Pelayanan air bersih untuk perumahan di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh PDAM masih belum menjangkau seluruh kecamatan. Dalam hal sanitasi, di Kabupaten Boyolali masih banyak rumah yang berkondisi tidak sehat, dalam arti tidak memiliki jamban yang dilengkapi tangki septik. Pada tahun 2004 kepemilikan jamban yang dilengkapi tangki septik hanya 42,2%. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.

13. Belum terpenuhinya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan dan keadilan gender

Permasalahan penegakkan hukum dan jaminan kepastian hukum dan HAM bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha masih banyak ditemui. Masalah persengketaan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu masalah penting dalam pembangunan hukum di daerah, terutama menumbuhkan hubungan industrial dan perlindungan sosial lainnya. Disamping itu, diperlukan penegakkan peraturan perundangan di daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, misalnya IMB, Pajak Reklame, Retribusi, Persampahan dan pengaturan sektor informal. Jumlah kasus pidana dalam kurun waktu tahun 1999-2004 cenderung mengalami peningkatan dari sebanyak 172 perkara (1999) menjadi 291 perkara (2004), sedangkan kasus perdata cenderung menurun dari 54 perkara (1999) menjadi 39 perkara (2004). Dari jumlah perkara tersebut, yang terselesaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 87,62% untuk perkara pidana, dan 63,82% untuk perkara perdata.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur keberhasilan pembangunan berwawasan gender di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999–2004 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari 61,9 di tahun 1999 menjadi 62,6 di tahun 2004. Nilai IPG tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 57,4 di tahun 1999 dan 59,8 di tahun 2004. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menunjukkan keberhasilan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Boyolali dari tahun 1999–2004 menunjukkan kategori cukup baik. Besarnya IDG tahun 1999 sebesar 47,1, meningkat menjadi 52,3 pada tahun 2004. Nilai IDG Kabupaten Boyolali masih berada di bawah rata-rata IPG Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 51,2 pada tahun 1999 dan 56,9 pada tahun 2004. Permasalahan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Boyolali relatif tertinggal dari pada laki-laki. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun pendidikan dan kesadaran politik perempuan masih rendah. Kaum perempuan dan pemilih pemula relatif kurang mendapatkan pendidikan politik, menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya peningkatan keterwakilan politik bagi perempuan sebesar 30%.

Jumlah penduduk kelompok umur 0-18 tahun (anak-anak) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 mencapai 36,33%, sebagian besar anak laki-laki (55%) dan lainnya anak perempuan (45%) yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Boyolali dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Dalam hal pendidikan, masih terdapat kecenderungan pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Masalah tumbuh kembang anak juga masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan agar generasi mendatang lebih berkualitas.

14. Masih lemahnya kerjasama kemitraan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran pemerintah guna membiayai pembangunan

Permasalahan rendahnya investasi tidak terlepas kurang memadainya faktor-faktor pendukung investasi antara lain adanya potensi atau klaster pendukung (Supporting Industries) ketersediaan pusat perdagangan dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Faktor pendukung yang lain adalah kondisi sosial politik serta keamanan yang baik serta keterbukaan masyarakat dalam menerima investasi, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, pangsa pasar luas dan relatif dekat dengan bandara.

Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam menangani 34 urusan tersebut. Kemampuan pembiayaan, sumber daya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah tersebut. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik, namun proporsi terbesar adalah terdapat pada belanja tidak langsung terutama pada belanja gaji pegawai sedangkan proporsi untuk belanja langsung semakin menurun, sehingga kemampuan

keuangan daerah untuk membangun semakin terbatas. Penyebab utama dari kondisi ini adalah karena kemampuan keuangan Kabupaten Boyolali masih sangat bergantung pada dana dari pusat terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dimana alokasinya untuk Belanja Pegawai.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOYOLALI YANG BERDAYA SAING, KONSTITUSIONAL, AMAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Visi Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Boyolali. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat demokratisasi, konstitusional, daya saing, kemandirian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Penjelasan unsur visi Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Berdaya Saing

Berdaya saing mengandung arti bahwa Kabupaten Boyolali memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang, baik di tingkat regional maupun nasional. Keunggulan kompetitif ini mencakup semua aspek antara lain infrastruktur, sumberdaya manusia, perekonomian, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini ditandai oleh: terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang optimal; terwujudnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha; terwujudnya peningkatan investasi yang tinggi; Terwujudnya integrasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Konstitusional

Konstitusional diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan selalu berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, mengupayakan semaksimal mungkin perwujudan good governance, mengedepankan penegakan hukum dan hak asasi manusia serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini ditandai oleh: Terwujudnya good governance dan profesionalisme dan kompetensi aparat, terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal, terwujudnya kesadaran bangsa negara masyarakat; terwujudnya iklim politik dan demokratis yang kondusif; terwujudnya penegakan hukum dan HAM; terwujudnya pelayanan publik transparan dan akuntabel serta tidak memihak;. dan berkembangnya kehidupan politik yang harmonis, dinamis, dan partisipatif.

3. Aman

Aman diartikan pemerintah Kabupaten Boyolali selalu menjamin masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan aman dan nyaman, melalui optimalisasi keamanan lingkungan dan menekan angka kejahatan serta menjaga iklim yang kondusif bagi aktivitas masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya angka kejahatan, menurunnya kasus pelanggaran lalulintas dan menurunnya tingkat kerawanan sosial.

4. Mandiri

Mandiri mengandung arti bahwa pada tahun 2025 yang akan datang Kabupaten Boyolali memiliki pendapatan asli yang besar sehingga mampu membiayai sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan sebagian besar potensi daerah. Dengan demikian pembangunan dapat dinikmati dan menjangkau seluruh kalangan baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Kondisi ini ditandai oleh: Terwujudnya jumlah dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah semakin besar. Bahan baku industri dan usaha masyarakat sebagian besar berasal dari Kabupaten Boyolali, kesetaraan dan keadilan gender dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;

5. Sejahtera

Sejahtera, mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kondisi ini ditandai oleh: tingginya pendapatan per kapita Kabupaten Boyolali; terwujudnya pemerataan pendidikan; terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi; menurunnya jumlah penduduk miskin; dan dan terwujudnya peningkatan lapangan kerja.

4.2 Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.
2. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan masyarakat yang aman dan tertib.
3. Mewujudkan penegakan hukum dan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pemerintahan.
4. Mewujudkan SDM berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Mewujudkan ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas.
6. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan bertumpu pada sektor unggulan daerah dan usaha ekonomi rakyat.
7. Mewujudkan daerah ramah investasi dengan penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri, pelayanan perijinan yang prima dan kerjasama kemitraan daerah.
8. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber keuangan daerah yang sudah ada dan mengembangkan sumber-sumber keuangan daerah baru yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
9. Mewujudkan ketercukupan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

5.1 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan pendidikan.
2. Terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat yang tinggi.
3. Terwujudnya produktivitas pertanian optimal.
4. Terwujudnya produktivitas hutan rakyat.
5. Terwujudnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang optimal.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
7. Terwujudnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam usaha.
8. Terwujudnya peningkatan investasi yang tinggi.
9. Terwujudnya good governance dan profesionalisme dan kompetensi aparat.
10. Terwujudnya Penurunan Kemiskinan.
11. Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal.
12. Terwujudnya kesadaran bangsa negara masyarakat.
13. Terwujudnya iklim politik dan demokratis yang kondusif.
14. Terwujudnya integrasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
15. Terwujudnya Peningkatan Lapangan Kerja
16. Terwujudnya kualitas penegakan hukum dan penghargaan Hak Asasi Manusia serta kesetaraan dan keadilan gender.

5.2 Arah Kebijakan Jangka Panjang

5.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Arah kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.

- e. Mengoptimalkan penyediaan data statistik yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah.
- f. Mengoptimalkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat.
- g. Mengoptimalkan pelayanan administrasi pertanahan untuk mendukung tertib administrasi agraria.
- h. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh anggota masyarakat.

2. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan masyarakat yang aman dan tertib

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama antar kelompok dan jiwa nasionalisme masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penanggulangan kriminalitas.
- c. Mengembangkan iklim demokrasi dalam segi-segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang Pemerintahan

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mewujudkan penegak hukum berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Mewujudkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.
- c. Mewujudkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- f. Mengupayakan penanggulangan kerawanan sosial.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu dan relevansi serta tata kelola pendidikan.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- c. Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk secara optimal.
- e. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi umat beragama serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama.
- f. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi keolahragaan.

- g. Meningkatkan kualitas penelenggaraan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera
- h. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat.

5. Meningkatkan Ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam rangka menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan.
- c. Mengembangkan perumahan yang layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dalam rangka mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penyediaan air baku dan air bersih agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
- f. Mengembangkan energi alternatif dan mengoptimalkan suplai listrik ke seluruh wilayah.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana telekomunikasi.

6. Mewujudkan Perekonomian daerah yang maju dengan bertumpu pada sektor unggulan daerah dan usaha ekonomi rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik dalam negeri maupun keluar negeri.
- b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- c. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata daerah.
- d. Peningkatan produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat sampai tingkat rumah tangga.

7. Mewujudkan daerah ramah investasi dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi pengembangan industri, pelayanan perijinan yang prima dan kerjasama kemitraan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan investasi daerah melalui penciptaan iklim dan sarana prasarana pendukung investasi.
- b. Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah melalui peningkatan kualitas SDM.
- c. Peningkatan daya saing industri daerah melalui penerapan teknologi dan standar produk.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis.
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi yang profesional dibidangnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan.

f. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

8. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan mengembangkan sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas sumber Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

9. Mewujudkan ketercukupan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengurangi penduduk miskin.
- b. Meningkatkan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Mengurangi pengangguran melalui fasilitasi usaha masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja daerah.
- d. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan-kawasan tertinggal.

10. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- b. Mengoptimalkan usaha pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menghindari kerusakan lingkungan.
- d. Meningkatkan penerapan standar teknis pengolahan limbah dan pengawasan pencemaran air.
- e. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan padat kendaraan dan kawasan industri untuk mengurangi polusi udara.

5.2.2 Arah Pembangunan Menurut RTRW

Arah pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah "Terwujudnya

Pembangunan Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berwawasan Lingkungan dengan mempertahankan kawasan lahan Pertanian berkelanjutan dan pengembangan Aneka Industri". Sasaran yang akan dicapai adalah : terkendalinya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budaya, tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan, terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha, dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan sektor pembangunan.

Pembangunan wilayah dilakukan melalui perencanaan peningkatan sarana prasarana pendukung sistem wilayah diantaranya adalah peningkatan Kawasan Bandara Adi Sumarmo Boyolali sebagai bandara Internasional, peningkatan sarana prasarana Transportasi, misal peningkatan status jalan maupun pembangunan terminal baru. Hal ini sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang merencanakan pembangunan Terminal Tipe A di Kab. Boyolali. Dibangunnya jalan Tol Semarang-Solo, Solo-Mantingan dan Yogya-Solo, untuk mengurangi kemacetan serta memperlancar arus distribusi barang antar daerah baik itu hasil pertanian maupun industri. Namun demikian pembangunan wilayah tersebut tidak meninggalkan aspek lingkungan dengan mempertahankan pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Kab. Boyolali dan sebagai daerah penyangga pangan nasional.

Mengingat tingginya minat investasi di sektor industri yang dilihat dari tingginya permintaan perijinan industri, maka diakomodasi melalui adanya kawasan-kawasan peruntukan industri baru yaitu di Kecamatan Ampel, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Klego dan Kecamatan Nogosari. Pembangunan industri di wilayah-wilayah baru guna menunjang perkembangan kegiatan industri di Kabupaten Boyolali terletak didaerah lahan pertanian yang kurang subur sehingga tidak mengurangi lahan pertanian berkelanjutan.

5.3 Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena

itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

5.3.1 Tahap Pertama (Tahun 2005-2010)

Sasaran pokok pembangunan tahap pertama adalah sebagai berikut :

- 1. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat,** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbangunnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan efektif.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang.
 - c. Berkurangnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - d. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
 - e. Meningkatnya penataan data statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan.
 - g. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan.
 - h. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- 2. Meningkatnya rasa aman dan damai masyarakat,** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat.
 - b. Menurunnya angka kriminalitas dan tingkat pelanggaran terhadap ketertiban umum.
 - c. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga politik daerah sesuai konstitusi yang berlaku.
- 3. Meningkatnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penanganan kasus penyimpangan keuangan daerah/Negara (korupsi).

- b. Meningkatnya jaminan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
- d. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan.
- e. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Meningkatnya upaya penanggulangan kerawanan sosial.

4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan.
- b. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan hingga ke perdesaan.
- c. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
- d. Meningkatnya efektivitas program keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.
- e. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran pemuda dan prestasi olah raga dalam pembangunan.
- g. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat.

5. Meningkatnya Ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan terutama yang mengalami rusak berat dan masih berupa jalan tanah.
- b. Meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir.
- c. Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian.
- e. Meningkatnya kuantitas air baku dan air bersih bagi masyarakat.
- f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah.
- g. Meningkatnya jangkauan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat.

6. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju dengan bertumpu pada sektor unggulan daerah ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik di dalam negeri dan luar negeri.
- b. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan kualitas pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- c. Berkembangnya obyek wisata dan daya tarik wisata daerah.

- d. Meningkatnya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- e. Meningkatnya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah.

7. Meningkatnya investasi yang didukung dengan peningkatan penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta pelayanan perijinan yang prima dan kerja sama kemitraan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya regulasi dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan investasi.
- b. Meningkatnya kualitas SDM dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. Meningkatnya pengetahuan pelaku industri tentang ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan standar produk.
- d. Meningkatnya kuantitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis.
- e. Meningkatnya kuantitas kerjasama pemerintah daerah dengan institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan.
- f. Meningkatnya penjangkaran kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

8. Meningkatnya ketercukupan lapangan pekerjaan dan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah keluarga miskin (keluarga pra sejahtera dan sejahtera I).
- b. Meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.
- c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
- d. Terbukanya kawasan yang relatif terisolasi di SWP I dan SWP IV.

9. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

10. Meningkatnya mutu pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya kehutanan dan kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. Meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari perairan.
- e. Meningkatnya kuantitas ruang terbuka hijau pada kawasan padat kendaraan dan kawasan industri.

5.3.2 Tahap kedua (Tahun 2011-2015)

Sasaran pokok pembangunan tahap kedua adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan efektif.
- b. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang.
- c. Semakin berkurangnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Semakin tingginya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
- e. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.
- f. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan.
- g. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan.
- h. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertanamnya sikap politik yang demokratis, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat.
- b. Semakin menurunnya angka kriminalitas dan tingkat pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- c. Semakin meningkatnya partisipasi dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Semakin meningkatnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat serta semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan , ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penanganan kasus berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama korupsi.
- b. Semakin meningkatnya jaminan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.
- c. Semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
- d. Semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan.
- e. Semakin menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Semakin meningkatnya upaya penanggulangan kerawanan sosial.

4. Semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik dengan titik berat pada pengembangan pendidikan kejuruan.
- b. Semakin memadainya sarana dan prasarana perpustakaan hingga ke perdesaan.
- c. Semakin tingginya kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.
- d. Semakin meningkatnya efektivitas program keluarga berencana dan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- e. meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama.
- f. Semakin tingginya kesadaran akan pentingnya peran pemuda dan prestasi olah raga dalam pembangunan.
- g. Semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat untuk menciptakan ketahanan budaya daerah.

5. Semakin meningkatnya ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan.
- b. Semakin meningkatnya kuantitas prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir.
- c. Semakin meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
- d. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian.
- e. Semakin meningkatnya kuantitas air baku dan air bersih bagi masyarakat.
- f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah.
- g. Semakin meningkatnya jangkauan pelayanan telekomunikasi ke berbagai wilayah.

6. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perdagangan produk-produk unggulan daerah baik di dalam negeri dan luar negeri.
- b. Semakin meningkatnya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan kualitas pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan..
- c. Semakin berkembangnya obyek wisata dan jumlah kunjungan wisata daerah.
- d. Semakin meningkatnya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- e. Semakin meningkatnya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah.

7. Semakin meningkatnya investasi daerah yang didukung semakin meningkatnya penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta semakin meningkatnya pelayanan perijinan dan kerjasama kemitraan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin baiknya iklim investasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi.
- b. Semakin tingginya kualitas SDM dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. Tingginya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan standar produk.
- d. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis.
- e. Semakin meningkatnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan.
- f. Terjalannya kerjasama dengan beberapa daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

8. Semakin Meningkatnya kecukupan lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin menurunnya jumlah keluarga miskin (keluarga pra sejahtera dan sejahtera I).
- b. Semakin meningkatnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.
- c. Semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

9. Semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah
- b. Semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah
- c. Semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

10. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya pemanfaatan sumberdaya kehutanan dan kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Semakin meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Semakin meningkatnya pengawasan dan pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. Meningkatnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencemari perairan.

- e. Semakin meningkatnya kuantitas ruang terbuka hijau pada kawasan padat kendaraan dan kawasan industri.

5.3.3 Tahap Ketiga (Tahun 2016-2020)

Sasaran pokok pembangunan tahap ketiga adalah sebagai berikut :

1. Semakin optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan efektif.
- b. Semakin tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang.
- c. Semakin rendahnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
- e. Tertatanya data base database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.
- f. Semakin tingginya kualitas pelayanan kearsipan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan.
- g. Semakin tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan.
- h. Semakin tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2. Semakin kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tumbuhnya iklim politik yang demokratis, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin rendahnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat.
- b. Semakin rendahnya angka kriminalitas serta tingkat pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- c. Semakin tingginya partisipasi dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Semakin mantapnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan Semakin tingginya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan , ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya penanganan kasus berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama korupsi.
- b. Semakin tingginya konsistensi dan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.
- c. Semakin tingginya penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

- d. Semakin tingginya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan.
- e. Semakin rendahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Semakin tingginya upaya penanggulangan kerawanan sosial.

4. Semakin tingginya kualitas sumberdaya manusia, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik dengan titik berat pada pengembangan lifeskill.
- b. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- c. Semakin meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
- d. Semakin tingginya efektivitas program keluarga berencana dan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- e. Semakin meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama.
- f. Semakin meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi keolahragaan.
- g. Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pencegahan berkembangnya budaya asing yang negatif.

5. Semakin tingginya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.
- b. Semakin memadainya kuantitas prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir.
- c. Semakin tingginya ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
- d. Semakin tingginya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian.
- e. Semakin banyaknya kuantitas air baku dan air bersih bagi masyarakat.
- f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah.
- g. Semakin luasnya jangkauan pelayanan telekomunikasi ke berbagai wilayah.

6. Semakin tingginya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya perdagangan produk-produk unggulan daerah di dalam negeri dan luar negeri.
- b. Semakin tingginya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan kualitas pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan..
- c. Semakin tingginya jumlah kunjungan wisata daerah dan lama tinggal wisatawan.
- d. Semakin tingginya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- e. Semakin meratanya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.

7. Semakin tingginya investasi daerah yang didukung dengan semakin tingginya penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta semakin meningkatnya pelayanan perijinan dan kerjasama kemitraan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya pencapaian target investasi di Kabupaten Boyolali.
- b. Semakin meningkatnya perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. Meningkatnya penerapan teknologi dan standar produk industri daerah untuk meningkatkan daya saing.
- d. Semakin eratnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis.
- e. Semakin eratnya jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan.
- f. Semakin eratnya kerjasama dengan beberapa daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

8. Semakin tingginya ketercukupan lapangan pekerjaan dan semakin tingginya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera II dan sejahtera III
- b. Semakin tingginya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.
- c. Semakin rendahnya tingkat pengangguran terbuka.

9. Semakin tingginya kemandirian keuangan daerah dengan semakin berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah
- b. Semakin tingginya proporsi Pendapatan Asli Daerah
- c. Semakin tingginya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

10. Semakin tingginya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkembangnya produk-produk kehutanan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Semakin tingginya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Semakin terkendalinya alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. Menurunnya pencemaran perairan yang disebabkan aktivitas usaha masyarakat.
- e. Semakin berkurangnya pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan industri.

5.3.4 Tahap keempat (Tahun 2021-2025)

Sasaran pokok pembangunan tahap keempat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan efektif.
- b. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang.
- c. Rendahnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Tingginya profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
- e. Semakin lengkapnya ketersediaan data dan informasi yang mutakhir untuk keperluan perencanaan pembangunan.
- f. Tingginya kualitas pelayanan kearsipan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan.
- g. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan.
- h. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan politik yang demokratis, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Rendahnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat.
- b. Rendahnya angka kriminalitas serta tingkat pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- c. Tingginya partisipasi dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Terwujudnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan , ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingginya penanganan kasus berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama korupsi.
- b. Terwujudnya konsistensi dan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.
- c. Tingginya penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan.
- e. Rendahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Terwujudnya upaya penanggulangan kerawanan sosial.

4. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingginya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik dengan titik berat pada pengembangan kewirausahaan.
 - b. Semakin tingginya kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
 - c. Semakin tingginya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - d. Tingginya efektivitas program keluarga berencana dan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
 - e. Semakin tingginya ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama.
 - f. Semakin tingginya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi keolahragaan.
 - g. Semakin tingginya peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pencegahan berkembangnya budaya asing yang negatif.
5. **Tingginya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin tingginya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Terpenuhinya prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir.
 - c. Semakin memadainya ketersediaan rumah layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Tingginya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian.
 - e. Semakin terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih bagi masyarakat.
 - f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah.
 - g. Semakin luasnya jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah.
6. **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin tingginya perdagangan produk-produk unggulan daerah di dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Tingginya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan kualitas pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan..
 - c. Tingginya jumlah kunjungan wisata daerah dan lama tinggal wisatawan.
 - d. Tingginya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
 - e. Meratanya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
7. **Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan didukung tingkat investasi yang tinggi dan penguasaan IPTEK bagi pengembang industri dan terwujudnya pelayanan perijinan yang prima serta kerjasama kemitraan**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin tingginya jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Boyolali.
 - b. Semakin tingginya perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah.

- c. Semakin tingginya penerapan teknologi dan standar produk industri daerah untuk meningkatkan daya saing.
 - d. Semakin optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis.
 - e. Semakin optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan.
 - f. Semakin optimalnya kerjasama dengan banyak daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.
8. **Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan sehingga daya beli masyarakat tinggi**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin meningkatnya jumlah keluarga sejahtera II dan sejahtera III
 - b. Tingginya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.
 - c. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka.
9. **Semakin Optimalnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin optimalnya jumlah Pendapatan Asli Daerah
 - b. Semakin optimalnya proporsi Pendapatan Asli Daerah
 - c. Semakin optimalnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah
10. **Semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup**, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Semakin meningkatnya daya saing produk-produk kehutanan dan optimanyal kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
 - b. Semakin optimalnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - c. Terkendalinya alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - d. Terkendalinya pencemaran perairan yang disebabkan aktivitas usaha masyarakat.
 - e. Terkendalinya pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan industri.

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua) puluh tahun, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun dengan mengacu pada RPJP-Nasional dan RPJP-Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, arah kebijakan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Boyolali yang berdimensi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali yang berdimensi tahunan.
3. RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
4. RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah, dilaksanakan berdasarkan potensi dan kondisi daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah.
5. Untuk menjamin konsistensi dalam pelaksanaan RPJP-Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 dilakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan tahap RPJM-Daerah (lima tahunan).
6. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Boyolali, sangat tergantung pada: (1) komitmen yang kuat dari pemimpin daerah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.